Strategi Pemberdayaan Madrasah Berbasis Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN ALAUDDIN

MAKASSAR – INDONESIA

STRATEGI PEMBERDAYAAN MADRASAH BERBASIS MASYARAKAT

DR. Hasyim Haddade, M.Ag.

Editor: Dr. H. Andi Achruh, M. Pd.I.

Alauddin University Press

Strategi Pemberdayaan Madrasah Berbasis Masyarakat

Penulis:
Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.

Editor:
Dr. H. Andi Achruh, M. Pd.I.

Penyelaras Akhir:
Taufiq Mathar

Cetakan I: 2021
v + 168 hlm.; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-602-328-375-0

Alauddin University Press
UPT Perpustakaan UIN Alauddin
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong,
Samata, Kabupaten Gowa
Website: http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/

PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu di-*update* dan di-*upgrade*. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahun di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, 17 Agustus 2021

Rektor UIN Alauddin Makassar

Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D

PENGANTAR PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ للهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحاَتِ وَبِفَضْلِهِ تَتَنَزَّلُ الْخَيْرُ وَالْبَرَكَاتُ وَبِتَوْفِيْقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْغَايَاتُ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّابِقِيْنَ إِلَى الْخَيْرَات . وَ بَعْدُ ..

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur hanya tertuju kepada Allah swt. atas segala karunia dan nikmatnya sehingga penulis dapat meyelesaikan buku ini sebagaimana yang ada di tangan pembaca.

Dalam tradisi akademik, penyusunan buku referensi seperti ini tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan pengadaan 100 buku referensi bagi LP2M yang diperuntukkan bagi para guru besar, konsorsium matakuliah, dan bagi seluruh tenaga dosen untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan gagasannya kepada khalayak tetapi lebih dari itu adalah sebagai wujud semangat keilmuan yang secara pribadi penulis inginkan dan selalu berusaha untuk mewujudkannya.

Lebih spesifik lagi, semangat keilmuan yang penulis cita-citakan adalah untuk melihat lebih seksama dinamika partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan madrasah, dalam konteks sekarang menurut hemat penulis masih banyak aspek yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi kecenderungan global (*global trend*) yang serba materialistik, dan jauh dari nilai-nilai ketuhanan serta kemanusiaan universal. Antara lain dari beberapa aspek yang dimaksud adalah keteribatan masyarakat secara langsung dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan madrasah, baik sebagai orang tua, Komite Madrasah atau Dewan Pendidikan, atau bentuk partisipasi lainnya.

Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca untuk melihat hubungan antara madrasah dan masyarakat serta memberi solusi bagi peningkatan mutu dan pemberdayaan madrasah yang berbasis masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku referensi ini melibatkan banyak pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, tiada ucapan yang patut penulis sampaikan kepada mereka, kecuali dengan harapan semoga jasa-jasa mereka senantiasa mendapat ridha dari Allah swt. Amin.

Akhirnya, penulis berharap adanya masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak demi pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut buku ini, agar di masa yang akan datang benar-benar bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat Islam Indonesia.

Wassalam.

Makassar, 2021

Penyusun,

DAFTAR ISI

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ‘ULAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

BAB I

PENDAHULUAN

Madrasah adalah salah satu model lembaga pendidikan yang mempunyai peluang besar untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan ini secara kultural sungguh tepat mengingat bangunan peradaban suatu bangsa bisa menjadi sangat kuat ketika bertumpu pada akar dan kesinambungan budaya. Pandangan keseharian, baik dari aspek budaya maupun pandangan ilmiah membenarkan kenyataan bahwa madrasah merupakan bagian dari tradisi pendidikan yang hidup di Indonesia[1].

Di Indonesia, eksistensi madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Madrasah lahir sejak awal abad ke 20[2]. Kelahiran

---

[1]A. Malik Fajar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam,*(Jakarta: LP3NI, 1998), h., 109.

[2]Secara historis, pendidikan madrasah di Indonesia lahir pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya Madrasah *Mambaul Ulum* di Keraton Surakarta tahun 1905 dan *Madrasah Adabiyah* yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909. Lihat Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada, 2007), h.

madrasah ini tidak lepas dari peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab. Namun dalam perkembangannya, sampai saat ini, madrasah masih lebih banyak mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat dalam berbagai aspeknya terutama dari aspek kualitas lulusannya, madrasah masih dikesankan oleh sebagian masyarakat sebagai "anak tiri",[3] sekolah "kelas dua" dan "marginal", bahkan dirasakan masih tersisih dari sistem pendidikan nasional.[4]

Rendahnya kualitas lulusan (*output*) madrasah dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi madrasah memang sangat kompleks. *Pertama,* dari segi *input* pendidikannya terlihat cukup jelas bahwa siswa yang masuk ke madrasah kebanyakan memiliki tingkat kemampuan akademik yang relatif rendah. Sarana prasarana dan fasilitas belajar yang dimiliki madrasah masih sangat terbatas. Kompetensi guru dalam mengajar juga masih rendah, karena banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, status sosial orang tua siswa, lingkungan belajar dan sebagainya. *Kedua,* dari segi proses pendidikan, madrasah belum optimal dalam memberdayakan semua komponen-komponen yang terlibat

---

78. Lihat pula Kontowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1999), h. 16.

[3]Ahmad Khoirul Fatah dalam sebuah artikelnya yang berjudul *'Anak Tiri itu Bernama Madrasah'* mengatakan bahwa salah satu bentuk ketidakadilan kebijakan pemerintah terhadap dunia madrasah adalah dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Moh. Ma'ruf, tanggal 21 September 2005 No. 903/2429/SJ, tentang pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2006 yang melarang pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD kepada organisasi Vertikal, sementara madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam selama ini berada di bawah koordinasi DEPAG yang tidak diberi kewenangan otonomi. Surat edaran Mendagri ini jelas memicu keberatan dari berbagai pihak, sebab kalau sekiranya Surat Edaran itu dipatuhi oleh semua kepala daerah, maka masalah klasik yang dihadapi dunia madrasah akan terus berlanjut tanpa solusi, karena jelas hal ini akan memperpanjang dan memperlebar disparitas dunia madrasah dengan sekolah umum di bawah naungan Diknas. (Harian Republika tanggal 28 Pebruari 2006 dalam www.republika.co.id. Diakses tanggal 20 Nopember 2010).

[4]Suwito, M. Fauzan (Ed.), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 224.

dalam proses tersebut untuk mencapai tujuan pendidikannya. Akibatnya, madrasah terkesan berjalan apa adanya dan memiliki kulaitas lulusan yang sangat rendah.

Dengan demikian, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas madrasah, peran serta masyarakat dan lingkungan sekitar madrasah sangatlah menentukan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sekitar madrasah turut mewarnai karakteristik para peserta didik baik kemungkinan yang bersifat positif maupun negatif. Masyarakat sekitar madrasah diharapkan mampu menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan madrasah.

Implikasi hubungan antara madrasah dan masyarakat melahirkan model manajemen yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) *School Based Management* atau di lembaga madrasah disebut Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat (1) bahwa:

> *'Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah'*.[5]

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem baru pendidikan Indonesia yang terdesentralisasi, yang muncul sebagai bagian dari proses reformasi dan demokratisasi yang terjadi di berbagai bidang. Melalui MBM, sekolah atau madrasah diberikan otonomi lebih besar dari negara. Dalam hal ini, para guru, orang tua murid dan masyarakat diharapkan untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. Dibandingkan dengan sekolah umum, banyak madrasah (khususnya swasta) sudah memiliki otonomi yang relatif besar dibandingkan sebelum

[5]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No. 20 Th. 2003* tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 33. Lihat pula E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Cet. XI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 12.

Manajemen Berbasis Madrasah diterapkan menjadi kebijakan pada tahun 2003, karena madrasah memang lahir dari, oleh dan untuk masyarakat.

Untuk mengawal MBM, pemerintah memperkokoh pelaksanaan MBM melalui SK Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan dua lembaga formal, bentukan pemerintah sebagai pilar penopang Manajemen Berbasis Sekolah. Lembaga ini dimunculkan untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif bagi peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan formal, informal, maupun pendidikan non formal. Kebijakan ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, baik pada tingkat pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, sekolah, orang tua, masyarakat dan semua *stakeholder* pendidikan.[6]

Meskipun sudah terbentuk Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah pada masing-masing satuan pendidikan, namun tata kelola madrasah (*madrasah governance*) dalam konteks implementasi Manajemen Berbasis Madrasah masih menyisakan berbagai persoalan. Dewan pendidikan dan Komite Sekolah belum sepenuhnya memainkan fungsi dan perannya sebagaimana yang diharapkan. Secara formal, lembaga ini diharapkan berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan madrasah, namun kenyataannya tidak demikian, Keterlibatan *stakeholder* kunci, seperti orang tua murid dan masyarakat terhadap madrasah masih sangat terbatas, dan pada umumnya kepala madrasah masih mendominasi dalam berbagai kebijakan dan pengambilan

[6]Dirjen Dikdasmen, *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah* (Dirjen Dikdasmen, 2002), h. 1.

keputusan. Hal ini merefleksikan hubungan yang lemah antara madrasah dengan masyarakat.

Berbagai persoalan yang memiliki relevansi tentang persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap madrasah sebagaimana yang disebutkan di atas, menunjukkan adanya permasalahan empirik yang harus diteliti dan dikaji lebih jauh yaitu; 1) bahwa masyarakat pada umumnya masih mempersepsikan madrasah sebagai *the second class,* marjinal yang memiliki kualitas lulusan yang relatif lebih rendah, karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi fisik gedung madrasah yang kurang baik, fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai, dan sistem pendidikan yang belum memenuhi standar pendidikan nasional, 2) partisipasi masyarakat terhadap madrasah masih sangat terbatas, sementara madrasah yang ada pada umumnya dikelola langsung oleh masyarakat.

BAB II

PERSEPSI, MASYARAKAT, DAN MADRASAH

A. Konsep tentang Persepsi

1) Pengertian Persepsi

Istilah persepsi berasal dari kata *perception.* Dalam kamus *Cambridge International Dictionary of English*, kata *perception* diartikan sebagai "*an awareness of thing through the physical sense"*[7] (Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera). Dengan demikian, kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses penginderaan, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu

[7]Paul Procter (Editor), *Cambridge International Dictionary of English* (London: University of Cambridge Press, 1995), h. 1047.

melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.[8]

Stanton, sebagaimana yang dikutip dalam buku prilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain-lain).[9]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.[10] Philip Kottler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.[11] Persepsi di sini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan.[12] Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses

---

[8]Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2005), h.. 99

[9]Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2013), h. 91.

[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), h. 304.

[11]Philip Kottler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengandalian*, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga, ,1997), h. 164.

[12]Joyce Marcella Laurence, *Arsitektur dan Prilaku Manusia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 56.

pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.[13]

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa persepsi ditimbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak. Sukmana menjelaskan, persepsi timbul selain akibat rangsangan dari lingkungan. Persepsi juga lebih merupakan proses yang terjadi pada struktur fisiologi dalam otak.[14] Penangkapan tersebut biasanya dalam bentuk sensasi dan memori atau pengalaman dimasa lalu.

Persepsi menurut Jalaluddin Rahmat adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[15] Sarlito W. Sarwono mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali milleu (lingkungan pergaulan) hidupnya.[16]

Mar'at mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Lebih lanjut Mar'at mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis.[17]

---

[13]Oman Sukmana, *Dasar – Dasar Psikologi Lingkungan* (Malang: UMM Pres, 2003), h. 52.

[14] Oman Sukmana, *Dasar – Dasar Psikologi Lingkungan*, h. 52-53

[15]Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* , (Cet. XVII ; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 51.

[16]Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 85.

[17]Mar'at, *Sikap Manusia; Perubahan dan Pengukurannya*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia, 1984), h. 67.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalahartikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi.

2) Pembentukan Persepsi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Proses pembentukan persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan diawali dengan adanya stimulus (rangsangan). Setelah mendapat stimulus, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan interpretasi (*interpretation)*, begitu juga berinteraksi dengan "*closure*". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.[18]

Menurut Asngari, pada fase interpretasi ini pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting. Bagaimana seseorang melakukan persepsi serta bagaimana suatu rangsangan dipersepsi banyak faktor yang mempengaruhinya. Suatu stimulus yang sama bisa dipersepsi berbeda oleh orang lain yang berbeda pula.[19]

---

[18] Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, h. 55.

[19]P.S. Asngari, *Persepsi Direktur Penyuluhan Tingkat Keresidenan dan Fungsi Lembaga Penyuluhan Pertanian di daerah Texas Amerika Serikat,* (Fakultas Pertanian: IPB, 1986), h. 12-13. Lihat pula Irwanto, *Psikologi Umum*, (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 75.

Atkinson dan Hilgard mengatakan bahwa persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks. Stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.[20] Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus dan penerjemahan aau penafsiran stimulus yang telah diorganisir dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap seseorang, sehingga orang cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

Menurut Saparinah sebagaimana dikutip Bahaking Rama bahwa ada empat karakteristik yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu; 1) faktor ciri khas dari objek stimulus, 2) faktor-faktor pribadi, 3) faktor pengaruh kelompok dan 4) faktor perbedaan latar belakang. Faktor dari objek stimulus terdiri dari (1) nilai dari stimulus (2) arti emosional orang yang bersangkutan (3) familiaritas dan (4) intensitas yang berhubungan dengan derajad kesadaran seseorang mengenai stimulus tersebut. Termasuk di dalam faktor pribadi yaitu ciri khas individu seperti taraf kecerdasan, minat, emosional dan sebagainya.[21]

Secara umum ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Jalaluddin Rahmat yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional ini juga disebut sebagai faktor personal atau perseptor, karena merupakan pengaruh-pengaruh di dalam individu yang mengadakan persepsi seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lainnya. Berarti persepsi bersifat selektif secara fungsional sehingga obyek-obyek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Termasuk

---

[20]R.C. Atkinson dan E.R. Hilgar, *Pengantar Psikologi* diterjemahkan oleh Nurjannah Taufik dan Rukmini Barhana, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 209.

[21]Bahaking Rama, *Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Lingkungan Pemukiman Masyarakat Sehat,* 'Tesis' (Ujung Pandang: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1992), h. 8-9.

dalam faktor fungsional ini adalah pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional dan latar belakang sosial budaya. Jadi yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus tetapi karakteristik orang menentukan respon atau stimulus. [22]

Faktor struktural merupakan pengaruh yang berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Prinsip yang bersifat struktural yaitu apabila seseorang mempersepsikan sesuatu, maka ia akan hanya mampu mempersepsikan sebagian dari suatu keseluruhan. Jika ia ingin memahami sutau peristiwa, ia tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah, tetapi harus mendorongnya dalam hubungan keseluruhan. Sebagai contoh dalam memahami seseorang harus melihat masalah-masalah yang dihadapinya, konteksnya maupun lingkungan sosial budayanya. Dalam mengorganisasikan sesuatu, harus dilihat konteksnya. Walaupun stimulus yang diterima tidak lengkap, seseorang akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang dipersepsi. Oleh karena manusia selalu memandang stimulus dalam konteksnya, maka ia akan mencari struktur pada rangkaian stimulus yang diperoleh dengan jalan mengelompokkan berdasarkan kedekatan atau persamaan, sehingga dari prinsip ini berarti obyek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama.[23]

Gifford dalam Ariyanti, juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. *Personal Effect*. Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual

[22]Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* , h. 57.

[23]Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* , h. 58.

masingmasing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

b. *Cultural Effect*. Giffrod memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam "melihat dunia". Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

c. *Physical Effect.* Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya.[24]

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu

[24]Elisa Ariyanti, tesis, "Pengembangan Pemanfaatan Polder Kota Lama Semarang sebagai Ruang Publik yang Rekreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat dan Pemerintah, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, (Universitas diponogoro, 2005), h. 23.

tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Oleh karna itu, persepsi yang terbentuk dari masing masing individu dapat berbeda beda.

3) Bentuk-Bentuk Persepsi

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi yang ditujukan terhadap suatu objek dan dinyatakan secara verbal, sedangkan bentuk-bentuk persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu obyek yang terjadi, kapan saja, dimana saja, jika stimulus mempengaruhinya. Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam menerima suatu stimulus kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga manusia tidak mampu memproses seluruh stimulus yang ditangkapnya. Artinya meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih suatu stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna baginya.

Dengan demikian, ada dua bentuk persepsi yaitu yang bersifat positif dan negatif. Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Sedangkan Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjuk pada keadaan dimana subjek yang mempersepsi cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.[25]

[25]Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* ,, h. 56.

B. Konsep tentang Masyarakat

1) Definisi Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Bahasan penulis dalam buku ini diarahkan ke dalam perspektif ilmu sosiologi, khususnya mengarah pada sosiologi pendidikan. Sebagaimana halnya dengan ilmu sosial lainnya, objek dari sosiologi adalah masyarakat. Sedangkan fokusnya yakni dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

Oleh karena istilah masyarakat terlalu luas dan mencakup banyak faktor, maka tidak mudah untuk memberikan suatu batasan definisi tentang masyarakat. Sehingga ketika diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, maka pada akhirnya tidak dapat memenuhi unsur-unsurnya.

Secara etimologi, masyarakat berasal dari bahasa Inggris, yaitu *society*. Dalam Kamus *Cambridge International English Dictionary,* kata *society* diartikan*;*

> *A large group of people who live together in an organized way, making decition how to do thing and sharing the work that needs to be done. All the people in the country or in several similar countries can be reffered to as society.*[26]
>
> (Sekelompok orang yang hidup secara terorganisir, membuat keputusan tentang bagaimana melakukan sesuatu dan saling berbagi tentang sesuatu apa yang mesti dilakukan. Semua orang dalam sebuah Negara atau beberapa Negara dapat diartikan sebagai masyarakat atau *society.*)

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L. Gillin dan J.P. Gillin sepakat bahwa adanya pergaulan dan saling interaksi di dalam masyarakat disebabkan oleh adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

---

[26]Paul Procter (Editor), *Cambridge International Dictionary of English,* h. 1370.

tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.[27]

Beberapa ahli yang lain juga telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*society*) seperti berikut:

Mac Iver dan Page sebagaimana dikutip Soedjono Sukanto menyatakan bahwa "Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.[28] Ralph Linton berpendapat bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.[29]

Hasan Shadily dalam bukunya *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* menyatakan bahwa: masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.[30]

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.[31]

---

[27]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 25 – 26

[28]Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* h. 25.

[29]Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* h. 26.

[30]Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia,* (Cet. XII; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 47-62

[31]Lihat Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 39.

Dari beberapa pengertian tentang masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi secara terorganisir, dan memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut, juga adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Unsur-unsur Masyarakat

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, meskipun sangat bervariasi namun pada dasarnya mempunyai kesamaan isi, yakni bahwa masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia akan timbul manusia baru. Selain itu sebagai akibat dari hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Selanjutnya, kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Jiwa masyarakat ini merupakan polusi yang berasal dari unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peranan sosial.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini manusia senantiasa mempunyai

naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, suatu misal manusia yang dikurung sendirian di dalam suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama kelamaan dia akan mati.[32]

Kemantapan unsur-unsur masyarakat mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini struktur sosial digambarkan sebagai adanya molekul dalam susunan yang membentuk zat, yang terdiri dari bermacam-macam susunan hubungan antar individu dalam masyarakat. Maka terjadi integrasi masyarakat dimana tindakan individu dikendalikan, dan hanya akan nampak bila diabstrakkan secara induksi dari kenyataan hidup masyarakat yang kongkrit.

c. Proses Terbentuknya Masyarakat

Proses terbentuknya suatu masyarakat biasanya berlangsung tanpa disadari yang diikuti oleh hampir sebagian besar anggota masyarakat. Dorongan manusia untuk bermasyarakat antara lain:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar biologis, seperti papan (tempat tinggal), sandang, dan pangan yang penyelenggaraannya akan lebih mudah dilaksanakan dengan kerja sama dari pada usaha perorangan.
2) Kemungkinan untuk bersatu dengan manusia lain (bermasyarakat).
3) Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidupnya.
4) Dengan memasyarakat kemungkinan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi kekuatan alam, binatang dan kelompok lain lebih besar.
5) Secara naluriah manusia mengembangkan keturunan melalui keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil.

[32]Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 26 – 27.

6) Manusia mempunyai kecenderungan sosial, yaitu seluruh tingkah laku yang berkembang akibat interaksi sosial atau hubungan antar manusia. Dalam hidup bermasyarakat, kebutuhan dasar kejiwaan ingin tahu, meniru, dihargai, menyatakan rasa haru dan keindahan, serta memuja tertampung dalam hubungan antar manusia, baik antar individu maupun kelompok.[33]

2) Stratifikasi Sosial

a) Pengertian Stratifikasi Sosial

Perbedaan tingkat sosio kultural suatu kelompok dan perbedaan tingkat kemajuan dan perkembangan potensi individu menyebabkan adanya kenyataan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dalam masyarakat merupakan ciri dari masyararakat yang teratur.

Menurut Pittirin A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan individu-individu atau kelompok masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, sehingga ada kelas tinggi dan ada kelas rendah. Stratifikasi sosial muncul karena adanya suatu yang lebih dihargai di satu sisi dan tidak dihargai di sisi lain, karena kepandaian, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain.[34]

b) Proses Terbentuknya Stratifikasi Sosial

Dalam suatu kelompok sosial yang paling sederhanapun kita mengenal adanya stratifikasi masyarakat. Bentuk yang paling sederhana diwujudkan dengan adanya orang-orang tertentu yang dianggap tua dan disegani dalam suatu kelompok. Stratifikasi sosial merupakan salah satu hasil interaksi antar individu dalam satu kelompok maupun antar suatu kelompok lainnya. Hal ini akan menimbulkan rasa *interdependesi* antar individu dalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakat. Seseorang

[33]Sumardi Ramon, *Sosiologi dan Antropologi,* (Surabaya : Sinar Wijaya, 1985), h. 189-190.

[34]D. Jupriyono, *Sosiologi,* (Malang, YA3, 1995), h. 1.

yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu yang mampu diaktualisasikan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat akan menempatkan individu tersebut pada posisi tertentu. Demikian pula dengan orang yang berasal dari keturunan tertentu, usia tertentu, tingkat perekonomian tertentu dan sebagainya.[35]

Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu stratifikasi sosial pada prinsipnya ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri yang disusun berdasarkan evaluasi moral dengan menggunakan tata nilai dan norma secara objektif oleh masyarakat pendukung suatu kebudayaan tertentu.[36]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terjadinya proses stratifikasi sosial melalui dua cara, yaitu tanpa direncanakan atau diperjuangkan seperti jenis kelamin dan tingkat kecerdasan, dan direncanakan atau diperjuangkan seperti pangkat dan jabatan.[37]

Proses terjadinya stratifikasi sosial cenderung mengikuti pola atau sistem yang ada pada masyarakat tersebut. Pada masyarakat tertutup, stratifikasi sosial akan sangat dibatasi oleh kemungkinan pindahnya kelompok individu ke status lain secara vertikal. Sedangkan pada masyarakat terbuka stratifikasi sosial memberikan kesempatan kepada setiap kelompok apapun untuk berjuang meraih stratifikasi yang lebih tinggi.[38]

Berdasarkan beberapa pandangan yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dirasakan dalam kenyataan struktural sebagai berikut:

1) Masyarakat terbagi dalam kelompok dan sosial yang memiliki strata tertentu.

[35]Lalu Agus Faturrahman, *Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat,* Ilmu Sosial Dasar ed. Josef Riwu Koho (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), h. 145-146.

[36]Lalu Agus Faturrahman, *Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat,* h. 147.

[37] D. Jupriyono, *Sosiologi,* h. 1.

[38] Lalu Agus Faturrahman, *Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat,* h. 2.

2) Strata itu terbentuk berdasarkan latar belakang kemajuan kebudayaan yang diaktualisasikan dalam bentuk kualitas individu dan kelompok.
3) Karena adanya strata itu maka lahirlah kelompok-kelompok yang dipandang sebagai kelompok "inperior" dan kelompok "superior" berdasarkan suatu sistem aktual kedudukan dalam kerangka evaluasi moral.
4) Adanya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh kelompok superior sangat jelas dalam suatu sistem sosial, yang diikuti dengan adanya lembaga-lembaga sosial dan birokrasi.[39]

3) Keanekaragaman Masyarakat

a) Pengertian Keanekaragaman Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu tempat terjadinya interaksi sosial antar individu dengan individu. Individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lainnya yang membentuk suatu masyarakat yang lebih luas dan komplek keberagaman masyarakat tercipta karena adanya perbedaan suku bangsa atau etnik, keanekaragaman ras, keanekaragaman agama, perbedaan jenis kelamin dan keanekaragaman profesi.

Keanekaragaman masyarakat adalah merupakan suatu keragaman dalam berbagai aktifitas sosial di masyarakat dalam bidang agama, jenis kelamin, profesi, etnis, suku yang tidak mempersoalkan tinggi dan rendahnya yang berkuasa dan yang dikuasai, dan lain-lain.[40]

Berdasarkan pengertian di atas, keanekaragaman masyarakat sesugguhnya merupakan keniscayaan yang terjadi. Keragaman secara implicit mengandung pengertian kesetaraan, kesejajaran dan tidak ada pembeda-bedaan.

---

[39] Lalu Agus Faturrahman, *Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat,* h. 143.

[40] D. Jupriyono, *Sosiologi,* h. 10.

b) Bentuk Keanekaragaman Masyarakat

Adapun bentuk-bentuk keanekaragaman masyarakat dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Suku Bangsa

   Adanya suku bangsa terutama ditentukan oleh kesadaran kelompok dan pengakuan akan kesatuan kebudayaan dan persamaan asal usul.[41] Sedangkan Antropologi N. Narol menentukan kriteria suku bangsa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang dibatasi satu kawasan tertentu, memiliki satu logat bahasa, dibatasi secara politis administratif, batasannya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri ditentukan oleh kesatuan, ekologis, mengalami sejarah yang sama.[42]

2. Keanekaragaman Ras

   Sebagai kelompok individu yang mempunyai ciri biologis yang berbeda dari kelompok lain, ras-ras banyak macamnya. Setiap ras menempati kawasan tertentu. Ada ras kaokasoid, mengoloid, negroid dan lain sebagainya. Kemurnian ras sulit bertahan sebab percampuran antar ras semakin intensif dan tidak ada ras yang mampu mengisolasi diri dari ras lain.[43]

3. Keanekaragaman Agama

   Keanekaragaman agama dikarenakan adanya perbedaan cara penerimaan wahyu pada manusia satu sama lain. Hampir disemua negara ada lebih dari satu agama yang dipeluk. Antar pemeluk agama mempunyai ciri khas adat dan ritus yang berbeda-beda. Perbedaan ini tidak memicu perpecahan asal saja ada sikap toleran antar pemeluk.[44]

4. Keanekaragaman Jenis Kelamin

---

[41] Sumardi Ramon, *Sosiologi dan Antropologi*, h. 209.

[42] D. Jupriyono, *Sosiologi*, h. 11.

[43]D. Jupriyono, *Sosiologi*, h. 11.

[44]Sumardi Ramon. *Sosiologi dan Antropologi*, h. 213.

Perbedaan jenis kelamin ternyata membawa perbedaan nasib, keberuntungan, hak dan kewajiban tertentu, sekalipun digembor-gemborkan persamaan derajat, emansipasi, kemitraan lelaki dan perempuan, sebenarnya hal itu perlu dipertanyakan. Sosiolog Arief Bodiman, mempopulerkan istilah pembagian kerja secara seksual *(the sexual divisionof labour).* Istilah ini tak sekedar menggambarkan perbedaan jenis pekerjaan, tetapi secara implisit juga menunjukkan bahwa perempuan adalah pihak yang “terkalahkan”, terkuasai, terdominasi oleh struktur masyarakat yang dikuasai lelaki, selama berabad-abad, sampai-sampai perempuanlah merasa kalau didominasi. Bahkan mereka menerima hal itu sebagai sesuatu hal yang wajar.[45]

5. Keanekaragaman Sosial Profesi

   Di masyarakat tradisional jenis pekerjaan homogen, kebanyakan petani. Sebaliknya, di masyarakat modern jenis pekerjaan (profesi) masih beragam, sebab tingkat dan jenis kemampuan serta pendidikan individu jauh lebih beragam ketimbang masyarakat tradisional.[46]

4) Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.[47]

---

[45]Sumardi Ramon. *Sosiologi dan Antropologi,* h. 11.

[46]Sumardi Ramon. *Sosiologi dan Antropologi,* h. 11.

[47]Sumaryo, *Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam pemberdayaan masyarakat,* (1991), h. 12

Ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi atau kreativitas, mudah pasrah atau menyerah atau putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.[48]

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari power atau daya (mengandung pengertian "kemampuan", "kekuatan" ataupun "kekuasaan") serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (*interlinking factors*), seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan, dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antarindividu, dengan dikotomi subjek (penguasa) dan objek yang dikuasai meliputi kaya-miskin, laki-lakiperempuan, guru-murid, pemerintah-warganya, serta antaragen pembangunan dan si miskin.

Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut merupakan relasi yang ingin "diperbaiki" melalui proses pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau breakdown dari hubungan atau relasi antara subjek dengan objek. Proses ini mementingkan adanya "pengakuan" subjek akan "kemampuan" atau "daya" (power) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalir daya (*flow of power*) dari subjek ke objek dengan memberi kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada. Pada akhirnya, "pengakuan" oleh subjek terhadap kemampuan individu miskin untuk dapat

[48] Hikmat, *Strategi pemberdayaan masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), h. 12

mewujudkan harapannya merupakan bukti bahwa individu tersebut mempunyai daya. [49]

Mengalirnya daya ini dapat berwujud suatu upaya dari objek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki subjek. Dalam pengertian yang lebih luas, mengalirnya daya ini merupakan upaya atau cita-cita untuk mengintegrasikan masyarakat miskin ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas.

Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru) sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya dicirikan dengan relasi antarsubjek dengan subjek yang lain. Dengan kata lain, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subjek-objek menjadi subjek-subjek. Hal ini merupakan prasyarat krusial dalam mewujudkan makna pemberdayaan masyara-kat secara utuh. Hubungan yang timpang atau yang menghalalkan bentuk hubungan yang subordinat atau asimetris cenderung mengabadikan penindasan dan kemiskinan. Peralihan fungsi objek menjadi subjek baru merupakan tantangan dalam segala macam implementasi kebijakan. Masih banyak ditemukan kebijakan dengan dalih pemberdayaan dan membantu yang miskin tetapi masih menempatkan objek pada posisinya semula. Artinya, ia tetap sebagai pihak yang “dikontrol dan dikuasai” oleh subjek. Seringkali, mengalirnya daya untuk mengalihfungsikan individu miskin yang semula objek menjadi subjek ini tidak dapat terwujud dengan baik. Kondisi tersebut dapat memunculkan *countervailing power* dari objek yang dipakai untuk “menantang” daya (power) yang sudah mapan. Objek biasanya akan dibantu oleh pihak luar yang berkepentingan sama, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Proses tersebut juga berkaitan dengan penciptaan aset, yaitu menciptakan suatu dasar ekonomi minimum untuk kelompok yang selama ini tersingkir. Asumsinya dengan peningkatan taraf hidup

---

[49]Sumaryo, *Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam pemberdayaan masyarakat,*

melalui penciptaan aset tersebut, lapisan miskin akan memiliki *means to intervene* yang lebih kuat di dalam proses pembangunan.

Untuk merangsang lahirnya gerakan masyarakat yang bermula pada komunitas lokal, ada sejumlah syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Tiga syarat terpenting adalah sebagai berikut.

1. Restrukturisasi kelembagaan komunitas. Tatanan dasar yang mengatur kehidupan komunitas perlu direorientasi dari pola feodalistis dan kolonial (pemerintahan yang kuat dan paternalistik) ke pola pemerintahan yang lebih profesional dan masyarakat yang dinamis. Tatanan baru perlu menjamin kebebasan masyarakat berekspresi dan mengembangkan inisiatif lokal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasinya. Masyarakat harus menjadi subjek dan penentu utama dari segala kegiatan pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.
2. Meninjau kembali segala kebijakan yang memperlemah kebudayaan masyarakat dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih memihak pada upaya peningkatan keberdayaan masyarakat desa untuk memperbaiki nasib sendiri.
3. Pada aras program, pendekatan top-down harus segera diganti pendekatan bottom up, tercermin dari mekanisme pengambilan keputusan dan penyelenggaraan program. Istilah program pengembangan masyarakat seharusnya tidak lagi berkonotasi program masuk desa melainkan program dari desa. Artinya, dalam segala kegiatan pembangunan desa masyarakat desa itulah yang menjadi subjek dan pelaku utama. Mulai dari penjajakan masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pegawasan, evaluasi, sampai pemanfaatan hasil-hasilnya. Dalam

keadaan demikian, masyarakat akan menerima kegagalan maupun keberhasilan program secara bertanggung jawab.[50]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka dengan mengupayakan berbagai potensi yang dimilikinya. Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Dalam prosesnya perlu diperhatikan bahwa perempuan akan terlibat secara aktif. Proses pemberdayaan masyarakat didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pemberdayaan masyarakat sebaiknya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peran utama tim pemberdayaan masyarakat adalah mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan. Peran tim pemberdayaan masyarakat pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1) Tahap pertama seleksi lokasi Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait, dan masyarakat. Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan

[50] http://media.neliti.com/media/publications/259547-strategi-pemberdayaan-masyarakat-melalui 81914389.pdf. diakses pada tanggal 5 Juli 2021.

tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan dengan sangat baik.

2) Tahap kedua sosialisasi pemberdayaan masyarakat Sosialisasi pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat pada masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian pada masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.
3) Tahap ketiga proses pemberdayaan masyarakat Tahap ini terdiri dari kegiatan:
   a. kajian keadaan pedesaan partisipatif,
   b. pengembangan kelompok,
   c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta
   d. monitoring dan evaluasi partisipatif.

Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum). Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama;

a. mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluangnya;
b. menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian;
c. menerapkan rencana kegiatan kelompok; dan
d. memantau proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus

Dalam semua kegiatan, sering dimanfaatkan teknik dan alat visualisasi yang mendukung diskusi antara masyarakat dan memudahkan proses pemberdayaan. Diharapkan bahwa melalui teknik-teknik tersebut, proses kajian, penyusunan rencana kegiatan, penerapan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara sistematis. Teknik-teknik kajian sering disebut *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Monitoring dan evaluasi merupakan suatu tahap

yang sangat penting dan bermaksud untuk memperbaiki proses secara terus menerus agar tujuan dapat tercapai. Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi proses, pencapaian, dan dampak proses pemberdayaan.

4) Tahap keempat pemandirian masyarakat Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Artinya, bahwa peran tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim pemberdayaan kelompok sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak tentu. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang akan berjalan terus menerus. Seringkali kegiatan memerlukan waktu dan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.[51]

C. Konsep tentang Madrasah

1) Asal Usul Kata 'Madrasah'

Kata *"madrasah"* dalam bahasa Arab adalah bentuk kata "keterangan tempat" (*zharaf makan*) dari akar kata "*darasa*". Secara harfiah "*madrasah*" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran".[52] Dari akar kata "*darasa*" juga bisa diturunkan kata "*midras*" yang mempunyai arti "buku yang dipelajari" atau "tempat belajar"; kata "*al-midras*" juga diartikan sebagai "rumah untuk mempelajari kitab Taurat".[53]

---

[51] https://media.neliti.com/media/publications/259547-strategi-pemberdayaan-masyarakat-melalui 81914389.pdf. diakses pada tanggal 5 Juli 2021.

[52] Abu Luwis al-Yasu'i, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al- A'lam,* (Cet.-23, Beirut: Dar al-Masyriq, tt,), h. 221.

[53] Lihat Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam,* Edisi Indonesia (Surabaya: Risalah Gusti: 1996), h. 66.

Kata "*madrasah*" juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu "*darasa"*, yang berarti "membaca dan belajar" atau "tempat duduk untuk belajar". Dari *kedua* bahasa tersebut, kata "*madrasah*" mempunyai arti yang sama: "tempat belajar".[54] Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata "*madrasah*" memiliki arti "sekolah" kendati pada mulanya kata "sekolah" itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.[55]

Sungguhpun secara teknis, yakni dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, *madrasah* tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia *madrasah* tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "sekolah agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran *hal-ihwal* atau seluk-beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam).[56]

Dalam prakteknya memang ada *madrasah* yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-diniyyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada *madrasah* yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut *madrasah diniyyah*. Kenyataan bahwa kata "*madrasah*" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "*madrasah*" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan".

Para ahli sejarah pendidikan seperti A. L. Tibawi dan Mehdi Nakosteen, mengatakan bahwa *madrasah* (bahasa Arab) merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia Islam (klasik)

---

[54]Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, h. 222.

[55]A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998), h. Ill.

[56]A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* , h. 112.

pra-modern.[57] Artinya, secara istilah *madrasah* di masa klasik Islam tidak sama terminologinya dengan *madrasah* dalam pengertian bahasa Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam menulis kata tersebut secara bervariasi misalnya, *schule* atau *hochschule* (Jerman), *school, college* atau *academy* (Inggris).[58] Nakosteen menerjemahkan *madrasah* dengan kata *university* (universitas).[59] Ia juga menjelaskan bahwa *madrasah-madrasah* di masa klasik Islam itu didirikan oleh para penguasa Islam ketika itu untuk membebaskan masjid dari beban-beban pendidikan sekuler-sektarian. Sebab sebelum ada *madrasah*, masjid ketika itu memang telah digunakan sebagai lembaga pendidikan umum. Tujuan pendidikan menghendaki adanya aktivitas sehingga menimbulkan hiruk-pikuk, sementara beribadah di dalam masjid menghendaki ketenangan dan kekhusukan. Itulah sebabnya, menurut Nakosteen, pertentangan antara tujuan pendidikan dan tujuan agama di dalam masjid hampir-hampir tidak dapat diperoleh titik temu. Maka dicarilah lembaga pendidikan alternatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum, dengan tetap berpijak pada motif keagamaan.

George Makdisi berpendapat bahwa terjemahan kata "*madrasah*" dapat disimpulkan dengan tiga perbedaan mendasar yaitu: *Pertama*, kata universitas, dalam pengertiannya yang paling awal, merujuk pada komunitas atau sekelompok sarjana dan mahasiswa, *Kedua*; merujuk pada sebuah bangunan tempat kegiatan pendidikan setelah pendidikan dasar (pendidikan tinggi) berlangsung. *Ketiga*; izin mengajar (*ijazah al-tadris, licentia*

---

[57]A.L. Tibawi "*Origin and Character of Al-Madrasah*", *Bulletin of The School of Oriental and African Studies* 25 (1962): h. 227.

[58]A.L. Tibawi, *Origin and Character of Al-Madrasah*", *Bulletin of The School of Oriental and African Studies*, h. 228.

[59]Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam,*, h. 54; lihat pula Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam, Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan Islam*, yang memaparkan pikiran AL-Tibawi dan Nakosteen tentang Madrasah.

docendi) pada *madrasah* diberikan oleh *syaikh* secara personal tanpa kaitan apa-apa dengan pemerintahan.[60]

Erat kaitannya dengan penggunaan istilah *"'madrasah"* yang menunjuk pada lembaga pendidikan, dalam perkembangannya kemudian istilah *"madrasah"* juga mempunyai beberapa pengertian di antaranya: aliran, mazhab, kelompok atau golongan filosof dan ahli pikir atau penyelidik tertentu pada metode dan pemikiran yang sama.[61]

Munculnya pengertian ini seiring dengan perkembangan *madrasah* sebagai lembaga pendidikan yang di antaranya menjadi lembaga yang menganut dan mengembangkan pandangan atau aliran dan mazdhab pemikiran *(school of thought)* tertentu. Pandangan-pandangan atau aliran-aliran itu sendiri timbul sebagai akibat perkembangan ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan ke berbagai bidang yang saling mengambil pengaruh di kalangan umat Islam, sehingga mereka berusaha untuk mengembangkan aliran atau mazhabnya masing-masing, khususnya pada periode Islam klasik. Terbentuklah *madrasah-madrasah* dalam pengertian kelompok pemikiran, mazhab, atau aliran tersebut. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar *madrasah* yang didirikan pada masa klasik itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang terkenal, misalnya *madrasah* Safi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah.[62]

Di Indonesia, penamaan lembaga pendidikan dewasa ini pada umumnya merupakan pinjaman dari bahasa Barat, seperti universitas (dari *university*), sekolah (dari *school*), akademi (dari *academy*), dan lain-lain. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan *madrasah*. Penerjemahan kata *madrasah* ke dalam bahasa Indonesia dengan mengaitkan pada bahasa Barat dianggap tidak tepat. Di Indonesia, *madrasah* tetap dipakai dengan kata aslinya,

[60]George Makdisi, "*Madrasah And The University In the Middle Ages*", Studia Islamica 32 (1970): 257-262.

[61]Tim Depag, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (IJKL. MNO, 1993), h. 661.

[62]Tim Depag, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, h.661.

madrasah, kendatipun pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang dipahami pada masa klasik, yaitu lembaga pendidikan tinggi, karena bergeser menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Pergeseran makna dari lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah itu, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Timur Tengah sendiri.

Sejauh ini tampaknya belum ada data yang pasti kapan istilah *madrasah*, yang mempunyai pengertian sebagai lembaga pendidikan, mulai digunakan di Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam pun pada umumnya lebih tertarik membicarakan sistem pendidikan atau pengajaran tradisional Islam yang digunakan baik di masjid, surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), dan lain-lain, daripada membicarakan *madrasah*. Dalam beberapa hal, penyebutan istilah *madrasah* di Indonesia juga seringkali menimbulkan konotasi "ketidakaslian", dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid, dayah (Aceh), surau (Minangkabau), atau pesantren (Jawa), yang dianggap asli Indonesia.

Berkembangnya *madrasah* di Indonesia di awal abad ke-20 M ini, memang merupakan wujud dari upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan para cendikiawan Muslim Indonesia, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam "asli" (tradisional) tersebut dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di samping itu, kedekatan sistem belajar-mengajar ala *madrasah* dengan sistem belajar-mengajar ala sekolah yang, ketika madarash mulai bermunculan, memang sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, membuat banyak orang berpandangan bahwa *madrasah* sebenarnya merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan dan corak keIslaman.[63]

---

[63]Penjelasan lebih jauh mengenai ini, lihat, Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999), h. 81-81.

Pandangan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, baik pada gelombang pertama (abad ke-7 M) maupun gelombang ke-2 (abad ke-13) tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya *madrasah*. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*).[64]

Karena itu membicarakan *madrasah* di Indonesia dalam kaitannya dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren sebagai cikal-bakalnya. Dengan kata lain, *madrasah* merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren.

2) Perkembangan Madrasah di Indonesia

a. Madrasah pada Masa Orde Lama

Pada masa pemerintah kolonial Belanda Madrasah memulai proses pertumbuhannya atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam. Pertumbuhan Madrasah sekaligus menunjukkan adanya pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata bersifat defensif, terhadap pendidikan Hindia Belanda kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Dalam banyak kasus sering terjadi guru-guru agama dipersalahkan ketika menghadapi gerakan kristenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan.[65]

---

[64]Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3.

[65]Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 114 – 115.

Madrasah pada masa Hindia Belanda mulai tumbuh meskipun memperoleh pengakuan yang setengah-setengah dari pemerintah Belanda. Tetapi pada umumnya madrasah-madrasah itu, baik di Minangkabau, Jawa dan Kalimantan, berdiri semata-mata karena kreasi tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan dan legitimasi dari pemerintah.[66]

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendidikan Jepang di Indonesia.[67]

Perkembangan Madrasah pada masa orde lama sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang resmi berdiri pada tanggal 13 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu orientasi Departemen Agama ketika itu dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan diberbagai sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama meliputi: *pertama,* memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan swasta, *kedua,* memberikan pengetahuan umum di madrasah, dan *ketiga,* mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).[68]

Dengan adanya tugas-tugas tersebut di atas, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam

---

[66]Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* h. 117.

[67]Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* h. 118.

[68]Ainunrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Cet. I; Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004), h. 43.

memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, DepartmenAgama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin sebagai penentu kebijakan.

Salah satu gambaran yang cukup menonjol dari perkembangan madrasah pada masa orde lama adalah dengan didirikan dan dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kedua model madrasah ini menandai perkembangan yang sangat signifikan dengan maksud untuk mencetak tenaga professional di bidang keagamaan, terutama PGA yang nantinya akan menghsilkan guru-guru agama yang secara praktis menjadi motor penggerak bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah sehingga dikatakan bahwa lembaga tersebut dapat menjamin perkembangan madrasah di Indonesia.[69]

Meskipun hasilnya belum maksimal, namun perkembangan madrasah pada masa orde lama memberikan sumbangan yang cukup penting bagi perkembangan madrasah pada masa berikutnya. Jumlah PGA pada tahun 1951 mencapai 25 buah dan pada tahun 1954 mencapai 30 buah. Pada pertengahan dekade 60-an, madrasah tersebar ke berbagia daerah hamper di seluruh provinsi di Indonesia. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah Tingkat Rendah pada masa itu sudah mencapai 13.057. Untuk tingkat Pertama (Tsanawiyah) mencapai 776 buah dengan jumlah murid sebanyak 87.932 orang. Sedangkan Madrasah Tingkat Atas (Aliyah), terdapat 16 madrasah dengan jumlah murid sebanyak 1881 orang.[70]

Perkembangan selanjutnya, Kementerian Agama menyeragamkan nama, jenis dan tingkatan madrasah

---

[69]Ainunrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren,* h. 43.

[70]Ainunrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren,* h. 43.

sebagaimana yang ada sekarang. Madrasah ini terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagaimana pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Kedua, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama Islam murni yang disebut dengan Madrasah Diniyah.

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama. Dan dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah bukan mata pelajaran wajib dan bergantung pada persetujuan orang tua siswa. Dengan rekomendasi ini, madrasah tetap berada di luar sistem pendidikan nasional, tetapi sudah merupakan langkah pengakuan akan eksistensi madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.[71]

b. Madrasah pada Masa Orde Baru

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, beberapa kebijakan mengenai madarasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari system pendidikan nasional, hanya sebagai lembaga pendidikan otonon di bawah pengawasan Menteri Agama. Menurut Maksum bahwa hal ini lebih disebabkan adanya kenyataan bahwa system pendidikan madrasah lebih didominasi leh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.[72]

Menghadapi kenyataan seperti ini, langkah pertama dalam melakukan pembaharuan pendidikan madrasah adalah melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi

---

[71]Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, h. 130 – 131. Lihat pula Abd. Rahman Halim*, Kebijakan dan Partisipasi..*, h. 54.

[72]Ainurrofiq, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren,* h. 48.

ditempuh dengan cara menegerikan sejumlah madrasah dengan keriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, di samping mendirikan madrasah negeri yang baru. Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (ketika itu).

Pada tahap berikutnya, pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam pendidikan nasional. Pada saat H.A. Mukhti Ali menjabat sebagai Menteri Agama dikeluarkanlah Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/4 1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum, ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama.[73]

Pemerintah orde baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, penegasan *definitif* tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.[74]

---

[73]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 109.

[74]Ainurrofiq, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, h. 48-49. Lihat pula Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, 130 – 131.

Pada masa orde baru ini madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 (jenjang) pendidikan yang secara berturut-turut sebagai berikut:

3) Raudatul Atfal (Bustanul Atfal). Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal terdiri dari 3 tingkat:
   a) Tingkat A untuk anak umur 3-4 tahun
   b) Tingkat B untuk anak umur 4-5 tahun
   c) Tingkat C untuk anak umur 5-6 tahun
2) Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.
3) Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.
4) Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah keatas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam. Sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Dewasa ini Madrasah Aliyah memiliki jurusan-jurusan: Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya.
5) Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan dan pelajaran agama Islam, yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah ini terdiri 3 tingkat:

a) Madrasah Diniyah Awaliyah ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan kelas 4 dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dan seminggu.
b) Madrasah Diniyah Wusta ialah Madrasah Diniyah tingkat pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas I sampai kelas II dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.
c) Madrasah Diniyah Ula ialah Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 tahun dari kelas I sampai kelas II dengan jumlah jam pelajaran 18 jam pelajaran dalam seminggu.[75]

Bagaimanapun perkembangan kebijakan terhadap madrasah tidak bisa diisolasikan dari politik orde baru terhadap agama Islam. Dapat dipastikan bahwa tingkat apresiasi pemerintah terhadap madrasah mencerminkan tingkat dan pola hubungan Negara dan agama Islam. Dalam hubungan Negara dan agama Islam bersifat integratif, kebijakan Orde Baru terhadap madrasah tampak sangat positif dengan menempatkan madrasah secara konsisten dalam system pendidikan nasional. Namun sebaliknya, ketika dalam situasi hubungan Negara dan agama Islam menagarah pada konflik, perkembnagan madrasah cenderung terbatasi, bahkan dapat terancam eksistensinya.

c. Madrasah pada Era Reformasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan madrasah di Indonesia merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional telah mendapatkan pengakuan secara penuh setelah ditetapkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 yang kemudian disempurnakan dengan UUSPN nomor 20 tahun 2003. Dalam kaitan ini, madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulumnya sama

[75]Abd. Rahman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi,* h. 31-33.

persis dengan sekolah, plus pelajaran agama Islam sebanyak 5 mata pelajaran, yaitu; al-Qur'an Hadis, Akidah Ahlaq, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Dengan menerapkan kurikulum yang sama dengan kurikulum pendidikan nasional, maka isi pendidikan madrasah tidak lagi memiliki perbedaan yang subtantif dengan sekolah.[76]

Adanya pengakuan seperti ini di satu sisi dianggap cukup positif, namun pada saat yang bersamaan juga memiliki kelemahan, sebab dengan adanya keharusan untuk menerapkan kurikulum persis sama dengan sekolah plus pelajaran agama secara otomatis akan mempengaruhi dan memberikan beban yang cukup berat bagi madrasah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa beban kurikulum bagi madrasah yang menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak dan lebih berat dibanding dengan beban belajar anak sekolah. [77]

Setelah mendapatkan pengakuan sebagaimana digambarkan di atas, semestinya pada tataran operasionalnya, antara sekolah dan madrasah sama-sama mendapatkan perlakukan yang yang sama dari berbagai aspek pelayanan, termasuk dalam hal fasilitas atau pendanaan. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan tidaklah seperti itu adanya, bahkan sampai saat ini masih saja ditemukan anggapan bahwa madrasah mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Padahal untuk mendapatkan pengakuan seperti itu bukanlah diperoleh secara cuma-cuma, tanpa ada upaya perjuangan yang dilewatinya. Perjuangan agar mendapat perlakuan yang sama dalam arti integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional secara penuh menurut Husni Rahim, baru dicapai setelah ditetapkannya UUSPN No. 2 Tahun 1989., yang kemudian diperkuat dengan adanya UU Sisdiknas nomor 20 tahun

---

[76]Asyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2002), h. 96.

[77]Marwan Sarijo (Penyunting), *Mereka Bicara Pendidikan Islam; Sebuah Bunga Rampai*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. xxix

2003 dimana madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah, plus pelajaran agama Islam.

Secara operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dikuatkan dengan PP No. 28 tahun 1990 dan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993 yang menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang kurangnya sama dengan "SD/SMP". Surat-surat Keputusan tersebut ditindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sementara tentang Madrasah Aliyah (MA) diperkuat dengan PP Nomor 29 tahun 1990, SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0489/U/ 1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam) dan SK Menag Nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islamnya.

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dengan demikian bukan merupakan integrasi dalam arti penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah oleh Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Kementerian Agama.

Meskipun posisi madrasah terhadap sekolah sudah mendapat pengakuan secara penuh dengan lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, namun disisi lain dianggap memperlemah posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama yang fokus utamanya adalah agama dan pengetahuan umum sebagai tambahan. Kebijakan ini juga yang dianggap memperlemah munculnya kader-kader ulama. Alasan ini pula yang menjadi dasar pertimbangan mantan Menteri Agama Munawir Sjadzali (1983-1993) mendirikan MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) dan kemudian dijadikan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (setelah UU No. 2 Tahun 1989) yang komposisi kurikulum 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran

umum plus pengajaran bahasa (Arab dan Inggris) secara intensif. Dengan program ini diharapkan input IAIN ketika itu secara kualitatif dapat ditingkatkan, dan yang penting lagi menjadi *support* bagi kemunculan calon calon ulama. Karena komposisi agamanya tetap lebih besar dari umum, maka lulusannya lebih banyak diterima di perguruan tinggi agama, khususnya di Timur Tengah.[78]

Dilihat dari sisi ini, kehadiran MAPK sesungguhnya adalah bentuk respon positif progresif madrasah terhadap tantangan yang dihadapi. Namun dalam kenyataannya kehadiran MAPK masih ditumpangkan menjadi bagian atau program dari MA (karena politis menurut UU no.2 tahun 1989 belum memberi tempat pengakuan untuk yang jenis ini, karena jenjang dasar dan menengah pertamanya tidak diakui/ tidak dimungkinkan oleh undang-undang tersebut. Demikian juga madrasah dan pesantren yang hanya semata-mata memberikan pelajaran agama tidak juga terakomodasi dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ini (UU SPN No. 20 Th 2003). Tentu hal ini masih dirasakan sebagai bentuk diskriminasi dalam pendidikan. Padahal masyarakat menghendaki madrasah tetap memberi peluang yang sama antara madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dengan madrasah sebagai sekolah agama yang berwawasan Indonesia dan kemodernan ataupun madrasah yang semata-mata memberikan pelajaran agama.[79]

Dengan demikian, madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional seperti tampak pada bagan berikut ini:

[78]Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri; Wajah Baru Pendidikan Islam,* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2009), h. xvii

[79]Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri; Wajah Baru Pendidikan Islam,* h. xviii. Lihat pula Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2 tahun 1989,* (Jakarta: INIS, 2004), h. 179
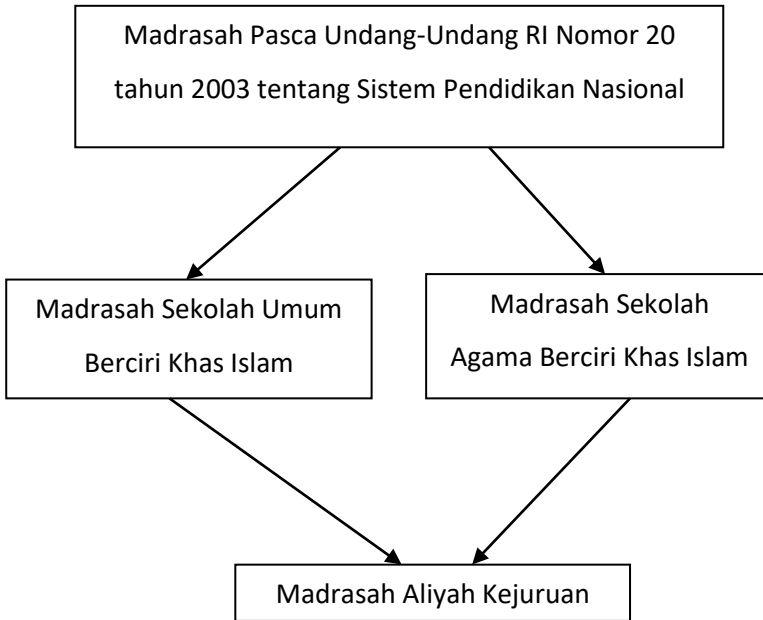
Bagan 1. Madrasah menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bagan tersebut menunjukkan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, karena itu murid atau alumni madrasah dapat pindah dan melanjutkan pendidikan baik secara vertikal, maupun secara horizontal dan diagonal. Akan tetapi, pendidikan keagamaan di luar madrasah dan sekolah Islam masih dianggap di luar sistem sehingga sampai sekarang kedua model lembaga pendidikan ini belum mendapatkan pengakuan sebagaimana laiknya madrasah.

Seperti digambarkan sebelumnya bahwa pemerintah telah banyak mengeluarkan banyak kebijakan dan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatan mutu madrasah. Dengan lahirnya UUSPN No. 20 Tahun 2003, kedudukan madrasah menjadi bertambah kuat dengan member peluang yang sama kepada madrasah sebagai Sekolah Umum Berciri Khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak terjadi

anggapan diskriminatif di mata pemerintah. Madrasah sebagai sub pendidikan dalam sistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi, antara lain menjadi keharusan pola pembinaan madrasah mengikuti satu ukuran yang mengacu kepada sekolah pemerintah, artinya madrasah mengikuti kurikulum nasional, ikut serta dalam Ujian Nasional dan berbagai peraturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal tersebut merupakan momen keberuntungan bagi madrasah secara keseluruhan. Walaupun di satu sisi, madrasah dengan segala keterbatasannya harus memacu diri untuk meraih simpatik masyarakat dan mensejajarkan diri sama dengan sekolah umum.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu madrasah antara lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti *Asian Development Bank* (ADB), dalam bentuk *basic education Project (BEP),* dan *Development Madrasah Aliyah Project* (DMAP). Dengan kerjasama tersebut, lahirlah *Madrasah Model* di beberapa provinsi untuk dijadikan madrasah percontohan, baik pada level Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah.[80]

Persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam secara yuridis formal sudah terselesaikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui sama dengan sekolah. Begitupula dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan mutu madrasah. Namun demikian, tidak seluruh persoalan yang dihadapi dunia madrasah dewasa ini juga terselesaikan. Sebab dalam kenyataannya, dengan adanya perubahan status pada lembaga pendidikan madrasah begitupula dalam hal operasionalisasi penyelenggaraan kurikulum di madrasah semakin membuktikan betapa lemahnya dan rendahnya kualitas *output* madrasah pada aspek pengetahuan dan pemahaman dasar keagamaan, meskipun telah

[80]Abd. Rahman Halim, *Paradigma Baru Sistem Pembinaan Madrasah* (Cet. I; Makassar: Fatiya, 2008), h. 13.

dibekali dengan berbagai muatan kurikulum atau pelajaran agama.

Dari segi kuantitas boleh jadi madrasah tumbuh dengan pesat, namun sangat lamban dari segi kualitasnya. Keterikatan masyarakat terhadap madrasah lebih tampak sebagai ikatan emosional dibanding ikatan rasional. Ikatan ini muncul diakibatkan bertemuanya dua kepentingan. *Pertama,* hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperan serta dalam pendidikan. *Kedua,* motivasi keagamaan. Kuatnya ikatan emosional masyarakat ini menyebabkan madrasah ini lebih *massif,* populis dan mencerminkan suatu gerakan masyarakat bawah, sehingga madrasah lebih banyak terdapat di pedesaan atau di daerah pinggiran dan lebih dimotivasi secara *intrinsic* bahwa belajar dianggap sebagai sebuah kewajiban.[81]

Keterikatan emosional di satu sisi sesungguhnya merupakan potensi dan kekuatan besar madrasah karena rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang ditanamkan sangat tinggi. Akan tetapi di sisi lain akan menjadi kendala karena sebagian masyarakat merasa sebagai pendiri dan pemiliki madrasah sejak awal sehingga tidak dengan mudah menerima ide-ide reformasi yang digagas oleh pemerintah.

Era globalisasi dewasa ini dan dimasa datang sedang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat muslim Indonesia umumnya, atau pendidikan Islam, termasuk pesantren dan Madrasah khususnya. Argumen panjang lebar tak perlu dikemukakan lagi, bahwa masyarakat muslim tidak bisa menghindari diri dari proses globalisasi tersebut, apalagi jika ingin *survive* dan berjaya ditengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad 21.[82]

Globalisasi yang berlangsung dan melanda masyarakat muslim Indonesia sekarang ini menampilkan sumber dan watak

---

[81]Ainurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren,* h. 50.

[82]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru,* h. 43.

yang berbeda. Proses globalisasi dewasa ini tidak bersumber dari Timur Tengah, melainkan dari barat, yang terus memegang supremasi dan hegemoni dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat dunia umumnya. Dominasi dan hegemoni politik barat dalam segi-segi tertentu mungkin saja telah "merosot", khususnya sejak terakhirnya perang dunia kedua, dan "perang dingin". Belum lama ini, tetapi hegemoni-ekonomi dan sains-teknologi barat tetap belum tergoyahkan. Meski muncul beberapa kekuatan ekonomi baru, seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi "kultur" hegemoni ekonomi dan sains teknologinya tetap sarat dengan nilai-nilai Barat.[83]

Melihat begitu derasnya pengaruh barat yang mengarah pada hegemoni terhadap masyarakat muslim dalam segala aspek kehidupannya, maka madrasah harus segera berbenah diri. Madrasah sebagai institusi pendidikan yang tetap berpijak pada usaha transformasi nilai-nilai Islam harus dapat menampilkan perannya sebagai *counter* terhadap imperialisme kultural (*cultur imperialism*) yang sedang gencar-gencarnya menyerbu dunia Timur (masyarakat muslim) khususnya di Indonesia.

3) Karakteristik *Madrasah* di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan, secara harfiah *madrasah* bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis *kedua*nya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara formal. Namun demikian Karel A. Steenbrink membedakan *madrasah* dan sekolah karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda.[84]

Madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah,

[83]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, 44.

[84]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,* (Jakarta: LP3ES, 1986), h.

madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.

Perbedaan karakter antara *madrasah* dengan sekolah itu dipengaruhi oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis. Tujuan dari pendirian *madrasah* ketika untuk pertama kalinya diadopsi di Indonesia ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan,[85] sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi kolonialisme dan Kristen,[86] di samping untuk mencegah memudarnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda itu. Sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-an bertujuan untuk menyiapkan calon pegawai pemerintah kolonial,[87] dengan maksud untuk melestarikan penjajahan.[88]

Dalam lembaga pendidikan yang didirikan Kolonial Belanda itu, tidak diberikan pelajaran agama sama sekali. Karena itu tidak heran jika di kalangan kaum pribumi, khususnya di Jawa, ketika itu muncul resistensi yang kuat terhadap sekolah, yang mereka pandang sebagai bagian integral dari rencana pemerintah kolonial Belanda untuk "membelandakan" anak-anak mereka.[89]

Pesantren memiliki tujuan yang lain lagi. Menurut Mahmud Junus, Djumhur, dan Steenbrink, pesantren didirikan untuk

---

[85]Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 192-193.

[86]Azyumardi Azra, *"Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan"*, Kata Pengantar untuk buku Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, h. xiv.

[87]H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h.47.

[88]H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, h.* 49.

[89]Azyumardi Azra, *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan"*, Kata Pengantar untuk buku Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, h. xii.

menjadi basis perjuangan rakyat dalam melawan penjajah.[90] Pesantren merupakan upaya kalangan pribumi untuk mengembangkan sistem pendidikan sendiri yang sesuai dengan tuntunan agama dan kebudayaan daerah untuk melindungi diri dari pengaruh sistem pendidikan kolonial (Belanda) saat itu, melalui "politik balas budi", atau yang lebih dikenal dengan sebutan "politik etis".

Meskipun pesantren berperan lebih dahulu dalam membendung pengaruh pendidikan kolonial, dibandingkan dengan *madrasah*, para pembaharu pendidikan Islam di Indonesia tampaknya mengakui bahwa dalam banyak hal, lembaga pendidikan Islam tradisional ini mengandung banyak kelemahan, sementara pada sisi lain lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda harus diakui memiliki banyak kelebihan. *Madrasah* yang, seperti kebanyakan lembaga modern lainnya, masuk pada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20, ini dimaksudkan sebagai upaya menggabungkan hal-hal yang positif dari pendidikan pesantren dan sekolah itu. Lembaga pendidikan *madrasah* ini secara berangsur-angsur diterima sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.[91]

Telah disinggung bahwa *madrasah* berbeda pengertiannya antara masa klasik Islam dengan masa ketika lembaga pendidikan tersebut masuk ke Indonesia pada sekitar awal abad ke-20. *Madrasah* di Indonesia merujuk pada pendidikan dasar sampai menengah, sementara pada masa klasik Islam *madrasah* merujuk

[90]Untuk lebih jelas mengenai uraian mereka, lihat beberapa aspek pemikiran mereka tentang Pendidikan Islam dalam beberapa bukunya antara lain, Karel A,.Steenbrink, Pesantren,..; Jumhur, *Sejarah Pendidikan Indonesia*; dan Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.*

[91]Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19,* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 160.

pada lembaga pendidikan tinggi (*the institution of higher learning*").[92]

Perbedaan tersebut pada gilirannya bukan hanya merupakan masalah perbedaan definisi, tapi juga menunjukkan perbedaan karakteristik antara *kedua*nya. Merujuk pada penjelasan Nakosteen,[93] motif pendirian *madrasah* pada masa klasik Islam ialah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum (sekuler), yang dianggap kurang memadai jika dilakukan di dalam masjid, sebab masjid merupakan tempat ibadah.

Namun, upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum itu di *madrasah* sejak awal perkembangannya telah mengalami kegagalan. Sebab, penekanan pada ilmu-ilmu agama (*al-'ulum al-diniyah*) terutama pada bidang fikih, tafsir, dan hadis, ternyata lebih dominan, sehingga ilmu-ilmu non-agama khususnya ilmu-ilmu alam dan eksakta, tetap berada dalam posisi pinggiran atau marjinal.[94]

Hal itu berbeda dengan *madrasah* di Indonesia yang sejak awal pertumbuhannya telah dengan sadar menjatuhkan pilihan pada (a) *madrasah* yang didirikan sebagai lembaga pendidikan yang semata-mata untuk mendalami agama (*li tafaqquh fiddin*), yang biasa disebut *madrasah* diniyah salafiyah; dan (b) *madrasah* yang didirikan tidak hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, tapi juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda, seperti *madrasah* Adabiyah di

---

[92]Menurut Azyumardi Azra, madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi ini tidak bisa disamakan artinya dengan universitas dalam arti lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan penyelidikan bebas berdasarkan nalar. Dalam tradisi pendidikan Islam, lembaga pendidikan tinggi lebih dikenal dengan nama al-jami'ah, yang secara istoris dan kelembagaan berkaitan dengan masjid jami'—masjid besar tempat berkumpul jama'ah untuk menunaikan shalat Jum'at. Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), h. viii.

[93]Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, h. 60

[94]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, h. ix.

Sumatera Barat, dan *madrasah* yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan PUI di Majalengka.[95]

Dari keterangan di atas menarik untuk dicatat bahwa salah satu karakteristik *madrasah* yang cukup penting di Indonesia pada awal pertumbuhannya ialah bahwa di dalamnya tidak ada konflik atau upaya mempertentangkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Konflik (lebih tepat disebut perselisihan pendapat) itu biasanya terjadi antara satu organisasi keagamaan dengan organisasi keagamaan lain yang memiliki faham keagamaan yang berbeda, dan mereka sama-sama mendirikan *madrasah*. Misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain, memiliki *madrasah*nya sendiri-sendiri untuk mensosialisasikan dan mengembangkan faham keagamaan mereka masing-masing.

Madrasah di Indonesia secara historis juga memiliki karakter yang sangat populis (merakyat), berbeda dengan *madrasah* pada masa klasik Islam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi *madrasah* pada masa klasik Islam terlahir sebagai gejala urban atau kota. *Madrasah* pertama kali didirikan oleh Dinasti Samaniyah (204-395 H/819-1005 M) di Naisapur kota yang kemudian dikenal sebagai daerah kelahiran *madrasah*.[96] Daerah Naisapur mencakup sebagian Iran, sebagian Afghanistan dan bekas Uni-Sovyet antara laut Kaspia dan laut Aral. Dengan inisiatif yang datang dari penguasa ketika itu, maka praktis *madrasah* tidak kesulitan menyerap hampir segenap unsur dan fasilitas modern, seperti bangunan yang permanen, kurikulum yang tertata rapi, pergantian jenjang pendidikan, dan tentu saja anggaran atau dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan *madrasah* di Indonesia. Kebanyakan *madrasah* di Indonesia pada mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan

[95]H.A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, h. 116.

[96]Adam Mez, *The Renaissance ofhlam,Ted S. Khuda Buksh dan DS Margoliuth*, NY: AMS Press 1975, h. 179; Builiet, The Patrician of Nisyapur, Cambridge: Mass. Harvard Univ. Press. 1972, h. 249-255.

pembaharuan pendidikan, setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Dana pembangunan dan pendidikannya pun berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka masyarakat sendiri diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-anak mereka ke *madrasah* dengan biaya ringan.[97]

Sebagai lembaga pendidikan swadaya, *madrasah* menampung aspirasi sosial-budaya-agama masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya *madrasah* di pedesaan itu menjadi petunjuk bahwa masyarakat Indonesia ternyata memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putri mereka. Dari sudut pandang lain, hal itu juga berarti ikut meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan. Dalam hal ini patut dicatat bahwa dari 36.000 jumlah *madrasah* yang ada (yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum), 96 persen di antaranya dikelola oleh masyarakat secara swadaya, atau *madrasah* swasta. Sementara itu *madrasah* yang mengkhususkan diri pada mata pelajaran agama, yaitu *madrasah* diniyah yang dikelola masyarakat, jumlahnya telah mencapai 22.000.[98]

Kini *madrasah* dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Sistem Pendidikan Nasional dan berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Lembaga pendidikan *madrasah* ini telah tumbuh dan berkembang sehingga merupakan bagian dari budaya Indonesia, karena ia tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Kurun waktu cukup panjang yang dilaluinya, yakni kurang lebih satu abad, membuktikan bahwa lembaga pendidikan *madrasah* telah mampu bertahan dengan karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak anak didik. Karakter itulah yang

---

[97]Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, h. 163.

[98]H.A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, h. 119.

membedakan *madrasah* dengan sekolah umum. Sehingga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 1999, *madrasah* didefinsikan sebagai "sekolah umum dengan ciri khas Islam".

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP MADRASAH

B. Konsep Partisipasi Masyarakat

1) Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris, *participate* yang diartikan sebagai *'to take part in or become involved in an activity'* (ikut mengambil bagian atau terlibat dalam suatu aktifitas.[99] Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta.[100] Dalam pengertian umum, partisipasi bermakna keterlibatan, keikutsertaan dalam suatu aktivitas.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum. partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang

[99]Paul Procter (Editor), *Cambridge International Dictionary of English* (London: Cambridge University Press, 1995), h. 1029.

[100] Tim Penuyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai Pustaka, 1996), h. 555.

dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.[101]

Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerjapekerja ke dalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pegertian "*a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*" artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.[102]

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.[103]

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri,

---

[101] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Cet.I; Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 50.

[102]Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,h. 50.

[103]Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, h.51.

mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.[104] H.A.R Tilaar mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.[105]

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelibatan secara langsung berbagai komponen masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas madrasah. Tentu hal ini terkait dengan upaya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU SPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (6) bahwa memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan dilksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat. [106]

Partisipasi merupakan hal yang fundamental dalam rangka keberhasilan suatu perencanaan, dan hal ini sangat tergantung kepada jenis-jenis partisipasi yang diberikan sebagai sumbangan kesukarelaan dari seseorang atau kelompok yang berpartisipasi. Sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut jenisnya sebagai berikut:

a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
c. Partsipasi harta benda, yang diberikan partisipan dalam bentuk harta benda untuk pengembangan atau perbaikan.

---

[104]Fasli Jalal, Dedi Supriadi (ed.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah,* (Cet.I; Yokyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 23.

[105] H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 287.

[106]Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional;* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 53.

d. Partisipasi keterampilan ilmu dan kemahiran yang diberikan partisipan untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha (keterampilan) dan industri.
e. Partisipasi sosial yang diberikan sebagai tanda keguyuban misalnya dalam bentuk arisan, koprasi dan sebagainya.[107]

Perubahan mendasar dalam penerapan pendekatan partisipatif ini adalah berubahnya sistem atau pola dan peran yang dimainkan oleh para pengambil kebijakan, yang sebelumnya semuanya bersifat sentralistis, lalu kemudian berubah menjadi desentralistis, sehingga kebijakan lebih banyak ditentukan oleh pengambil kebijakan di daerah yang secara otomotais lebih mudah dikontrol oleh masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.[108]

Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya

[107]L. Pasaribu dan B. Simanjuntak, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Tarsito, 1986), h. 349.

[108]Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, h. 27.

memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. [109]

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut:

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.[110]

[109] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, h. 52.

[110]Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, h. 50.

2) Partisipasi Masyarakat

Kata ‘masyarakat’ dalam Kamus Arab berasal dari kata *musyarak* yang diartikan sebagai sebagai sekutu, rekan, peserta, partner. Kemudian berubah menjadi *masyarakat* artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.[111] Pengertian masyarakat dalam tulisan ini adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan saling berintrekasi, saling pengaruh mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana

[111]Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 715.

orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.

c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
d. Partisipasi dilakukan secara sistematik, bukan hal yang incidental.
e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

3) Prinsip-prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun

oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

4) Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya

dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irine Astuti terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. [112]

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D., partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu "partisipasi non fisik dan partisipasi fisik". Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga

[112] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan,* h. 37.

pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.[113]

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Seperti dijelaskan dibawah ini;

1. Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandanganpandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan

[113]Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, h. 37.

pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dan lain-lain) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7. Self mobilization, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung pada tipe macam apa

partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

5) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell seperti dikutip oleh Saca Firmansyah menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang

terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.[114]

Sedangkan menurut Holil seperti dikutip oleh Saca Firmansyah unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1) Kepercayaan diri masyarakat; 2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat; 3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat; 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri; 5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat; 6) Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat; 7) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha; 8) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan; 9) Kepekaan dan daya tanggap

[114] https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/. Diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

masyarakat terhadap masalah, kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat. [115]

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsayang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

6) Macam-macam Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

---

[115] https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/. Diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacammacam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D., 2009: 39). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 39), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. [116]

Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff 31 dalam Siti Irene Astuti D. dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut: Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain;

a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan. [117]

7) Tingkatan Partisipasi

Partisipasi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi 7 tingkatan, yaitu: a. *Manipulation*, merupakan tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi. b. *Consultation,* yaitu dimana stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan. c. *Consensus-building*, yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat

---

[116]Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, h. 39-40.

[117] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, h. 40.

pasif. d. *Decision-making*, yaitu dimana konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok. e. *Risk-taking*, yaitu dimana proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting. f. *Partnership*, yaitu memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggungjawab. g. *Self-management*, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (learning process) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian

C. Konsep Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah

Ide meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah merupakan kebijakan nasional pendidikan di Indonesia Kebijakan pembentukan Komite madrasah di satuan pendidikan dan Dewan Pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, merupakan wujud nyata upaya konkrit pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah.

Komite Madrasah dan Dewan Pendidikan diharapkan berfungsi sebagai wadah untuk menggalang peran serta masyarakat terhadap madrasah. Kehadirannya diharapkan berfungsi secara optimal selaku badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator bagi upaya perbaikan dan kemajuan madrasah.[118]

Konsep awal kebijakan ini ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi atau otonomisasi pendidikan secara

---

[118]Sri Renani Pantjastuti dkk., *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan,* (Cet. I; Yogyakarta: HIKAYAT Publishing, 2008), h. 81-83.

nasional, diwujudkan pelaksanaannya melalui penerapan kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Manajemen Berbasis Madrasah menurut Suryadi merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang bertujuan mengembalikan madrasah kepada pemili atau *stakeholders* asli, yaitu masyarakat.[119] Sementara Nanang Fatah menyebutkan bahwa, Manajemen Berbasis Madrasah adalah suatu pendekatan politik yang yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan madrasah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala madrasah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja madrasah yang mencakup guru, siswa, komite madrasah, orang tua siswa, dan masyarakat.[120] Manajemen Berbasis Madrasah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*). Dalam pelaksanaannya, perlu diterapkan fungsi manajemen dengan baik mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pembinaannya. Komponen madrasah yang dikelola dengan baik dalam MBM adalah kurikulum, program pengajaran, kesiswaan, keuangan/TU (administrasi), tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan partisipasi masyarakat (Komite Madrasah).[121]

Secara teoritik, tampaknya tidak mudah mendorong dan menggalang masyarakat untuk berpartisipasi secara luas terhadap madrasah. Karena konsep partisipasi secara substantif adalah keterlibatan atau peran serta masyarakat secara sukarela, baik pemikiran ataupun materi serta tenaga yang mereka miliki untuk memajukan madrasah. Hingga pada tahap puncaknya adalah masyarakat memahami dan menyadari bahwa lembaga madrasah adalah milik bersama masyarakat dan menjadi simbol kemajuan

---

[119]Faisal, Sanapiah et.all., *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*, (Malang: UM Press, 2007), h. 4.

[120]Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasisis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 67.

[121]Benny, Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 36.

bersama. Hal ini menurut Harper dan Baldridge, seperti dikutip oleh Faisal bahwa partisipasi atau pendukungnya senantiasa bersifat sukarela, mereka bergabung atas dasar pilihan atau ketetapan hati yang sifatnya sukarela. [122]

Konsep partisipasi tidak hanya "*passive relationship*" tapi "*active relationship*", artinya bahwa jaringan hubungan tidak sekedar berpola guru-murid, orang tua-anak, atasan-bawahan, sekolah-orang tua murid dan semacamnya, sebagaimana pada umumnya yang berlaku di masyarakat, tetapi jaringannya bisa lintas peran dan institusi agar berbagai komponen dalam masyarakat bisa duduk bersama, saling berhubungan, berkomunikasi secara komunikatif, mendengar, memberi dan menerima, saling memahami dan berbagi sehingga tercipta ikatan masyarakat yang semakin kuat solidaritasnya, mereka berkembang menjadi semakin saling mempercayai dan menunjang.[123] Dengan begitu, rasa kepemilikan (*ownership*) dan tanggung jawab masyarakat terhadap madrasah akan berkembang, membudaya, dan berkelanjutan.[124]

Apakah mungkin muncul begitu saja, masyarakat secara serta merta berpartisipasi terhadap madrasah? Tampaknya mustahil pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk Komite Madrasah secara otomatis memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat luas untuk berpartisipasi terhadap madrasah. Sebagaimana hasil temuan Faisal dan tim peneliti *International Corruption World* (ICW), menunjukkan bahwa pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk Komite Madrasah justru menimbulkan konflik baru. Keberadaan komite Madrasah pun dianggap mengurangi substansi makna otonomi sekolah yang diwujudkan dalam konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) itu sendiri. Pemerintah tampaknya sedang panik dalam mengelola pendidikan. Jika implementasi komite hanya sampai pada

---

[122]Faisal Sanapiah, *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah*, h. 7.

[123]Faisal Sanapiah, *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah*, h. 7.

[124]Faisal Sanapiah, *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah*, h. 10.

menggalang dana orang tua siswa sebagaimana temuan terdahulu, maka pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk komite tidak perlu ada. Lalu, bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat luas agar dapat memahami tentang pentinya peran swasta (masyarakat) dalam pengelolaan madrasah? Harus dimulai dari mana? Serta apa langkah-langkah dan atau strategi yang harus ditempuh untuk mendapatkan para partisipan mau atau bergabung dalam suatu gerakan sosial dalam hal ini berpartisipasi terhadap madrasah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus segera dijawab untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan dalam pengelolaan pendidikan di tanah air.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini difokuskan untuk menjawabnya dengan menggunakan beberapa teori yang ada. Di antara teori-teori tersebut yang digunakan adalah:

Pertama, karena berpartisipasi terhadap madrasah yang digalang pemerintah adalah kerja sosial, maka salah satu teori yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah adalah menggunakan teori gerakan sosial. Menurut Ismail, seperti yang dikutip oleh Faisal bahwa para partisipan mau bergabung dalam suatu gerakan sosial tidak terlepas dari keinsyafan dan kesetujuan para partisipan itu sendiri terhadap paham beserta cita-cita yang dituju oleh gerakan sosial tempat mereka (para partisipan) itu bergabung. Mereka menyetujui, menerima, dan merasa mantap dengan cita-cita gerakan sosial dimaksud. Itulah yang membuat mereka berketetapan hati (rela) untuk bergabung dan terlibat memperjuangkan faham beserta cita-cita yang diusung oleh gerakan sosial bersangkutan.[125] Dengan kata lain, kesukarelaan para partisipan untuk bergabung dalam suatu gerakan sosial apa pun menandakan adanya penerimaan dan keinsyafan mereka terhadap cita-cita yang diperjuangkan yang hendak dicapai melalui gerakan tersebut. Dan mereka memang sepakat pada filosofi dan

[125]Faisal Sanapiah, *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah*, h. 8.

ideologi yang ditawarkan untuk diperjuangkan oleh gerakan sosial tempatnya bergabung tersebut. Konsep ini oleh Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Arifin menyebutnya dengan faktor ideologis. Jika suatu gerakan sosial tidak ditopang oleh ideologi, maka akan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Oleh karena itu, menurut Blumer gerakan sosial yang dirancang oleh suatu kelompok perlu merumuskan kerangka ideologinya yang berisi lima hal penting, yaitu; 1) pernyataan tujuan gerakan, 2) kritik terhadap struktur, 3) doktrin sebagai justifikasi tujuan gerakan, 4) seperangkat kepercayaan, dan 5) mitos gerakan. [126]

Kedua, karena untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah berbasis agama, dalam hal ini sekolah Islam atau madrasah, maka dalam penelitian ini juga, akan menggunakan konsep-konsep Islam untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi terhadap madrasah. Peran agama begitu *determinant* (menentukan) dan terbukti efektif untuk mendorong setiap individu berpartisipasi terhadap madrasah. Karena dalam ajaran agama, terdapat konsep tentang *fastabiqūl khaīrāt* (berlomba-lomba dalam kebajikan) (Qs. Al-Baqarah (2): 148); *ta'āwun* (tolong menolong) (Qs. Al-Mā'idah (5): 2); bekerja *ikhlas* (tanpa pamrih), *watawā shaū bisshobri watawā shaū bil marhamah* (berpesan untuk bersabar dan kasih sayang) (Qs. Al Balad (90): 17); hidup *berjama'ah* (berorganisasi), dan bentuk-bentuk lainnya. Fakta menunjukkan demikian, bahwa banyak orang berafiliasi (bergabung) dengan suatu organisasi sosial didorong oleh prinsip-prinsip ajaran agama tersebut. Jika prinsip ini diterapkan pada suatu madrasah, maka pada madrasah tersebut akan terdapat konsep partisipasi masyarakat yang hakiki yang disebut dengan konsep "*active relationship*" atau partisipasi demokrasi (*democratic participation*) yang menonjolkan kekuasaan warga (*citizenship*).

---

[126]Arifin, Imron, *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs dan Multi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma, 2000), h. 355.

D. Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah Berbasis Agama

Konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah berbasis agama, terutama madrasah, dilihat dari aspek historis-filosofis, justru mendapat tempat khusus bagi masyarakat Muslim dari tahun ke tahun. Konsep partisipasi yang belakangan dikembangkan ini dianggap terlambat. Muhaimin, menyebutkan bahwa dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat muslim itu sendiri. Sehingga madrasah sebenarnya sudah menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) dengan partisipasi masyarakat sebagai pilarnya. Indikatornya madrasah sampai saat ini masih tetap eksis, karena landasan filosofis berdirinya didorong oleh spirit agama dalam rangka pengembangan ajaran Islam. Hingga saat ini kurang lebih 90% jumlah madrasah yang masih eksis di Indonesia adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta. Sedangkan sisanya bersatatus negeri.[127] Dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap madrasah lebih besar dari sekolah non madrasah.

Adapun menurunnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam (madrasah) dewasa ini, lebih disebabkan oleh hegemoni politik kekuasaan. Baik hegemoni politik global, regional, nasional, maupun lokal. Hegemoni politik global dan regional dapat ditandai dengan pengambilalihan kekuasaan sebesar-besarnya oleh Barat, dan hegemoni nasional dan lokal dapat ditandai dengan pelarangan aktivitas pendidikan Islam dari Hindia Belanda hingga Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Inpres SDN No.10/1973 tentang pengambil alihan "kepemilikan" sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah. Tantangan-tantangan yang besar inilah, yang dihadapi madrasah dalam perjalanan sejarahnya.

---

[127]Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 180.

Dampak Inpres membuat lembaga pendidikan Islam menjadi kurang percaya diri, karena dianggap sekolah nomor dua. Bersekolah di madrasah karena di sekolah negeri tidak diterima, dan ini masih terasa hingga saat ini. Sehingga ke depan akan terjadi sebaliknya jika sekolah-sekolah Islam berbenah meningkatkan mutu layanan, mutu proses, dan mutu keluaran.

Berkaitan dengan partisipasi terhadap sekolah berbasis agama, berbagai temuan menunjukkan bahwa, masyarakat lebih tertarik berpartisipasi terhadap sekolah-sekolah berbasis agama dari pada sekolah yang bukan berbasis agama. Pada sekolah berbasis agama ini lebih muda menggerakkan masyarakat untuk bergabung terhadap madrasah dari pada sekolah umum. Karena sekolah berbasis agama sudah memiliki potensi-potensi besar untuk mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah. Misalnya tokoh-tokoh agama dan ajaran-ajaran agama yang dianut masyarakat itu sendiri.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Konsep Manajemen Berbasis Madrasah

1) Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)

Istilah MBM merupakan terjemahan dari *"school-based manajemen".* Muncul pertama kali di Amerika tahun 1970-an sebagai alternatif untuk mereformasi pengelolaan pendidikan. Reformasi diperlukan karena kinerja sekolah selama puluhan tahun gagal menunjukkan peningkatan berarti, memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah. Tuntutan perubahan lingkungan sekolah antara lain: tuntutan dunia kerja, IPTEK, sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Lulusan sekolah pada saat itu di bawah standar tuntutan berbagai bidang kebutuhan yang mengakibatkan kekecewaan banyak kalangan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. [128]

[128]Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2003), h. 24.

Menurut Slamet, bahwa MBS/M terdiri atas tiga asal kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen berarti koordinasi dan penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis artinya "berdasarkan pada" atau "berfokus pada". Dan sekolah merupakan organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan "bekal kemampuan dasar" kepada peserta didik atas dasar ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi untuk SDM). Slamet menyimpulkan, MBS/M adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomi oleh sekolah melalui sejumlah *input* manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (*partisipatif*). Kelompok kepentingan meliputi: kepala sekolah dan wakilnya, guru, siswa, konselor, tenaga administratif, orang tua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintah, wakil organisasi pendidikan.

MBS/M sebagai paradigma baru dalam mengelola pendidikan nasional, merupakan inovasi kebijakan pendidikan baru yang harus dikembangkan dalam rangka memecahkan kompleksitas persoalan pendidikan. Konsep MBS/M mengedepankan peningkatan mutu terpadu, sehingga dapat dijadikan kebijakan strategis dalam implementasi pendidikan yang diprakarsai sekolah dan daerah. Terwujudnya konsep ini apabila didukung oleh partisipasi penuh dari segenap masyarakat atau *stakeholdersnya*. Tanpa partisipasi, MBS seperti kehilangan ruh. Hal ini seperti apa yang dinyatakan oleh Suryadi, "MBS merupakan paradigm baru pengelolaan pendidikan yang bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemilik atau *stakeholders* asli, yaitu masyarakat".

Nanang Fatah menyebut MBS adalah pendekatan politik, bertujuan mendesain ulang, pengelolaan sekolah dengan

memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, KS/M, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*).[129]

Bentuk konkrit partisipasi masyarakat sebagaimana amanah UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 adalah disalurkan melalui dua lembaga formal yang dibentuk pemerintah sesuai dengan semangat Manajemen Berbasis Sekolah/Manajemen Berbasis Madrasah yaitu Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Dua lembaga inilah sebagai pilar penopang MBM.

Sesuai dengan amanah UU Sisdiknas, ada empat bentuk partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah, yaitu (1) partisipasi dalam memberi pertimbangan (*advissory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) partisipasi dalam bentuk memberikan dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) partisipasi dalam bentuk memberikan pengontrolan (*controling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan; dan (4) mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. [130]

---

[129]Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasisis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah,*, h. 12.

[130]Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

2) Partisipasi Masyarakat dalam Wadah Komite Madrasah dan Dewan Pendidikan

a. Komite Madrasah

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 014/U/2002[131] tanggal 2 April 2002 Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya pada tingkat satuan pendidikan, adalah komite madrasah, atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pada prinsipnya dan yang utama badan ini dibentuk atas prakarsa masyarakat, tetapi jika prakarsa masyarakat ini tidak memadai, maka satuan pendidikan dapat mengambil inisiatif. Jika satuan pendidikan tidak mengambil inisiatif, maka pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil inisiatif. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum yaitu sebagai representasi para *stakeholder* madrasah terwakili secara proporsional.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 komite madrasah adalah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.[132] Oleh karena itu, madrasah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa madrasah itu dapat dipercaya.

Struktur organisasi komite madrasah adalah perubahan nama dari BP3 dan pada umumnya baru terbentuk sejak juli 2002. Struktur organisasi komite madrasah yang sudah dibentuk di tiap-tiap madrasah pada umumnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Anggota komite madrasah dibagi ke dalam 4 komisi yaitu; 1) pengembangan SDM, 2)

---

[131]Dapat diakses di https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kepmendiknas_044_02.pdf

[132]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 37.

Manajemen mutu sekolah, 3) mutu pembelajaran, dan 4) hubungan orangtua/wali dengan masyarakat sebagaimana dideskripsikan pada gambar berikut:
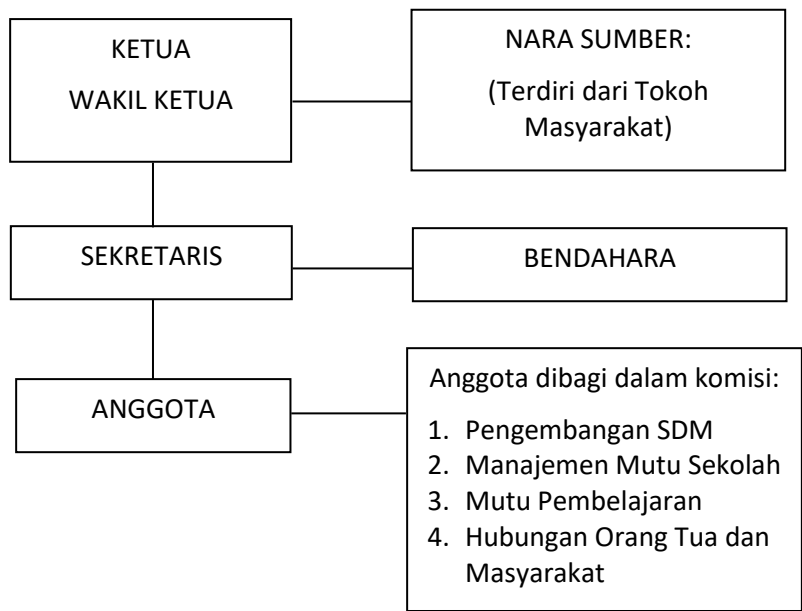
Gambar 3: Struktur Komite Madrasah

Agar tidak tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi dan papan Komite Madrasah, Dewan Pendidikan dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak. Besarnya peran orang tua dan masyarakat berpartisipasi melalui badan ini dalam mengelola madrasah implementasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan berjalan menurut selera orang-orang yang ada dalam badan tersebut. Keikutsertaan masyarakat ini memang di samping membawa dampak positif dapat membawa dampak negatif.

Kontribusi komite madrasah terhadap madrasah menurut Satori menyangkut kelembagaan sebagai berikut.

1. Penyusunan perencanaan strategik madrasah, yaitu strategi pembangunan madrasah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan. Dalam dokumen ini dibahas visi dan misi madrasah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi madrasah, kajian isu-isu stratejik madrasah, penyusunan program prioritas dan sarana pengembangan madrasah, perumusan program, perumusan strategi pelaksanaan program, cars pengendalian dan evaluasinya.
2. Penyusunan Perencanaan Tahunan Madrasah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategik madrasah, dalam perencanaan tahunan dibahas program-program operasional madrasah yang merupakan implementasi program prioritas yang dirumuskan secara rinci dalam perencanaan strategik madrasah yang disertai perencanaan anggarannya.
3. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite madrasah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi kepedulian para *stakeholder* madrasah terhadap berbagai aspek kehidupan madrasah yang ditujukan pada upaya-upaya bagi perbaikan, kemajuan dan pengembangan madrasah.
4. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan madrasah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas madrasah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif madrasah sesuai dengan aspirasi *stakeholder* madrasah. Perhatian terhadap masalah yang dimaksudkan agar madrasah setidak-tidaknya memenuhi standar pelayanan minimum yang dipersyaratkan.
5. Mendorong madrasah melakukan internal monitoring (*School self-assessment*), evaluasi diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Madrasah.

6. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (*quality assurance*) serta memelihara kondisi pembelajaran madrasah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi peserta didik (*basic minimum competence*) seperti yang diatur dalam PP nomor 25 tahun 2000, UUSPN No. 20 tahun 2003, dan sejumlah PP yang menyertainya.
7. Membahas Laporan Tahunan Madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan Komite Madrasah. Laporan Tahunan Madrasah tersebut merupakan bahan untuk melakukan review madrasah selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Review madrasah merupakan kegiatan penting untuk mengetahui keunggulan madrasah disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya. Sebaliknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan madrasah disertai analisis faktor--faktor penyebabnya. Review madrasah merupakan media saling mengisi pengalaman sekaligus saling belajar antar madrasah dalam upaya meningkatkan kinerja masing-masing.

b. Dewan Pendidikan

Dalam membangun kepedulian stakeholder pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dewasa ini dibentuk lembaga yang diberi nama Dewan Pendidikan. Dewan pendidikan adalah suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Nama generik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Ruang lingkup: prasekolah, sekolah, dan luar sekolah. Kedudukan dan sifat dewan pendidikan adalah Dewan pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota, bukan lembaga birokrasi baru, hubungannya dengan lembaga pemerintah daerah bersifat koordinatif. Posisi Dewan Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan (UUSPN No. 20 tahun 2003). Pembentukan Dewan Pendidikan menjadi lebih kuat dilihat dari aspek legalitasnya, karena telah diwadahi dalam pasal 56 ayat 2 UUSPN No. 20 tahun 2003 yang menegaskan bahwa Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkhis.[133] Dewan pendidikan ini berkedudukan di kabupaten/kota merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkhis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintahan lainnya, tetapi mempunyai hubungan kemitraan dengan pemerintah.

Interaksi Dewan Pendidikan dengan pemerintah kabupaten/kota dan interaksi Komite Madrasah dengan pemerintah desa/kelurahan adalah pada posisi saling melengkapi, karna mereka saling membutuhkan. Posisi Dewan Pendidikan, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Dewan Pendidikan bertujuan (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, kompetitif, dan relevan di mana satuan pendidikan dan kabupaten/kota itu berada.

Keputusan Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas

[133] Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional., h. 36-37.

prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dewan pendidikan berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, dan sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan satuan pendidikan.

Jika power intelektualitas Dewan Pendidikan harus sama kuat dengan parlemen dan eksekutif, maka keanggotaan Dewan Pendidikan harus selektif agar memenuhi kualifikasi tersebut. Dalam hal ini Keputusan Mendiknas RI No. 044/U/2002 menegaskan bahwa keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas (1) lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang pendidikan; (2) tokoh masyarakat; (3) tokoh pendidikan; (4) yayasan penyelenggara pendidikan (madrasah, luar madrasah, madrasah, pesantren); (5) dunia usaha, industri, asosiasi profesi; (6) organisasi profesi tenaga kependidikan; dan (7) komite sekolah/madrasah. Unsur birokrasi/legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (maksimal 4-5 orang). Unsur birokrasi dalam keanggotaan Dewan Pendidikan dapat dilibatkan dan tidak dilibatkan, jika dilihat dari esensinya bahwa Dewan Pendidikan adalah sebagai lembaga yang mandiri, sebenarnya tidak perlu keterlibatan birokrasi dan anggota legislatif dalam keanggotaan Dewan pendidikan. Menurut Kepmen tersebut jumlah anggota Dewan Pendidikan gasal, maksimal 17 (tujuh belas) orang.

Manajemen madrasah akan efektif jika para pengelola pendidikan mampu melibatkan *stakeholders* terutama peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan

kewenangan, pengadministrasian, dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing madrasah. Inovasi kurikulum lebih menekankan pada keadilan (*equitas*) peserta didik di atas rata-rata mendapat perlakuan dan penyesuaian kurikulum demikian juga peserta didik sebaliknya, kemudian pemerataan bagi semua peserta didik yang didasarkan atas kebutuhan peserta didik dan masyarakat lingkungannya.

Prinsip pembentukan Dewan Pendidikan adalah (1) transparan, akuntabel, dan demokratis; (2) anggota Dewan Pendidikan jumlahnya gasal/ganjil; dan (3) merupakan mitra pemerintah kabupaten/kota. Agar lebih mengefektifkan kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, sebaiknya kepengurusan Dewan Pendidikan berbentuk presidium, anggota presidium ini membentuk tim administrasi dewan Pendidikan yang menyelenggarakan program kerja Dewan Pendidikan atas kebijakan presidium.

Namun dalam lampiran Kepmendiknas No. 044/U/2002 menegaskan bahwa kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kepengurusan Dewan Pendidikan berbentuk presidensial atau hierarki komando, bukan kebersamaan atau *team working*. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota, dan ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan/atau DPRD.

BAB IV

STRATEGI PEMBERDAYAAN MADRASAH BERBASIS MASYARAKAT

A. Hubungan Madrasah dengan Masyarakat

Madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari madrasah. Dikatakan demikian, karena keduanya memiliki kepentingan, madrasah merupakan lembaga formal yang diserahi mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Pengaruh masyarakat terhadap madrasah sebagai lembaga sosial, terasa amat kuat, dan berpengaruh pula kepada individu-individu yang ada di lingkungan madrasah. Lingkungan di mana madrasah berada, merupakan komunitas masyarakat yang amat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi, dan bersifat unik, sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam. Masyarakat yang kompleks, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil dengan ciri-ciri kolektif yang dimilikinya, di mana madrasah itu berada, ada

kalanya mempunyai harapan khusus yang berbeda-beda terhadap kebijaksanaan madrasah, seperti sasaran, tujuan, kurikulum, program dan sebagainya.[134]

Berkaitan dengan hal di atas, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa madrasah selama ini sudah bekerjasama dengan masyarakat, namun bentuk kerjasama yang dilakukan baru hanya sebatas menyekolahkan anaknya ke madrasah. Selebihnya tidak ada bentuk kerjasama. Hal ini tampak ketika masyarakat ingin mendirikan madrasah atau dalam hal menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah. Dalam struktur organisasi yang ada di madrasah pun, sebenarnya sudah ada humas yang membidangi masalah ini. Begitupula sudah dikenal istilah komite madrasah, namun hanya sekedar melengkapi struktur organisasi saja. Humas dan komite madrasah tidak lebih dari sekedar nama saja. Dalam hal bentuk dan pola kerjasama yang dapat saling memberi kontribusi kepada madrasah tidak ada.

Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa hubungan antara madrasah dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik dengan bentuk yang beragam. Namun bentuk hubungan tersebut belum memainkan fungsi dan perannya masing-masing sehingga belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas madrasah yang ada. Hal ini dipahami dari pandangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa ada took masyarakat yang sudah lama ditunjuk menjadi komite madrasah namun tidak tau apa yang mesti di perbuat untuk membantu madrasah dalam mengembangkan kualitasnya, kecuali hanya sekedar menghadiri undangan bila diundang dalam sebuat rapat, sebab bila mencoba untuk melakukan kerjasama dengan orang tua siswa untuk membantu madrasah dalam hal pendanaan misalnya itu sangat sulit karena rata-rata mereka berekonomi lemah. Sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Seandainya orang tua mereka kaya-kaya, mungkin saja ada yang bisa disumbangkan untuk kepentingan madrasah.

---

[134]Wajosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoritik Permasalahannya* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 331.

Kedua pandangan di atas merefleksikan belum optimalnya hubungan madrasah dengan masyarakat yang ada dalam hal saling memberi kontribusi terhadap madrasah dan masyarakat sekitar. Belum optimalnya partisipasi dan fungsi-fungsi yang harus diembang sebagai komite madrasah menunjukkan rendahnya partsipasi masyarakat terhadap madrasah dalam memberikan kontribusi positif bagi pengembangan madrasah yang ada. Meskipun kebijakan dalam kaitannya dengan manajemen berbasis madrasah sudah lama diinstruksikan.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan betul-betul, dalam memperbaiki dan mempertinggi hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Kurangnya perhatian masyarakat selama ini terhadap madrasah sebenarnya disebabkan juga oleh kurangnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan di madrasah kepada masyarakat.

Sehubungan hal dimaksud untuk memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan berbagai hal tentang madrasah, tujuan, fungsi, dan kondisi obyektifnya. Ini penting, terutama untuk menarik perhatian berbagai pihak yang terkait dengan manajemen madrasah agar tergugah untuk melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dijalankan di madrasah. Sehingga visi dan misi madrasah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, dirasakan perlunya revitalisasi hubungan madrasah dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini penting, karena madrasah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan[135] program-program pendidikan yang relevan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika kepala madrasah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (mutualisma).

---

[135] Wajosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoritik Permasalahannya,* h.331.

Menurut E. Mulyasa, hubungan madrasah dengan masyarakat dimaksudkan untuk : (1) mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah, (2) menilai program madrasah, (3) mempersatukan orang tua peserta didik dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, (4) mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi, (5) membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah,(6)memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah, (7)mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah.[136]

Hubungan madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai madrasah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap madrasah. Untuk kepentingan tersebut, dapat dilakukan berbagai teknik dan media, seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin madrasah, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua. Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan madrasah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, khususnya yang berkepentingan langsung dengan madrasah. Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja, dan produktivitas madrasah, diharapkan semakin efektif, dan efisien.

Pada hakikatnya, madrasah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, demikian pula hasil pendidikan yang berupa lulusan, akan menjadi harapan dan dambaan masyarakat.

[136]E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 92.

Oleh karena itu, madrasah tidak boleh menjadi menara gading bagi masyarakat. Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana serta pembiayaan pendidikan, meyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat menjadi semakin penting, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan madrasah. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi melalui manajemen yang tepat.

Hubungan madrasah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di madrasah. Dalam hal ini, madrasah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan madrasah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya madrasah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.

Oleh karena itu, madrasah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta dalam masyarakat. Sebaliknya, madrasah harus mengetahui kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap madrasah. Dengan kata lain, antara madrasah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis.

Hubungan madrasah dengan masyarakat dan lingkungan sekitar ini makin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerjasama ini tidak perlu dibina dan dikembangkan. Pada masyarakat yang kurang menyadarai pentingnya pendidikan, madrasah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk mengembangkan hubungan kerja sama yang lebih harmonis. Jika hubungan madrasah dengan masyarakat berjalan

dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan madrasah juga akan baik dan tinggi.

Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara madrasah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang madrasah. Gambaran dan kondisi madrasah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua peserta didik, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran madrasah, open hause, kunjungan ke madrasah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan oleh tenaga kependidikan madrasah, radio, dan televisi, serta laporan tahunan. Kepala madrasah dan guru merupakan kunci keberhasilan hubungan madrasah dengan masyarakat, yang harus menaruh perhatian besar terhadap apa yang terjadi pada peserta didik di madrasah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang madrasah. Kepala madrasah dituntut untuk senantiasa membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara madrasah dan masyarakat guna mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien.

Hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat menurut Mulyasa akan membentuk:

a. Saling pengertian antara madrasah dan masyarakat, termasuk dunia kerja.
b. Saling membantu antara madrasah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
c. Kerja sama yang erat antara madrasah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan merasa bangga ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di madrasah.[137]

Untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antara masyarakat dan madrasah, menurut Qadri Azizy, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

---

[137] E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah.* h. 92.

a. Sosialisasi kepada para pemimpin formal, meliputi eksekutif dan legeslatif. Kepala madrasah dan jajarannya tidak hanya diam di kantor menunggu uluran tangan dari para pejabat daerah, tetapi harus pro-aktif untuk meyakinkan mereka. Kepala madrasah dan tentunya dengan melibatkan Komite Madrasah dapat mengajukan usulan untuk silaturahmi dan sekaligus presentasi program-program madrasah dalam proses mencerdaskan anak-anak di daerah tersebut.
b. Melibatkan para pejabat daerah (eksekutif dan legeslatif) untuk ikut memiliki madrasah. Madrasah merupakan milik masyarakat meskipun statusnya negeri dan masih mengikuti sistem sentralistik. Maju mundurnya, dan berhasil atau gagalnya madrasah mempunyai dampak langsung kepada masyarakat di daerah. Untuk itu, para eksekutif dan legeslatif ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan madrasah.
c. Menunjukkan program langsung, disamping mendidik anak-anak daerah seperti menunjukkan prestasi peserta didik, dan guru madrasah, atau keberhasilan madrasah secara keseluruhan.[138]

Dengan terciptanya harmonisasi hubungan madrasah dengan masyarakat, madrasah diharapakan dapat meningkatkan kinerja dan melaksanakan proses pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Berkualitas dalam pandangan penulis di sini yakni kaya dengan wawasan intelektual yang dibarengi dengan kematangan spiritual.

B. Persepsi Masyarakat terhadap Madrasah

Sesuai dengan teori persepsi yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yang menjadi pokok persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan madrasah adalah

---

[138] Qadri Azizy, *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial, Mendidik Anak Sukses Masa Depan:Pandai dan Bermanfaat* (Semarang: Aneka Ilmu, 2002).h. 95.

kondisi fisik dan lingkungan madrasah, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki madrasah, kurikulum, guru, kualitas SDM, manajemen kepemimpinan kepala madrasah. Dengan demikian, untuk memahami lebih jauh dan mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap madrasah, penulis sengaja mengupas persepsi masyarakat dari aspek pemahaman dasar tentang madrasah, keunggulan dan kelemahan madrasah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap madrasah, hubungan madrasah dengan masyarakat, peluang dan tantangan madrasah untuk menjadi pilihan pavorit, serta harapan masyarakat dalam kaitan pengembangan madrasah ke depan.

Beberapa alasan dan pertimbangan memilih aspek-aspek tersebut, karena penulis belum atau tidak menemukan aspek-aspek khusus yang mutlak dijadikan pedoman dalam teori persepsi. Selain itu, penulis berasumsi bahwa aspek-aspek tersebut adalah aspek-aspek yang tergolong umum dan sering menjadi sorotan masyarakat terhadap lembaga pendidikan madrasah yang sampai saat ini masih menjadi bahan diskusi di kalangan politisi dan praktisi pendidikan Islam untuk mencari solusi alternatif pemecahan dari berbagai masalah yang dihadapi madrasah dewasa ini.

1) Persepsi Dasar Masyarakat tentang Madrasah

Madrasah merupakan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara demokratis dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sejak beberapa dasawarsa, image madrasah di mata sebagian besar masyarakat selalu dipandang sebagai lembaga pendidikan yang terbelakang, apalagi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Prestasi hasil belajar siswa yang rendah, manajemen yang kurang profesional, tenaga pengajar yang kurang bermutu, serta sarana dan prasarana yang terbatas, seakan menjadi ciri yang tak terpisahkan dari madrasah. Ketertarikan masyarakat pada madrasah, menurut Ainurrafiq Dawam lebih ditampakkan sebagai “Ikatan Emosional” dibandingkan ikatan rasional. Ikatan ini muncul dikarenakan

bertemunya dua kepentingan. Pertama, hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperan serta dalam pendidikan (meningkatkan pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya). Kedua, motivasi keagamaan (keinginan agar anak-anak mereka selain mendapat pendidikan umum juga mendapat pendidikan agama yang cukup).[139]

Kuatnya ikatan emosional masyarakat tersebut menurutnya telah menyebabkan madrasah menjadi lebih massif, populis, dan mencerminkan suatu gerakan masyarakat bawah. Oleh karena itu, madrasah lebih banyak terdapat di pedesaan atau di daerah pinggiran dan lebih dimotivasi secara intrinsik bahwa belajar dianggap sebagai suatu kewajiban. Motivasi agama ini didukung pula oleh ajaran wakaf yang memberi dorongan bahwa tanah/sarana yang diwakafkan akan terus mengalir amalnya walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Maka tidak heran jika hampir seluruh tanah madrasah adalah wakaf.[140]

Akan tetapi, madrasah yang disebut-sebut sebagai lembaga pendidikan yang kurang maju itu, sampai hari ini, masih tetap ada, dipertahankan, dibela dan bahkan setiap tahun jumlahnya berkembang. Sebaliknya, sekolah umum, baik berupa SD, SMP, SMU bahkan juga perguruan tinggi, tidak jarang terdengar berita bahwa lembaga pendidikan itu tidak sedikit yang sudah kekurangan murid dan kemudian dimerger, bahkan tutup karena tidak punya murid. Sebaliknya pula, justru muncul fenomena baru, madrasah semakin bertambah jumlahnya dan dalam banyak kasus bertambah siswanya. Oleh karena itu, masih relevankah saat ini jika dikatakan bahwa keterikatan masyarakat selama ini pada madrasah hanyalah merupakan ikatan emosional? Dan bukan ikatan rasional? Melihat saat ini bermunculan madrasah-madrasah unggulan seperti madrasah terpadu dan madrasah model yang banyak menarik minat masyarakat. Tentunya bisa diasumsikan bahwa yang membuat masyarakat memilih madrasah

---

[139]Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, h. 50.

[140] Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, h. 71

unggulan itu bukanlah semata-semata ikatan emosional yang mengandalkan premordialisme, namun yang lebih mendominasi adalah pilihan rasional dan berwawasan ke depan, di mana masyarakat sudah mampu melihat bahwa madrasah yang saat ini mampu mengakomodasi aspirasi para orang tua peserta didik yang menginginkan anaknya memiliki kematangan intelektual dan spiritual sekaligus.

Persepsi miring terhadap madrasah selama ini menurut Imam Suprayogo sebenarnya tidak hanya datang dari masyarakat, namun sebagian pengamat dan tokoh pendidikan pun kadang kala kurang mampu melihat madrasah secara adil, lebih-lebih tatkala membandingkannya dengan sekolah umum.[141] Madrasah yang selama ini telah mencetak output religius dan berakhlak kurang memperoleh acungan jempol, baik dari masyarakat maupun pengamat pendidikan. Padahal kenyataannya, baik secara filosofis maupun budaya, bangsa ini sangat mengedepankan nilai-nilai agama, pribadi luhur, dan akhlak mulia. Tanpa mengabaikan keberhasilan lembaga pendidikan pada umumnya, dapat diamati bahwa anak-anak madrasah, mulai ibtidaiyah sampai aliyah hampir tidak terdengar melakukan kenakalan remaja sampai pada tingkat yang memperihatinkan. Hanya sayangnya, menurut Imam Suprayogo, para pengamat dan tokoh pendidikan rupanya belum sampai memperhatikan betapa pentingnya keberhasilan aspek pembinaan kehidupan religius, pribadi luhur, dan akhlak mulia ini secara memadai. Mereka lebih asyik dengan prestasi perkembangan intelektual yang dilihat dari aspek sederhana, yaitu hasil dari Ujian Nasional belaka.[142] Ketidak adilan terhadap madrasah juga dapat dilihat dengan mudah dari fasilitas pemerintah yang diberikan kepada madrasah. Oleh karena madrasah kebanyakan berstatus swasta (95%), mereka tidak sebagaimana sekolah umum yang kebanyakan berstatus negeri.

---

[141]Imam Suparayogo, *Quo Vadis Madrasah; Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah* (Cet. I; Jakarta: Hikayat, 2007), h.7.

[142]Imam Suparayogo, *Quo Vadis Madrasah; Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah,* h.72

Sebagai lembaga pendidikan swasta, madrasah harus mampu mencukupi semua kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, yaitu mulai dari penyediaan guru sekaligus mengurus kesejahteraannya, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, dan segala hal lainnya agar madrasah dapat berjalan. Persoalan yang perlu diperjelas adalah bagaimana sesungguhnya masyarakat memaknai madrasah selama ini? Mengapa terjadi ketahanan madrasah yang sedemikian kukuh, dan hal itu tidak selalu dialami oleh lembaga pendidikan pada umumnya. Lembaga pendidikan Islam ini dengan dukungan fasilitas dan pendanaan yang serba terbatas ternyata memiliki kekuatan bertahan hidup yang sedemikian kuatnya. Sehingga, lembaga pendidikan Islam ini sekalipun sulit mengalami kemajuan akan tetapi memiliki ketahan hidup yang luar biasa.

Berdasarkan persepsi masyarakat sebagaimana digambarkan di atas, secara umum penulis dapat mengklasifikasikan persepsi dasar masyarakat menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok masyarakat yang lebih melihat madrasah dari aspek kurikulumnya. Pendapat kelompok pertama dapat dikemukakan bahwa mereka mempunyai pendapat yang sama dan lebih menfokuskan pada aspek materi atau mata pelajaran yang diajarkan dengan pandangan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama lebih banyak dari sekolah umum. Pendapat singkat dan sederhana ini dikemukakan oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai kepala madrasah dan guru madrasah. Mereka lebih memperjelas pendapatnya dengan menjelaskan pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan di madrasah seperti Aqidah Akhlah, Fiqih, Al-Qur'an Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Kedua, kelompok masyarakat lebih melihat eksistensi madrasah dari aspek kelembagaannya. Mereka berpendapat bahwa madrasah adalah sebuah lembaga atau institusi pendidikan Islam di samping sekolah yang pengelolaannya secara administratif berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Ketiga, kelompok masyarakat memandang madrasah sebagai tempat untuk mendidik anak agar mereka bisa berakhlak mulia. Pandangan ini disampaikan oleh masyarakat yang berlatar belakang sebagai tokoh masyarakat. Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak dan moral merupakan aspek penting yang harus mendapatkan perhatian bagi para pengelola madrasah. Sebeb hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi pihak madrasah bila dibandingkan dengan sekolah umum. Oleh sebab itu, dalam melakukan pembinaan akhlak dan moral kepada murid lebih ditekankan pada pemberian contoh teladan bagi para guru, pembina dan pengasuh madrasah.

2) Persepsi Masyarakat tentang Madrasah yang Paling Diminati

Membicarakan minat masyarakat terhadap madrasah, maka pertanyaan pertama yang mesti diajukan adalah madrasah dalam bentuk yang bagaimana yang diminati masyarakat? Masyarakat manakah yang menginginkan madrasah dalam bentuk yang demikian? Apakah masyarakat yang berada di pedesaan atau di perkotaan? Ataukah masyarakat kelas ekonomi atas, ekonomi menengah, atau masyarakat ekonomi lemah? Begitu pula jika membicarakan mengenai upaya-upaya pengembangannnya, semestinya membedakan antara berbagai tipologi madrasah yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Jika kita mencermati fenomena madrasah, maka paling tidak ada 3 tipologi madrasah yang ada di Indonesia, yakni madrasah yang tertinggal, madrasah yang sedang tumbuh dan madrasah yang sudah maju. Madrasah yang tertinggal, yang jumlahnya paling besar, terutama berada di pedesaan. Memang begitulah, madrasah merupakan gejala desa. Keadaannya, sebagian besar masih sangat sederhana untuk tidak menyebut sangat memprihatinkan. Siapa saja yang berkesempatan menelusuri banyak desa di Indonesia, terutama yang berkomunitas Muslim, selalu menemukan madrasah yang keadaannya sangat memprihatinkan. Bangunannya sederhana, fasilitas pendidikan, kurikulum termasuk para gurunya berjalan apa adanya.

Kesederhanaan itu, lebih-lebih tampak lagi bagi madrasah yang berada di masyarakat miskin. Akan tetapi anehnya, lembaga pendidikan seperti itu, masih didukung dan diminati masyarakat.

Menurut hemat penulis, minat masyarakat terhadap madrasah tipe seperti ini didasarkan bukan pada pilihan rasional yang menganggap bahwa pendidikan di madrasah tersebut dapat mewujudkan cita-cita mereka sebagai orang tua, namun hanya karena faktor finansial. Apalagi jika masyarakat yang berada di pedesaan mungkin bagi mereka yang penting anak mereka dapat sekolah sekaligus membantu orang tua sehabis pulang sekolah. Para guru madrasah tertinggal, biasanya, selain terdiri atas beberapa guru bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas, juga berasal dari tenaga honorarium. Beberapa guru bantuan pemerintah yang diperoleh madrasah swasta di beberapa tempat diangkat sekitar tahun 1970-an, atas dasar lulusan UGA (Ujian Guru Agama). Ketika itu pemerintah mengangkat dalam jumlah besar guru agama untuk madrasah. Karena pada saat itu belum banyak lulusan PGA (Pendidikan Guru Agama), maka ditempuh cara mengangkat para guru madrasah yang telah mengajar. Kebijakan ini tentu sangat menguntungkan kehidupan madrasah.

Akan tetapi, kebijakan itu berlangsung secara kontinyu, melainkan semusim itu saja. Selanjutnya, satu hal yang seharusnya diantisipasi adalah bahwa beberapa tahun terakhir ini guru-guru bantuan pemerintah tersebut, secara berangsur sudah memasuki masa pensiun. Pada gilirannya, jika benar bahwa tiang penyangga madrasah adalah guru bantuan pemerintah ini, maka dengan masuknya mereka pada usia pensiun, tidak mustahil akan diikuti pula oleh berhentinya napas madrasah swasta. Bagi madrasah yang bernasib terbelakang seperti itu, yang diperlukan bukan konsep-konsep bagaimana memenangkan kompetisi, membangun kepercayaan diri, kemadirian, dan seterusnya, melainkan uluran tangan agar memperpanjang gerak napas mereka. Jadi, persoalan mereka adalah sangat rill, yaitu bagaimana agar bisa sekedar membayar honorarium para guru,

yang besarnya minimal dapat digunakan untuk menyambung hidup diri dan keluarganya.

Oleh karena itu, program guru bantu yang beberapa tahun terakhir diperkenalkan oleh pemerintah sangat membantu madrasah. Sasaran bantuan-bantuan keuangan bukan saja siswa madrasah, melainkan yang lebih strategis adalah kehidupan para gurunya ini. Para guru bukan saja memerlukan disapa, ditatar, difasilitasi, tetapi yang lebih dari itu adalah dibantu kehidupannya. Hal ini penting karena, tampak sekali, para guru madrasah ternyata juga bukan selalu berasal dari kelompok ekonomi kuat.

Selanjutnya menganggap sederhana terhadap madrasah seperti ini tidak selalu tepat. Sebab ternyata, sekalipun belum ada kajian yang mendalam, ada kesan umum bahwa para lulusan madrasah seperti ini, ternyata dianggap cukup memadai oleh masyarakat. Sekalipun tergolong kategori terbelakang, mereka mampu mengantarkan lulusannya menjadi warga masyarakat yang tidak kalah dari lulusan lembaga pendidikan lain yang dianggap lebih maju. Bahkan dalam beberapa hal, memiliki kelebihan, misalnya dalam hal memimpin kehidupan keagamaan yang selalu dibutuhkan oleh setiap komunitas. Muslim lulusan madrasah akan lebih berani tampil di depan. Lulusan madrasah tidak sedikit yang menduduki posisi penting tingkat desa, dan bahkan lebih dari pada itu.

Sedangkan yang masuk kategori madrasah yang tumbuh, biasanya berada dalam lingkungan masyarakat yang menguntungkannya. Madrasah tipe ini biasanya berada diperkotaan atau pedesaan yang berekonomi kuat. Madrasah seperti ini, memiliki sumber pendanaan yang dikembangkan secara kreatif oleh para tokoh pendukungnya. Akan tetapi, sayangnya madrasah yang bernasib seperti ini jumlahnya tidak banyak.

Menurut Suprayogo, sesuatu yang diperlukan oleh madrasah yang termasuk kategori ini adalah bimbingan terhadap manajemen, kepemimpinan, peningkatan kualitas guru dan

insentif sebagi reward atas keberhasilannya membangun lembaga pendidikan.[143]

Kategori ketiga adalah madrasah maju. Madrasah ketegori ini pada umumnya berstatus negeri, atau madrasah yang dikelola oleh yayasan yang memiliki sumber pendanaan, manajemen dan kepemimpinan yang cukup kuat. Nuansa profesionalisme pada pengelolaan madrasah tipe ini lebih tampak daripada nuansa ideologis, yang juga tidak mudah dihilangkan.

Beberapa madrasah tipe ini, ada di hampir setiap kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Padang, dan Malang. Mereka sudah mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya, baik menyangkut dukungan masyarakat, penampilan fisik, manajemen, sampai pada prestasi akademik para siswanya.

Dari ketiga kategori madrasah di atas, menurut hemat penulis tampaknya madrasah kategori ketigalah yang merupakan madrash ideal saat ini. Madrasah yang betul-betul dipilih masyarakat dengan pertimbangan rasional dan berwawasan ke depan. Madrasah yang secara manajemen, performance, dan fasilitas menjanjikan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Islam itu sendiri. Hanya saja, belum semua madrasah negeri mengalami kemajuan seperti yang disebutkan di atas. Terutama madrasah negeri yang berada di pedesaan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor sebagaimana yang disebutkan di atas seperti lingkungan masyarakat yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya madrasah, manajemen kepemimpinan seorang kepala madrasah, juga dukungan pemerintah yang belum maksimal.

3) Persepsi Masyarakat pada Aspek Pilihan Lembaga Pendidikan

Berkaitan dengan aspek pilihan Lembaga Pendidikan, sekelompok masyarakat berpandangan bahwa keberadaan madrasah telah menyebabkan terjadinya dualisme pendidikan dan dikotomis antara pengetahuan "umum" dan "agama". Kelompok ini juga

[143] Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah*., h. 74

berpendapat madrasah cenderung mencetak warga negara yang eksklusif. Oleh karena itu, keberadaan dan sistem pendidikan madrasah perlu dipertanyakan kembali. Pada dasarnya pandangan dan penilaian kelompok ini terhadap madrasah tidak jauh berbeda dengan pandangan kaum penjajah kolonial ; penuh prasangka dan diskriminatif. Kelompok ini dengan vokal mencap madrasah sebagai faktor dominan dalam melestarikan dualisme pendidikan di Indonesia tanpa mau memahami latar belakang dan aspek historis dari keberadaan madrasah.

Karel A. Steenbrink dalam bukunya Pesantren, Madrasah, Sekolah melukiskan bahwa sesungguhnya sejak abad-abad pertama memperluas koloninya di Indonesia pemerintah kolonial Belanda telah memperlihatkan sikap diskriminatif terhadap sekolah Islam (madrasah) dibandingkan dengan sikapnya terhadap sekolah-sekolah kristen yang diselenggarakan oleh kalangan Missionaris dan Zending. Meskipun beberapa ahli Belanda merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam yang ada dan tersebar luas di lingkungan masyarakat Islam dimanfaatkan untuk mencerdaskan kaum pribumi, kenyataannya pemerintah kolonial Belanda selalu memilih jalur lain daripada menyesuaikan diri dengan pendidikan Islam. Salah seorang tokoh penting dari kalangan pejabat pemerintah kolonial Belanda yang menolak madrasah untuk dijadikan sebagai model pendidikan pribumi tercatat J.A. Van Der Chijs, yang pada waktu itu (1865) menjabat sebagai Inspektur Pendidikan Pribumi. Walaupun ia setuju kalau sekolah pribumi (maksudnya sekolah agama Islam) diselingi dengan kebiasaan pribumi, namun ia tidak menerimanya karena menurutnya kebiasaan yang dipraktekkan pada sekolah Islam (madrasah) tersebut terlalu jelek. Yang ia maksudkan dengan kebiasaan jelek itu terutama adalah metode membaca teks Arab yang hanya dihapal tanpa pengertian.[144]

Berkaitan dengan aspek pilihan lembaga Pendidikan ini, sikap masyarakat terbagi dalam tiga kelompok. *Pertama*, lebih memilih

[144]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, h. 108.

sekolah umum daripada lembaga pendidikan lainnya. Alasan mereka adalah sekarang ini hampir tidak ada perbedaan yang menonjol antara sekolah umum ataupun sekolah kejuruan dan madrasah. Sekolah-sekolah umum sekarang ini selain mengajarkan ilmu umum juga memberikan tambahan pelajaran agama dan juga pelajaran lain yang bersifat pembangunan *skill* atau ketrampilan seperti komputer, elektronika, dan Bahasa. Kelompok ini menyatakan bahwa di sekolah umum juga ada pendidikan agama. Selain itu siswa juga belajar agama ketika mereka di TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an), menurut mereka ini sudah cukup. Bahkan sebagian menambahkan bahwa dengan bersekolah di sekolah umum siswa lebih siap dalam menghadapi kelanjutan studinya di perguruan tinggi.

Kedua, memilih sekolah kejuruan dari pada lembaga pendidikan lainnya. Persepsi masyarakat dari kalangan orang tua/wali murid menunjukkan bahwa mereka lebih memilih sekolah kejuruan sebagai kelanjutan sekolah putra-putrinya ketimbang madrasah. Alasan mereka, di sekolah kejuruan siswa dididik dan disiapkan untuk menjadi siswa yang menguasai ketrampilan yang kemungkinan kelak menjadi pekerjaannya. Dengan demikian, siswa nantinya lebih berpeluang dalam memperoleh pekerjaan. Tentang pendidikan agama, kelompok ini menyatakan bahwa di sekolah kejuruan juga ada pendidikan agama. Jadi tidak ada masalah dalam pendidikan agama. *Ketiga,* informan memilih madrasah dengan alasan bahwa sekarang ini hampir tidak ada perbedaan antara sekolah umum dengan madrasah. Menurut mereka, madrasah sekarang ini selain menekankan pada pelajaran agama, madrasah juga mengajarkan ilmu umum secara proporsional. Bahkan madrasah juga ada tambahan pelajaran ilmu lain yang bersifat pembangunan skill atau ketrampilan seperti komputer, elektronika dan lain-lain.

Selain alasan tersebut di atas, alasan lain adalah bahwa dengan sekolah di madrasah, siswa selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ia juga memiliki integritas akhlak yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk hal kesempatan kerja,

mereka berpendapat bahwa sekarang ini, yang dapat menentukan apakah dapat kerja atau tidak adalah kemampuan dan ketrampilan dari masing-masing personal.

Persepsi masyarakat berkaitan dengan aspek pilihan lembaga pendidikan di atas juga sangat dipengaruhi oleh aspek kelebihan dan kekurangan yang dimiliki madrasah itu sendiri. keunggulan madrasah, yang paling menonjol adalah adanya penekanan khusus lembaga pendidikan madrasah dalam mengajarkan ilmu-ulmu agama, sehingga alokasi waktu yang disiapkan dalam kurikulum untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih banyak. Berbeda dengan di sekolah yang mata pelajaran agama hanya diberikan 2 jam saja/minggu.

Menurut budaya masyarakat Indonesia pada umumnya dan lebih khusus masyarakat yang tergolong masyarakat agamis-religius, masih sangat memandang perlu dan memperhatikan terhadap keberlangsungan pendidikan agama termasuk dalam hal ini adalah madrasah, sebab madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sampai saat ini masih senantiasa memberikan perhatian lebih besar pada aspek penanaman nilai-nilai agama, moral, dan akhlak anak didik.

Bahwa keunggulan madrasah yang paling langka dan tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain adalah diterapkannya pendidikan ganda di madrasah. Yang dimaksud pendidikan ganda adalah, adanya usaha proporsionalitas dalam pendidikan, yakni madrasah dan kurikulumnya berusaha untuk menyeimbangkan dalam transformasi ilmu pengetahuan antara ilmu-ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama. Bahkan sebagian yang lain mengatakan bahwa madrasah selain menyiapkan peserta didik agar terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, madrasah juga membangun dasar (*basic*) moral dan akhlak peserta didik dengan pendidikan agama (Islam) dengan lebih serius. Bahkan selain madrasah berusaha untuk menyeimbangkan kurikulum pendidikan agama dengan pendidikan umum, madrasah sekarang ini juga terus mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya agar benar-benar

dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Usaha-usaha madrasah dalam hal ini yakni melalui adanya tambahan pelajaran yang bersifat ketrampilan (*life skill*) atau keahlian peserta didik, misalnya ilmu komputer, bahasa asing dan lain-lain.

Sedangkan aspek kekurangan atau kelemahan madrasah, adalah rendahnya kualitas madrasah dibandingkan dengan sekolah umum. Sebagian masyarakat menambahkan bahwa rendahnya kualitas madrasah, salah satunya bisa dilihat dari kondisi madrasah yang memperihatinkan keadaan gedung, sarana dan prasarana. Kurang dikenalnya madrasah dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain adalah salah satu kelemahan atau kekurangan dari madrasah. Akibat dari kurang dikenalnya madrasah ini mengakibatkan pemahaman yang keliru terhadap madrasah. Selanjutnya pemahaman yang keliru terhadap madrasah ini mengakibatkan berkembangnya *imej* di masyarakat bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang tidak bermutu dan tidak menjamin masa depan siswa.

Dengan adanya kenyataan seperti ini madrasah mulai saat ini harus bekerja keras dan segera berbenah diri berusaha untuk meningkatkan kualitasnya dan selanjutnya madrasah harus dapat mensosialisasikan informasi yang benar tentang madrasah kepada masyarakat meskipun disadari bahwa hal ini bukanlah merupakan tugas yang ringan untuk dijalankan.

4) Persepsi Masyarakat tentang Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Favorit Pilihan Masyarakat

Dalam kaitan ini, terdapat dua pendapat. *Pertama*, menyatakan bahwa madrasah tidak bisa menjadi lembaga pendidikan favorit dengan alasan bahwa:

a. Adanya *image* yang berkembang dalam masyarakat bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan kelas dua.
b. Kurangnya sosialisasi dan informasi yang benar dalam berbagai hal tentang madrasah.

c. Mutu madrasah pada umumnya berada di bawah sekolah umum terutama madrasah swasta.

Sebagian masyarakat melihat keterbatasan bantuan dana yang ada menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah yang ada. Di samping itu, juga perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan madrasah saat ini, jangankan menjadi pilihan pavorit, jalan di tempat saja susah. Beberapa madrasah yang ada ini sudah tutup hanya gara-gara tidak ada lagi gurunya karena sudah pensiun, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengajar. Di samping itu, kecenderungan sebagian masyarakat memang lebih memilih sekolah karena gedung madrasah yang hanya sekedar apa adanya dan tidak mencerminkan sebagai lembaga pendidikan yang islami.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa madrasah bisa menjadi pendidikan favorit. Pendapat seperti ini memiliki alasan yang beragam, umumnya mereka berargumen bahwa pada dasarnya semua lembaga pendidikan mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi lembaga pendidikan favorit. Untuk menguatkan pendapat ini, beberapa syarat yang harus dipenuhi madrasah agar bisa menjadi lembaga pendidikan favorit. Agar madrasah bisa menjadi lembaga pendidikan pavorit harus memiliki beberapa syarat yaitu; 1) Madrasah harus meningkatkan kualitasnya baik fisik maupun non fisik agar tidak kalah dengan sekolah umum, 2) Madrasah harus dapat memberikan informasi yang benar dalam berbagai hal tentang madrasah misalnya tentang *output* madrasah, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, 3. Madrasah harus terintegrasi ke dalam sistem pendidikan pesantren. Dengan performansi madrasah seperti ini, akan mampu mengangkat citra madrasah di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat menjadikannya sebagai lembaga pendidikan pilihan pavorit.

Di samping pandangan tersebut, bahwa usaha-usaha untuk membangun dan mengembangkan madrasah ke depan harus benar-benar dilakukan karena masyarakat sekarang sudah mulai menerima madrasah, bahkan mereka memilih dan memasukkan

anaknya ke madrasah sebagai kelanjutan pendidikannya. Sebagai contoh, beberapa madrasah menjadi pilihan masyarakat karena terintegrasi dengan pesantren dan hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kyainya.

Selain itu, madrasah sangat berpeluang untuk menjadi lembaga pilihan pavorit masyarakat, sepanjang madrasah tersebut dapat di*manage* dengan baik dan profesional. Beberapa madrasah dalam beberapa tahun terakhir ini semakin diminati masyarakat yang tidak hanya kelompok masyarakat menengah ke bawah tetapi juga kalangan menengah atas. Lokasi sekolah yang strategis bukan satu-satunya yang menjadi faktor yang dijadikan alasan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan. Beberapa faktor lainya seperti, kualitas *output,* profesionalisme guru, dan manajemen kepemimpinan kepala sekolah ikut menentukan keberhasilan sebuah madrasah untuk menjadi *institution of choice* bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, sekelompok masyarakat memandang bahwa madrasah perlu dipertahankan sebagai suatu lembaga alternatif bagi umat Islam. Dengan fungsinya sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* atau suatu bentuk pendidikan yang berkarakteristik Islam, madrasah tetap diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan sumber calon mahasiswa yang akan memasuki UIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam, lulusan madrasah tetap menjadi tumpuan harapan. Sulit dibayangkan betapa mutu pendidikan di IAIN/UIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam lain, kalau inputnya hanya dari sekolah umum. Tetapi kelompok ini merasa prihatin dengan kenyataan yang dihadapi oleh madrasah. Ketenagaan baik kuantitas maupun kualitas di bawah standar.[145]

Sarana dan prasarana serta sumber belajar lain pada umumnya masih jauh dari memadai, terutama bagi madrasah-madrasah swasta. Dengan ketenagaan yang substandar dan dengan sarana yang kurang memadai itu, sulit diharapkan

[145]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, h. 108.

diperoleh mutu pendidikan yang benar-benar berkualitas pada madrasah. Selain itu, masalah yang lebih fundamental lagi; isi pendidikan madrasah cenderung menjadi sekolah umum. Menghadapi kenyataan tersebut, kelompok ini sering dihadapkan dengan langkah yang serba dilematis.

Kelompok ini juga berpandangan bahwa seiring dengan dinamika dan kemajuan zaman yang semakin mengglobal, madrasah sudah seharusnya lebih memantapkan identitas khas kelembagaannya, di samping tidak boleh menghindarkan diri dari kecenderungan mengisolasi diri dan mengeksklusifkan diri tanpa mau merespon perkembangan yang tengah terjadi di luar. Ini mengisayaratkan perlunya pem-benahan yang bersifat menyeluruh dalam diri madrasah secara kelembagaan. Karena siapa tahu di masa mendatang, madrasah lah yang menjadi sekolah pertama dan utama yang akan dituju oleh umat karena bagaimanapun umat Islam adalah umat mayoritas di negara ini.

Yang bisa digolongkan masuk ke dalam barisan kelompok terakhir ini cukup banyak, di antaranya A. Malik Fadjar, Mastuhu, Azyumardi Azra, Maksum dan beberapa nama lainnya. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan setting sosial politik di Indonesia, kebanyakan para pakar pendidikan Islam menaruh harapan yang optimis terhadap keberadaan madrasah disamping tetap kritis dengan mengupayakan jalan keluar yang terbaik bagi madrasah dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapinya.

5) Persepsi Masyarakat tentang Madrasah Ideal

Konsep madrasah bagi sebagian masyarakat sesungguhnya cukup ideal. Masyarakat, khususnya yang kental dalam beragama Islam, dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan menginginkan untuk mendapatkan pendidikan umum dan agama sekaligus. Mereka menginginkan agar putra-putrinya menjadi orang yang pintar sekaligus baik. Pintar di sini menurut Suprayogo dimaknai berhasil memperoleh pengetahuan umum, seperti Matematika, IPA, Bahasa Inggris, komputer, dan sejenisnya. Sedangkan menjadi

baik dimaknai mampu mengamalkan agamanya secara baik dan khusyuk.[146]

Kebutuhan tersebut ternyata lebih mungkin dipenuhi oleh lembaga pendidikan madrasah. Hanya saja yang menjadi persoalan ialah belum semua madrasah mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut sekaligus, sehubungan dengan kemampuan fasilitas dan pendanaannya yang serba terbatas. Oleh karena madrasah lebih bersifat mandiri, khusus yang berstatus swasta, tetapi berjumlah besar tidak dibiayai oleh pemerintah. Atas dasar pandangan masyarakat yang seperti itu, maka sangat mungkin madrasah yang berstatus negeri dan dikenal memiliki fasilitas dan guru cukup serta berkualitas baik, lebih menjadi pilihan masyarakat.

Persepsi masyarakat tentang madrasah ideal umumnya menyatakan bahwa madrasah yang ideal adalah madrasah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berkualitas, baik fisik maupun non fisik. Kualitas fisik ini meliputi: tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Sedangkan kualitas non fisik meliputi: guru yang profesional dan kompeten, serta kurikulum yang baik.
b. Biaya pendidikan yang terjangkau.

Pada umumnya masyarakat menempatkan aspek kualitas pendidikan sebagai prioritas utama sebagai pertimbangan dalam menentukan lembaga pendidikan yang ideal, lalu kemudian aspek biaya. Alasan mereka ini kurang lebih sama, yakni madrasah yang ideal adalah madrasah yang biaya pendidikannya terjangkau oleh masyarakat. Sebab sebagus apapun kualitas madrasah tapi kalau biaya pendidikannya tidak atau kurang terjangkau oleh masyarakat di mana madrasah itu berada, maka madrasah hanya akan menjadi pilihan alternatif.

Pandangan di atas, tidak secara rinci menyebutkan karakteristik madrasah yang ideal. Namun ia hanya

---

[146] Imam Suparayogo, *Quo Vadis Madrasah; Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah*, h. 9.

mengembalikan kepada pihak kementerian sebagai penyelenggara pendidikan atau yang mewadahi lembaga madrasah tersebut. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Bagaimana sesungguhnya konsep kemenag tentang madrasah ideal serta bagaimana pola kerjasama yang dibangun antara Kemenag kabupaten dengan pemerintah daerah. Dengan adanya konsep yang jelas dan pola kerjasama yang baik dengan pemerintah, akan terwujud madrasah yang ideal sebagaimana yang didambakan oleh semua lapisan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Madrasah

Permasalahan tentang persepsi masyarakat terhadap madrasah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang paling mendasar yang ada di masyarakat seperti persepsi dasar, kebutuhan dasar, kondisi perekonomian dan kesejahteraan serta lingkungan pendidikan. Berdasarkan kondisi yang ada, setelah dilakukan analisis *emik*, maka penulis menemukan beberapa hal mendasar yang menarik disajikan dalam bahasan ini tentang bagaimanakah sesungguhnya masyarakat memaknai madrasah selama ini? Mengapa terjadi ketahanan madrasah yang sedemikian kukuh, dan hal itu tidak selalu dialami oleh lembaga pendidikan pada umumnya?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mirip dengan pertanyaan yang mengusik perhatian Bahaking Rama[147] dalam pengantar bukunya, ia mengatakan bahwa; mengapa lembaga pendidikan pesantren di Indonesia tetap tumbuh, bertahan dan bahkan berkembang sangat maju di tengah-tengah kemajuan bangsa? Kedua lembaga pendidikan Islam ini (pesantren dan madrasah) dengan dukungan fasilitas dan pendanaan yang serba terbatas

---

[147]Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren; Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan,* (Cet. I; Jakarta: PT. Paradotama Wiragemilang, 2003), h. iv

ternyata memiliki kekuatan bertahan hidup yang sedemikian kuatnya, sehingga lembaga pendidikan Islam ini sekalipun sulit mengalami kemajuan akan tetapi memiliki ketahanan hidup yang luar biasa. Dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan Imam Suprayogo bahwa madrasah memiliki ciri: "tahan hidup tetapi sukar maju"[148].

Dalam kaitan ini, madrasah yang disebut-sebut sebagai lembaga pendidikan yang *marginal, second class* (kelas dua) atau *step child* (anak tiri), ternyata di beberapa tempat sampai hari ini masih tetap eksis, dipertahankan, dibela dan bahkan setiap tahun terdapat sejumlah madrasah yang jumlah muridnya meningkat.

Dengan melihat perkembangan jumlah siswa dari beberapa kasus madrasah di satu sisi, dapat dikatakan bahwa madrasah pada tempat-tempat tertentu mengalami peningkatan secara kuantitatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan dalam hal penerimaan siswa baru selama beberapa tahun terakhir. Meskipun secara kuantitatif telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun belum sepenuhnya tercapai sebagaimana harapan masyarakat secara kualitatif. Sebab, masih ada elemen-elemen penting lainnya yang ternyata masih memerlukan pemberdayaan, seperti kualitas SDM, kurikulum, manajemen kepemimpinan kepala madrasah dan komite madrasah masih belum memainkan fungsi dan perannya secara maksimal.

Beberapa faktor penyebab yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya madrasah sebagaimana yang terjadi pada beberapa madrasah yang dikemukakan di atas, tidak terlepas dari faktor semangat keberagamaan masyarakat kabupaten Soppeng yang masih tergolong tinggi, sehingga mereka lebih memilih madrasah sebagai *institution of choice* untuk kelanjutan sekolah putra-putrinya. Juga sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang madrasah sebagai lembaga yang mampu melakukan pembinaan akhlak dan moral anak, sehingga di madrasah tidak

[148]Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah,* h. 96

hanya dibekali dengan pengetahuan umum, tetapi juga pengetahuan agama sekaligus.

Di samping itu, juga tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan kharismatik seorang Kyai yang membina madrasah, sebagaimana yang terjadi pada beberapa pondok pesantren yang ada. Kharisma seorang kyai sebagai pimpinan pondok, sehingga bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak hanya bermukim di sekitar lokasi pondok pesantren tersebut tetapi juga mampu menjangkau masyarakat yang ada di daerah-daerah tetangga lainnya.

Pandangan masyarakat seperti itulah yang menjadikan madrasah memiliki ketahanan hidup yang kuat. Meskipun sebagian madrasah hanya memiliki sarana dan prasarana seadanya, namun masih mampu bertahan dan berupaya melakukan pembenahan demi sebuah kemajuan yang dicita-citakan. Jika mengacu pada teori sosiologi, bahwa sesuatu akan tetap bertahan sepanjang sesuatu itu memang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dalam kaitan ini, madrasah pada masyarakat tertentu, memang lebih dibutuhkan daripada lembaga pendidikan umum, sehingga madrasah tetap eksis di tengah-tengah masyarakat bagaimanapun keadaannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap madrasah, sebagai berikut:

1) **Faktor Ideologis**

Madrasah lahir dan berkembang di suatu wilayah, bukan semata-mata karena belum atau tidak tersedia lembaga pendidikan di wilayah itu sebelumnya. Sekalipun telah ada lembaga pendidikan, dan tidak juga kelebihan murid atau tidak ada sedikit pun halangan untuk memasukinya, tetapi tetap saja masyarakat mendirikan madrasah, sekalipun dalam keadaan yang serba berkekurangan. Sekalipun sudah ada sekolah umum, seorang atau beberapa tokoh yang didukung pengikutnya berpandangan bahwa madrasah harus tetap dibangun, apalagi jika di wilayah itu belum ada lembaga pendidikannya.

Fenomena madrasah bukan hal sederhana. Sekalipun pengelola madrasah mengetahui bahwa jika status madrasahnya ditingkatkan menjadi negeri akan lebih maju, oleh karena segala pendanaan, tenaga dan fasilitas lain dapat dicukupi tetapi belum tentu tawaran itu diterima. Pengelola madrasah sebagian menuturkan kekhawatirannya bila sebuah madrasah ditingkatkan menjadi negeri akan kehilangan otoritas dalam mengelola lembaga pendidikan Islam yang dianggap lebih sesuai dengan pandangan hidup mereka.

Oleh karena itu, sesungguhnya banyak aspek yang hidup dan berkembang di dalam diri madrasah itu sendiri yang harus dilihat, tatkala akan memasuki lembaga pendidikan Islam ini. Madrasah sebagai fenomena pedesaan, dalam arti sebagian besar madrasah lahir dan berkembang di desa, jelas sangat kental dengan hal-hal yang bersifat ideologis, tradisi dan budayanya masing-masing. Karena muatan ideologis yang biasanya melahirkan sifat tertutup, irasional, subjektif dan segala macam sifat sejenis itu, maka mendekati madrasah tidak selalu mudah. Karena muatan ideologis itu pula maka tidak semua pihak dapat memasuki wilayah itu, apalagi jika belum dikenali terlebih dahulu secara baik. Oleh karena itu, madrasah sesungguhnya ya madrasah. Karena bermuatan ideologis itu pula madrasah laiknya seorang anak kecil berbakat yang dilahirkan oleh keluarga miskin, jika hadir orang kaya mau mengambil alih tugas mendidik bayi berbakat itu, belum tentu sang orang tua merelakan dan segera memberikannya.

Selain itu, aspek lain yang menarik masyarakat terhadap madrasah, bukan selalu bersumber pada faktor kehebatan kurikulum, tenaga pengajar maupun juga sarana pendidikan lainnya yang tersedia. Sebutan madrasah, bagi sebagian masyarakat, sudah dianggap merupakan pilihan yang lebih tepat, sekalipun keadaannya sangat sederhana. Peminat madrasah, memutuskan pilihannya tidak selalu karena lembaga tersebut dianggap bermutu, tetapi bisa jadi hanya karena lembaga itu dinamai madrasah dan bukan sekolah. Fenomena ini tidak lepas dari persoalan ideologis dan juga kepentingan akan simbol-simbol

itu. Oleh sebab itu, memahami madrasah sekaligus juga bisa digunakan untuk melihat masyarakat, khususnya masyarakat Islam selama ini. Mereka masih bersifat ideologis dan juga mengedepankan sesuatu yang simbolik.

Gambaran seperti di atas, memberi pemahaman bahwa madrasah tidak selalu dapat didekati dengan pendekatan manajemen modern. Misalnya dengan mengembangkannya secara cepat, maka segera saja gurunya harus diganti, kepala madrasahnya diganti dan diambilkan dari sekolah umum yang lebih berpengalaman, atau dialihkan saja pembinaannya dari Kementerian Agama ke departemen lain yang lebih berkompeten dan seterusnya. Sebab, ada muatan ideologis, politis, budaya, sosiologis, sejarah, yang selalu menyertai perkembangan madrasah tersebut. Sebagian dari karasteristik madrasah seperti ini, tidak saja melekat pada madrasah, tetapi juga pada lembaga pendidikan Islam lainnya, termasuk pesantren, dan bahkan perguruan tinggi Islam.

Selanjutnya, muatan ideologis juga tidak selalu dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Sebab, justru dengan bernuansa ideologis itu, lembaga pendidikan Islam menjadi tahan hidup, meskipun pada saat yang sama sulit diajak maju dengan cepat. Dengan demikian, untuk mencari jalan keluar dari problematika yang dihadapi madrasah selama ini ialah bagaimana menjadikan madrasah secara bertahap menuju ke arah yang lebih terbuka, objektif dan rasional. Bagaimana nuansa yang lebih bersifat ideologis tersebut dapat diubah ke arah yang bernuansa ilmiah yang bercirikan keterbukaan, objektif, dan rasional.

2) Faktor Teologis

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah faktor teologis. Alasan ini didasarkan pada keinginan masyarakat untuk internalisasi nilai-nilai riligiusitas kepada putra-putrinya, agar memiliki kesiapan hidup untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Pertimbangan-pertimbangan teologis ini juga didasarkan pada pembacaan orang tua terhadap fenomana dunia sekarang ini

bahwa arus globalisasi dan informasi dan akibat penetrasi budaya asing menjadikan agama, moralitas menjadi permasalahan krusial, adanya kenakalan remaja, minum-minuman keras, budaya hidup hedonis, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, kejahatan, degradasi moral dan seterusnya, mengharuskan para orang tua dan masyarakat untuk membentengi para generasinya dengan moralitas agama. Dengan alasan 'agama' inilah masyarakat menjadikan madrasah sebagai alternatif pilihannya untuk kelanjutan pendidikan putra-putrinya.

Kualitas sebuah lembaga pendidikan tidak selamanya menjadi pertimbangan utama saat memilih sekolah. Sebagian orang tua/wali murid berpandangan bahwa, yang terpenting dalam sebuah sekolah adalah seberapa jauh lembaga pendidikan tersebut mampu melakukan pembinaan terhadap akhlak dan moral anak-anak mereka. Mereka lebih mementingkan pendidikan moral anak mereka, yang sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Menurut sebagian wali murid, prestasi tidak identik dengan prestasi akademik, seperti menjadi juara kelas, menang lomba, dan lain sebagainya, namun lebih ke arah menjadikan anak yang berperilaku baik, bermoral dan beriman. Definisi sekolah berkualitas menurut wali murid adalah sekolah yang dapat menggali potensi anak sesuai dengan kemampuannya dan sekolah yang dapat membentuk moral anak.

Sebab itulah menurut A. Malik Fadjar, bahwa salah satu pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan adalah didasarkan pada alasan agama, yakni sampai sejauh mana lembaga pendidikan bersangkutan mengaspirasikan pemenuhan 'kebutuhan' yang bersifat teologis tersebut di atas. Pertimbangan teologis biasanya juga didasarkan pada rasa *(sense)* emosional keagamaan, yakni lembaga pendidikan yang mengaspirasikan nilai dan agama yang dianutnya, juga didasarkan pada alasan-alasan yang mengarah pada simbol-simbol keagamaan, paham keagamaan, aliran, madzhab, organisasi keagamaan, dan seterusnya.

Oleh karena faktor teologis ini pula terdapat kelompok masyarakat menganggap penting untuk mempertahankan madrasah sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* murni.[149] Kelompok ini berpendirian bahwa sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* madrasah diharapkan tetap dapat berfungsi sebagai tempat menyiapkan kader-kader Islam yang mampu dan terampil sebagai pembimbing dan "praktisi" keagamaan dalam masyarakat. Mereka berpendirian bahwa alasan utama pihak orang tua untuk mengirim atau memasukkan anak-anak mereka ke madrasah adalah untuk belajar dan mendalami agama. Jaminan masa depan dan lapangan kerja bagi anak-anak mereka bagi kelompok ini tidak begitu dipermasalahkan.

Atas dasar pemikiran dan pandangan tersebut, kelompok ini menghendaki bahwa apapun langkah yang diambil dalam pembaharuan pendidikan madrasah seperti pembaharuan sistem pengajaran dan kurikulum, hendaklah tidak menggeser atau menghilangkan peran dan fungsi pokok madrasah sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien*. Bagi kelompok ini, apabila isi kurikulum madrasah sudah mengacu pada pendidikan sekuler dan aspek 'salaf'nya hilang dan dengan demikian madrasah tidak mampu lagi mengantarkan anak-anak mereka kepada penguasaan ilmu agama, maka mustahil bagi mereka untuk bersedia memasukkan anak-anak mereka ke madrasah. Menurut mereka, kalau ingin belajar dan mendalami pengetahuan umum mengapa tidak memilih sekolah umum saja yang kualitas dan fasilitas belajarnya relatif lebih baik dari madrasah.

Dari sisi lain, kelompok ini juga berpendapat bahwa secara historis madrasah adalah "identitas umat Islam Indonesia". Tatkala Indonesia ditindas selama berabad-abad oleh kaum penjajah, melalui lembaga pendidikan bernama pesantren dan madrasah, umat Islam Indonesia telah membuktikan diri mampu mempertahankan harga diri, martabat dan aqidahnya. Yang termasuk mewakili pandangan dari kelompok ini adalah mantan

---

[149]Ainunrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren,* h. 51.

Menteri Agama yang menjabat dua kali berturut-turut pada masa Orde Baru adalah Munawir Sjadzali. Beliau merupakan tokoh kunci dibalik kelahiran Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) yang di masa beliau masih bernama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK); sebuah "pilot project" Departemen Agama yang memberikan pelajaran 70 % agama dan 30 % umum.[150]

Program ini bertujuan untuk mencetak orang-orang yang memiliki spesialisasi keahlian di bidang agama yang berkaitan dengan dimensi ukhrowiyah atau dengan kata lain bertujuan untuk mencetak bibit ulama unggulan. Lulusan program ini diharapkan memenuhi target fungsi tradisional madrasah di masa lalu selain menjadi sumber daya manusia berkualitas bagi UIN. Tercatat sampai tahun 1998 sudah berdiri sekitar 156 MAK di mana hanya 26 saja di antaranya negeri (milik Kemenag) dan 130 lainnya swasta. Sebagian besar dari Aliyah swasta yang menyelenggarakan MAK itu adalah Aliyah di pesantren yang sudah punya asrama. Ini mengindikasikan tingginya partisipasi swasta maupun pondok pesantren yang sekaligus juga memperlihatkan tingkat antusias masyarakat dalam menyekolahkan anak mereka ke MAK. Ini terlihat dari banyaknya orang tua yang antri setiap tahunnya untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke MAK-MAK.

3) Faktor Sosiologis

Alasan ini didasarkan pada seberapa jauh lembaga pendidikan dapat memenuhi peran-peran sosiologis, seperti; peran alokasi posisionil berupa kedudukan dan peran penting dalam kehidupan sosial, memungkinkan terjadinya mobilitas sosial, peran mengukuhkan status sosial seseorang, dan peran untuk meningkatkan prestise seseorang di tengah-tengah masyarakat. Beberapa alasan masyarakat memilih madrasah dengan harapan kelak bisa memenuhi peran-peran sosial dalam masyarakat, misalnya menjadi Imam desa/kelurahan, guru mengaji,

[150]Ainunoafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, h. 51.

penceramah/muballig. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa meskipun anaknya tidak menjadi sarjana, akan tetapi ketika tamat di madrasah Aliyah misalnya sudah bisa memainkan perannya di tengah-tengah masyarakat, dan hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat mempunyai tekad agar anak-anaknya dapat bersekolah terus dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa akan datang. Mereka berpandangan bahwa orang yang mepunyai sekolah lebih tinggi dan menjadi pegawai, lebih dihargai dan dihormati dalam masyarakat. Apalagi bila mereka banyak mengetahui soal-soal keagamaan.

Sebagian berpendapat bahwa orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Selanjutnya dikatakan, tamatan sekolah umum lebih banyak kemungkinan yang terbuka untuk bekerja daripada tamatan sekolah agama. Informan ini melihat bahwa tamatan sekolah agama banyak yang menganggur, kalau bekerja pada umumya hanya sebagai pegawai honorer/guru bakti saja.

Namun demikian, sebagian yang lain tidak terlalu mempersoalkan anaknya supaya menjadi pegawai. Masyarakat yang berpandangan seperti ini memasukkan semua anaknya pada jalur pendidikan agama dengan maksud supaya lebih memahami ajaran agama. Soal mendapat pekerjaan atau tidak adalah soal kedua. informan ini yakin bahwa rezeki berada ditangan Tuhan, yang penting memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik.

4) **Faktor Fisiologis**

Alasan ini didasarkan pada faktor-faktor eksternal yang bersifat fisik, misalnya; letak dan kondisi geografis, bangunan fisik, lingkungan pendidikan, sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan, yang digunakan dalam sebuah lembaga pendidikan. Alimin mengatakan bahwa madrasah sangat berpeluang untuk

menjadi lembaga pilihan pavorit masyarakat, sepanjang madrasah tersebut dapat di*manage* dengan baik dan profesional. Beberapa madrasah belakngan ini semakin diminati masyarakat yang tidak hanya kelompok masyarakat menengah ke bawah tetapi juga kalangan menengah atas.

Lokasi sekolah yang strategis turut menentukan sebuah lembaga pendidikan menjadi pilihan masyarakat. Namun bukan satu-satunya faktor yang dijadikan alasan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan. Beberapa faktor lainya seperti, kualitas *output,* profesionalisme guru, dan manajemen kepemimpinan kepala sekolah ikut menentukan keberhasilan sebuah madrasah untuk menjadi *institution of choice* bagi masyarakat.

Pandangan masyarakat tentang madrasah ideal menunjukkan bahwa salah satu karakter madrasah yang ideal adalah memiliki kondisi fisik gedung, sarana dan prasarana yang memadai.

5. Faktor Akademis

Alasan ini didasarkan pada prestasi dan performa lembaga pendidikan yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tersebut dikelola secara profesional. Performa dan profesionalitas pengelolaan lembaga pendidikan akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya prestasi akademik dan lembaga pendidikan yang mempunyai prestasi yang tinggi, bagi masyarakat terpelajar, akan dikukuhkan sebagai lembaga pendidikan unggul, favorit dan menjadi lembaga alternatif pilihan masyarakat.

Masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa madrasah sangat berpeluang untuk menjadi lembaga pilihan pavorit masyarakat, sepanjang madrasah tersebut dapat di*manage* dengan baik dan profesional. Aspek akademis sebuah lembaga pendidikan seperti madrasah juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap madrasah.

Berikut ini adalah beberapa variabel yang mempunyai peranan dalam menimbulkan citra yang baik bagi madrasah:

a. Gedung. Gedung yang rapi, indah, dan memiliki fasilitas belajar yang memadai menimbulkan kesan bahwa madrasah yang bersangkutan adalah bonafid dan menjanjikan layanan pendidikan yang bermutu. Sebaliknya, gedung yang kurang terawat akan memberikan citra madrasah yang kurang terurus, tidak meyakinkan.
b. Guru. Guru yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan sesuai dengan bidang yang diajarkan akan memberikan kesan bahwa mutu layanan pendidikan di madrasah tersebut bagus. Sebaliknya, guru-guru yang kebanyakan bukan lulusan perguruan tinggi atau yang ijazah pendidikannya kurang sesuai dengan bidang yang diajarkan akan memberikan kesan 'guru cakupan' di madrasah tersebut.
c. Prestasi siswa dalam UAN. Adanya beberapa siswa yang berprestasi bagus dalam UAN akan mengangkat citra madrasah yang bersangkutan sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Citra itu akan lebih baik lagi kalau prestasi siswa itu dicapai dalam mata pelajaran umum, bukan pada mata pelajaran agama yang memang merupakan spesialisasi madrasah.
d. Kegiatan Olah Raga dan Kesenian. Adanya prestasi madrasah di bidang olah raga (misalnya pernah menjuarai kejuaraan tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya, atau propinsi), sedikit banyak, akan meningkatkan perhatian dan minat masyarakat terhadap madrasah tersebut.
e. Mutu Pendidikan Keagamaan. Walaupun ini sudah menjadi spesialisasi madrasah sehingga kalau madrasah unggul di bidang ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu hal yang luar biasa, kemenonjolan di bidang ini tetap merupakan daya tarik utama bagi masyarakat untuk memilih madrasah tersebut sebagai tempat pendidikannya (untuk anaknya).

6. Faktor Ekonomi

Alasan ini didasarkan pada tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pembiayaan pendidikan di lembaga bersangkutan. Bagi masyarakat menengah ke bawah

permasalahan biaya menjadi masalah penting, sebaliknya bagi masyarakat menengah ke atas, tingginya biaya pendidikan kadang menjadi ukuran bahwa lembaga pendidikan tersebut unggul, elit, prestise, dan menjanjikan. Sebab itu lembaga pendidikan dengan biaya mahal kadangkala menjadi alternatif pilihannya, dan sebaliknya bagi masyarakat bawah akan menjatuhkan pilihannya pada lembaga pendidikan yang relatif lebih murah. Alasan yang terakhir ini tidak terlalu menjadi persoalan bagi masyarakat secara umum untuk melanjutkan atau menyekolahkan putra-putrinya di madrasah.

D. Bentuk Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah

Perkembangan madrasah tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan Islam itu sendiri.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat terhadap madrasah, terdapat 4 pola yang mencerminkan bentuk partisipasi masyarakat terhadap madrasah yaitu partisipasi orang tua/wali murid, partisipasi masyarakat umum, partisipasi komite madrasah (KM) dan dewan pendidikan (DP), dan partisipasi alumni. Keempat bentuk partisipasi tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

1) Bentuk Partisipasi Orang Tua/Wali

a. Partisipasi dalam bentuk menyekolahkan anaknya di madrasah

Telah diuraikan sebelumnya bahwa madrasah merupakan fenomena pedesaan. Madrasah tumbuh dan berkembang di desa yang rata-rata kondisi sosial-ekonomi penduduknya tergolong rendah. Dengan kesibukan setiap hari, terutama yang hidup di pedesaan, seolah-olah mereka hanya terkosentrasi pada mempertahankan hidup dengan pekerjaan yang kurang menjanjikan masa depan.

Dengan kondisi seperti ini, anak bagi mereka merupakan harta yang sangat penting dalam menyokong kehidupan ekonomi keluarga. Tamat SD dianggap sebagai bentuk prestasi yang luar biasa oleh sebagian besar orang tua. Sebagain besar disamping karena biaya pendidikan juga penopang ekonomi keluarga, mereka melarang anaknya meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka memilih mempekerjakan anaknya di ladang, sawah sebagai buruh tani atau membantu mengelola ladang atau sawah milik orang tua.

Dengan kondisi seperti ini, bagi orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya ke tingkat menengah tidak memiliki cita-cita yang muluk-muluk, yang penting sekolah dapat mendidik anaknya menjadi orang baik. Pada umumnya orang tua di pedesaan tidak memiliki harapan yang bersifat ekonomis jika anaknya lulus dari sekolah. Ketika ditanya tentang perlu atau tidaknya menyekolahkan anak, pada umumnya mereka masih mempunyai pandangan bahwa sekolah itu penting tetapi kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan menyebabkan mereka kurang semangat menyekolahkan anak-anaknya. Mereka juga tidak melihat bahwa dengan sekolah yang tinggi anak dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Mengapa hal ini terjadi karena mereka banyak melihat fakta yang sudah ada di mana banyak anak yang lulus SMP dan sebagian SMA tetap bekerja membantu orang tua, kuli, jasa lain atau buruh tani di ladang orang lain.

Dari ungkapan-ungkapan di atas dan pernyataan para kepala madrasah sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, yaitu kesungguhan para kepala madrasah melakukan pendekatan kepada orang tua murid sejak murid tersebut masih duduk di MI/SD, mendorong orang tua agar mau menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu M.Ts/SMP, menunjukkan rendahnya partisipasi orang tua siswa terhadap madrasah. Ungkapan umum di lingkungan guru dan kepala madrasah adalah "yang penting sekolah" membuktikan adanya semangat sepihak dari pihak sekolah mendorong dan menjemput

siswa dengan segala resiko yang dipikul oleh sekolah. Sementara itu *"Assaleng massikolani"* (yang penting bersekolah)" sebagai ungkapan umum para wali siswa menunjukkan kepasifan perhatian orang tua siswa terhadap madrasah. Sikap pasif orang tua tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk penyerahan anaknya kepada sekolah saja melainkan juga keengganan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan sekolah.

b. Partisipasi dalam bentuk finansial, barang dan jasa

Partisipasi orang tua siswa dalam bentuk ini dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu: partisipasi finansial dalam bentuk sumbangan pendidikan; partisipasi finansial dalam bentuk amal jariyah melalui lembaga POMG; partisipasi finansial melalui amal Ramadhan, zakat, infaq, dan shadaqah; dan partisipasi dalam bentuk barang, berbelanja di koperasi, menggunakan dana tabungan siswa, dan peminjaman uang.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi tersebut di atas dapat diuraikan berikut:

Pertama, partisipasi finansial yang dilakukan dalam bentuk sumbangan pendidikan berupa: membayar uang formulir. Kemudian partisipasi finansial dalam bentuk amal jariyah POMG. Bentuk amal jariyah POMG dapat berupa iuran rutin perbulan bagi anggota POMG. Amal jariyah anggota POMG ini bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Karena besaran iuran sesuai kesepakatan masing-masing POMG, maka ada anggota POMG yang hanya beramal lima ribu. Namun ada juga beramal sepuluh hingga lima belas ribu rupiah. Pada umumnya orang tua siswa merasa tidak keberatan dengan adanya amal jariyah POMG secara khusus ini.

Partisipasi dalam bentuk ini dinilai oleh komite dan madrasah sangat strategi. Bentuk iuran model ini ternyata cukup efektif untuk menggalang partisipasi finansial. Karena hampir tidak ada orang tua siswa merasa keberatan atas pungutan ini, karena partisipasinya sesuai kesepakatan orang tua siswa. Efektifitas dan peran lembaga POMG menurut salah seorang ketua POMG.

Kemudian partisipasi finansial juga dapat dilakukan melalui amal ramadhan, zakat, infaq, dan sadaqah. Bentuk partisipasi ini dilakukan melalui santri yang bertugas di daerah tertentu di bulan Ramadan. Lazimya, setiap bulan Ramadan diedarkan amplop yang ditujukan kepada orangtua santri dan masyarakat umum untuk beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terutama di daerah yang dianggap menjadi basis santri. Partisipasi ini tidak akan jalan, jika tanpa dukungan penuh dari orang tua santri. Karena partisipasi dalam bentuk ini butuh pemahaman dan kesadaran. Hanya orang tua yang sadar dan peduli, serta merasakan apa yang dirasakan oleh madrasah yang kemudian mau mengeluarkan biaya tambahan tersebut.

c. Partisipasi orang tua dalam bentuk sumbangsi pemikiran, saran, dan kritik.

Partisipasi orang tua siswa, dalam bentuk ini, disalurkan melalui POMG. Ada juga orang tua siswa secara langsung menyampaikan keluhan dan masukan kepada Kepala Madrasah. Namun ada juga langsung kepada guru wali masing-masing. Sementara untuk Komite Madrasah, orang tua/wali santri jarang melakukan komunikasi, kecuali perwakilannya. Karena menurut penuturan orang tua santri, bertemu dengan komite itu hanya satu tahun sekali. Sehingga jarang orang tua menyalurkan aspirasinya melalui komite.

2) **Bentuk Partisipasi Komite Madrasah dan Dewan Pendidikan**

Ada empat fungsi Komite Madrasah sesuai amanah konstitusi yaitu: (1) memberi pertimbangan (*advissory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. *Kedua,* pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan. (4)

mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite madrasah mulai terbentuk akhir tahun 2002. Komite madrasah, terutama pada Madrasah Negeri, mereka rata-rata dianggkat melalui proses pemilihan, sementara pada madrasah swasta hampir semuanya dipilih melalui penunjukkan oleh wali siswa. Untuk madrasah-madrasah yang berada di daerah pedesaan, pemilihan dilakukan sangat sederhana yakni memilih orang yang dianggap paling baik di antara mereka yang datang pada saat pemilihan. Mereka rata-rata orang yang ditokohkan atau dianggap tokoh oleh masyarakat setempat. Ketokohan ini tidak dihubungkan sama sekali dengan kompetensi di bidang pendidikan. Di samping sumberdaya manusianya yang pas-pasan karena memang banyak dari mereka yang tidak berpendidikan formal yang cukup memadai. Karena itu di beberapa sekolah, komite sekolah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik misalnya menyampaikan kemauan wali siswa terhadap sekolah atau menyampaikan ide-ide dalam kerangka peningkatan sekolah.

Di beberapa madrasah, komite madrasah menempatkan dirinya berada di bawah struktur madrasah. Pandangan bahwa pihak madrasah (kepala madrasah dan guru) dianggap sebagai kelompok elit senantiasa menyelimuti pikiran mereka. Dengan perspektif semacam ini, komite madrasah cenderung menggantungkan diri pada pihak madrasah. Apa pun keinginan madrasah disetujui oleh komite. Selama ini terutama sekolah-sekolah di pedesaan, kegiatan komite madrasah tetap dimotori oleh pihak sekolah. Jika sekolah atau Dewan Pendidikan tidak mengadakan kegiatan sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah, maka hampir dipastikan tidak pernah akan ada kegiatan.

Kondisi semacam ini disebabkan karena tingkat SDM komite madrasah rata-rata rendah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan terpaksa menjadi ketua komite karena dipaksa oleh para wali murid di saat pemilihan pertama kali. Jadi peran dan fungsi komite masih jauh dari yang diharapkan baik oleh kepala sekolah maupun dinas pendidikan setempat. Jika ada yang

danggap agak aktif, itu tidak lebih dari sekedar membantu kepala sekolah melaksanakan program atau menata lingkungan sekolah. Hal ini terjadi sebagaimana komite sekolah pada salah satu madrasah swasta di kecamatan Lilirilau, ia bersama-sama atau membantu pihak sekolah membersihkan halaman sekolah dan menanam pohon di lingkungan sekolahnya.

Dari gambaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa komite madrasah belum melaksanakan tugasnya secara optimal untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu, layanan, tugas dan penggalangan partisipasi masyarakat untuk mendukung program yang dicanangkan dinas pendidikan dan kementerian Agama yaitu, perluasan, peningkatan mutu dan peningkatan kinerja. Kondisi demikian diakui oleh beberapa guru terkait kurangnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan di bidang pendidikan baik itu sasarannya murid atau guru yang dilakukan oleh madrasah maupun dinas pendidikan atau Departemen Agama. Sehingga banyak guru madrasah tidak ada usaha-usaha lain atau tertantang untuk memajukan madrasah yang lebih baik karena memang yang dihadapi ya itu-itu saja yang sifatnya rutin. Memang ada sebagian guru kurang puas dengan kondisi pendidikan semacam ini namun banyak juga yang merasa puas dengan kondisi lingkungan pendidikan yang ada. Karena itu hal seperti ini meniscayakan adanya gerakan pendidikan yang dimulai dari pemerintah, jika tidak muncul dari tokoh-tokoh pendidikan atau pengusaha. Sedikit berbeda dengan kota-kota lain yang bermunculan sekolah-sekolah unggulan yang dilakukan oleh tokoh pendidikan atau para pengusaha. Pada beberapa lokasi, jumlah SDM di bidang pendidikan sangat sedikit. Dari sini masyarakat ya bersikap biasa-biasa saja dalam urusan pendidikan.

Pandangan di atas jelas menunjukkan bahwa memang lembaga-lembaga partisipasi masyarakat sudah terbentuk di setiap satuan pendidikan seiring dengan adanya peraturan yang mengatur komite madrasah dan dewan pendidikan, namun semua itu hanya sekedar melengkapi administrasi organisasi dan belum

memainkan peran dan fungsinya secara optimal, sehingga terkesan bahwa tidak ada keseriusan pihak *stakeholder* untuk mengembangkan lembaga madrasah di masa yang akan datang.

Untuk partisipasi dewan pendidikan dapat digambarkan bahwa sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 2001, dalam bidang pendidikan pemerintah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan beberapa agenda/program nasional dalam bidang pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut, di samping merupakan program pendidikan nasional, maka pada tahun berikutnya disusul dengan dibentuknya Dewan pendidikan di berbagai daerah.

Pengurus Dewan Pendidikan juga tampak belum ideal karena masih belum mencakup seluruh komponen masyarakat yang ada. Mereka terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan praktisi pendidikan. Belum ada satu pun orang dari unsur pengusaha. Mengapa mengikutsertakan pengusaha dianggap penting, hal ini karena masalah pendidikan menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat termasuk para pengusaha yang ada. Dengan pemenuhan unsur-unsur tersebut diharapkan Dewan Pendidikan dapat melaksanakan tugasnya secara baik yaitu sebagai sumber ide, inspirasi, pengontrol, mitra diskusi dan kerja penggali partisipasi masyarakat, bagi dinas pendidikan.

Pada kenyataannya, Dewan Pendidikan cukup apresiatif terhadap program-program yang dicanangkan oleh dinas pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan melakukan kordinasi dan konsolidasi berkenaan dengan program-program pendidikan. Dari sejumlah pengurus yang ada, tampak hanya ketua dan sekretaris yang terlihat paling aktif berkonsultasi dengan dinas pendidikan.

Beberapa kasus yang terjadi pada beberapa tempat diakui oleh ketua Dewan belum mempunyai program unggulan atau strategis, baru pendataan dan sosialisasi, kecuali baru beberapa kali saja melaksanakan kegiatan berupa diskusi panel yang diikuti oleh praktisi pendidikan, pengusaha dan komite sekolah dan Komite Madrasah. Kedua, pembinaan dan pemantapan peran dan

fungsi komite sekolah dilaksanakan pelatihan bagi guru sekolah kejuruan. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas masih dalam kerangka untuk tujuan sosialisasi Dewan Pendidikan.

Disadari sepenuhnya oleh Dewan pendidikan bahwa seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan masih banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan, khususnya dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah penuntasan wajar Dikdas 9 tahun dan peningkatan layanan pendidikan siap kerja. Menurut Dewan Pendidikan untuk mewujudkan program itu perlu perencanaan yang mantap, matang dan cermat. Oleh karena itu sesuai dengan peran dan fungsinya Dewan Pendidikan akan terus eksis dengan komitmennya terhadap visi yang telah dicanangnya "pendidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Berangkat dari visi tersebut, maka disusunlah misi Dewan Pendidikan yaitu (1) memacu upaya penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 tahun, (2) memberdayakan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, (3) mendorong terwujudnya proses penyelenggaraan pendidikan yang professional, dan (4) mendorong terwujudnya lembaga pendidikan yang mandiri dan bertanggung jawab.

Cukup ideal misi yang diemban oleh Dewan Pendidikan untuk mengangkat derajat pelaksanaan pendidikan namun dalam implikasinya misi tersebut belum terlaksana secara optimal. Dewan Pendidikan belum mampu berbuat banyak mengingat persoalan pendidikan cukup kompleks, sehingga boleh dikata masih "berjalan di tempat". Karena untuk melaksanakan kegiatan secara mandiri cukup berat (dana dan SDM terbatas) maka Dewan pendidikan lebih banyak melakukan konsultasi dan mencari sokongan serta meminta pendapat dan pertimbangan dengan Dinas Kabupaten/kota jika ingin melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Komite madrasah pun masih bersifat pasif dan kegiatan-kegitannya menunggu program-program yang diadakan oleh dewan pendidikan. Dewan pendidikan pun diakui oleh ketuanya

masih belum berjalan secara maksimal begitu juga diakui oleh pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) nya. Bebrapa tahun terakhir, Dewan pendidikan dan komite madrasah baru dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru dan komite madrasah.

Fungsi dewan pendidikan sebagai mediator dan penyambung komunikasi bagi lembaga-lembaga lain memang sangat terasakan bagi pihak Diknas dan Kemenag, tetapi untuk membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih belum maksimal.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian di atas, potret pendidikan sekarang ini tidak dapat dilihat secara terpisah dengan faktor-faktor lain. Beberapa faktor yang dianggap cukup berpengaruh pada aspek tingkat partisipasi masyaraka adalah kondisi geografis, topografi, sosial-budaya, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dianggap cukup mempengaruhi antara lain yaitu lingkungan pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Jika dilihat kondisi masyarakat yang tinggal di kota masih dapat dikatakan cukup sejahtera tetapi lain halnya dengan penduduk yang tinggal di pedesaan, tingkat ekonominya relatif rendah.

Dari sekian faktor tersebut di atas, faktor kondisi ekonomi yang paling menonjol, baru diikuti faktor sumberdaya manusia, kondisi geografis, sosial ekonomi dan lainnya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap sekolah rendah. Dengan demikian maka tidak banyak hal yang bisa diberikan kepada madrasah. Meskipun tanpa dinyatakan alasan kekurangaktifan para pengurus Komite madrasah dan Dewan Pendidikan dalam menjalankan tugas dan perannya, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kendala-kendala internal dalam tubuh organisasi tersebut.

Dari gambaran di atas secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap madrasah disebabkan oleh faktor organisasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, komite sekolah dan Dewan pendidikan dengan kondisi

yang ada seharusnya bergerak lebih aktif baik dengan cara menggiatkan program masing-masing komite sekolah yang realistis sebagai mitra dinas sesuai fungsi dan perannya. Tanpa harus berbeda dengan misi pendidikan dinas pendidikan, kegiatan-kegiatan mandiri yang melibatkan masyarakat baik melalui komite sekolah maupun secara langsung kepada masyarakat perlu digalakkan. Satu hal lagi yang paling penting adalah menyusun program unggulan yang strategis namun realistik dan dibicarakan di tingkat pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bila mungkin segera membuat perda mengenai pendidikan. Dengan cara ini keberadaan Dewan Pendidikan dapat diperhitungkan oleh baik pemerintah daerah maupun masyarakat pengguna jasa pendidikan dan pada akhirnya Dewan pendidikan dapat melakukan fungsi dan perannya secara baik sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Dengan cara ini pemerintah daerah akan dapat mengubah kultur/budaya masyarakat yang selama ini menjadi faktor penyebab sikap dan pandangan mereka terhadap pendidikan. Mengubah budaya masyarakat yang "yang tidak ambisius, tenteram dan tenang" menjadi masyarakat yang mempunyai semangat dan cita-cita tinggi hanya dapat dilakukan melalui perbaikan bidang ekonomi dan pendidikan. Untuk itu sebaiknya antara pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha bekerja sama yang sinergis untuk membangun budaya baru yang lebih **dinamis dan prospektif.**

3) **Bentuk Partisipasi Lembaga Alumni**

Dalam berbagai kesempatan, peranan alumni dalam memajukan kualitas suatu institusi pendidikan formal sering terlupakan. Padahal, alumni merupakan aset penting yang harus dirangkul dan dikembangkan sedini mungkin.

Satu hal yang perlu disadari dan menjadi sebuah keniscayaan, semua siswa yang sukses menjalani masa pendidikan di madrasah pada akhirnya akan menjadi alumni.

Artinya, salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun berbagai bidang pekerjaan yang mereka jalani secara profesional sesuai minat dan kemampuan. Beberapa catatan penting terkait peranan alumni terhadap lembaga atau institusinya, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat diaktualisasikan secara nyata dengan baik dapat dilihat pada beberapa poin berikut:

Pertama, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang produktif di sekolah, alumni dapat berperan sebagai katalis dengan memberikan berbagai masukan kritis dan membangun kepada almamater mereka. Dalam hal ini, alumni memiliki posisi tawar yang unik dan strategis karena meskipun mereka tidak lagi merupakan bagian aktif dalam proses pendidikan di sekolah, namun pengalaman mereka selama menjadi siswa dan ikatan batin serta rasa memiliki mereka yang kuat terhadap almamater dapat menghasilkan dan menawarkan berbagai konsep, ide, pemikiran, masukan dan kritik membangun yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang berada di posisi mereka. Melalui berbagai media komunikasi yang dapat menjembatani sekolah dan alumni, proses pendidikan di sekolah diharapkan dapat berkembang dalam koridor yang lebih progresif dan terarah.

Kedua, sesuai peran alaminya, alumni yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang mumpuni dapat memainkan fungsi penting dalam membangun opini publik untuk menarik minat calon siswa baru. Alumni, disadari atau tidak, merupakan salah satu acuan utama yang mendasari keputusan para orang tua dan calon siswa dalam menentukan pilihan sekolah.

Logikanya, jika alumni dari suatu insitusi pendidikan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memasuki jenjang pendidikan tinggi favorit dan dapat menunjukkan prestasi dan kontribusi mereka secara riil di masyarakat, kualitas dan kuantitas calon siswa/i yang berminat untuk mendaftar akan meningkat.

Mata rantai ini, dengan didukung oleh sistem pendidikan internal sekolah yang baik, akan menghasilkan kesinambungan kualitas sumber daya siswa/i dan alumni yang berkualitas, memiliki daya juang tinggi dan semangat berkompetisi secara sehat.

Ketiga, alumni sebagai produk utama dari pabrik pendidikan bertajuk madrasah juga diharapkan mampu mengembangkan jaringan dan membangun pencitraan insitusi di luar. Pengembangan jaringan oleh alumni merupakan potensi strategis untuk membuka berbagai peluang dan meningkatkan daya saing suatu almamater pendidikan karena manfaatnya yang akan berdampak secara langsung pada siswa/i dan sesama alumni.

Penciptaan peluang usaha, kerja dan magang, kesempatan beasiswa, serta sirkulasi berbagai macam informasi penting seputar dunia pendidikan dan kerja merupakan beberapa contoh riil yang dapat dikontribusikan oleh alumni melalui jaringan yang dimiliki.

Dalam hal ini, salah satu wadah yang perlu ditumbuhkembangkan peran dan fungsinya serta didukung keberadaannya oleh pihak madrasah adalah ikatan alumni. Melalui pengorganisasian alumni secara profesional, berbagai macam peluang dan kesempatan akan dapat terkomunikasikan dengan baik.

Keempat, secara internal madrasah, keberadaan alumni di berbagai bidang usaha, lapangan pekerjaan dan institusi pendidikan dapat memberikan gambaran dan inspirasi kepada para siswa/i, sehingga pada gilirannya dapat memotivasi mereka dalam menentukan prioritas dan cita-cita ke depan.

Salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan acara semacam *“Stadium Generale”*. Dalam kegiatan ini, para alumni, di bawah koordinasi angkatan yang baru lulus, kembali ke sekolah secara rutin setiap tahunnya untuk mengadakan presentasi, tatap muka, diskusi dan membuka stand konsultasi yang akan menjelaskan mengenai berbagai pilihan

jurusan dan beberapa alternatif perguruan tinggi negeri dan swasta favorit kepada para siswa, dengan sasaran utama siswa/i kelas XII yang akan lulus. Para alumni yang telah bekerja juga diberikan kesempatan untuk dapat menjelaskan mengenai lingkup kerja mereka beserta tantangan yang dihadapi agar dapat memberikan gambaran mengenai dinamika dunia kerja.

Alumni mungkin hanya merupakan salah satu elemen dari sekian banyak faktor-faktor penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas dan kinerja suatu insitusi pendidikan. Namun, melihat potensi strategis dan luar biasa yang bisa digali dari keberadaan alumni, sudah saatnya pihak sekolah mulai merangkul kembali alumninya menyiapkan para siswa dengan persiapan yang matang untuk dapat menjadi alumni yang memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi untuk membesarkan almamaternya.

Kerjasama dan sinergi yang harmonis antara alumni dengan sekolah, siswa, dan orang tua siswa akan memiliki dampak yang besar bagi pengembangan sekolah secara berkesinambungan di masa mendatang.

Secara umum, partisipasi ulumni madrasah terhadap almamaternya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi memberikan support pikiran, saran, dan kritik terhadap almamaternya dan partisipasi dalam bentuk finansial. Partisipasi dalam bentuk memberikan support pikiran, saran, dan kritik terhadap almamaternya.

Bentuk partisipasi alumni terhadap almamaternya terwadahi melalui pembentukan organisasi alumni di setiap lembaga madrasah yang ada. Organiasasi ikatan alumni bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran berupa saran dan kritik demi pengembangan institusi ke depannya. Hanya saja peran yang diemban masing-masing oragnisasi alumni belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi organisasi ini dalam memainkan peran strategis untuk berkontribusi dan mengembangkan almamaternya ke depan adalah kurangnya kesadaran para alumni untuk berprtisipasi terkait pengembangan almamaternya.

Sehubungan dengan partisipasi alumni dalam bentuk materi atau finansial melalui wadah organisasi alumni juga ada namun nominalnya sangat terbatas. Partisipasi alumni dalam bentuk finansial lebih ditentukan oleh pihak pengelola madrasah sendiri dan hal tersebut disampaikan langsung oleh kepala madrasah di hadapan para alumni dan orangtua/wali dalam acara penamatan atau perpisahan.

E. Upaya Mendorong Masyarakat Berpartisipasi Terhadap Madrasah

1) Memperkenalkan Tipologi Madrasah kepada Masyarakat

Sepanjang pengalaman dan pengamatan penulis, perbincangan tentang madrasah sudah sangat sering dilakukan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Namun kesimpulan yang dihasilkan selalu menyatakan, madrasah harus dikembangkan dan dimajukan. Madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan yang secara konsepsional bagus, karena melalui madrasah dikembangkan potensi peserta didik lebih komprehensif, yaitu mengembangkan ranah spiritual, akhlak, ilmu pengetahuan dan keterampilan secara padu dan seimbang. Para pakar dan pemerhati madrasah pada umumnya juga memahami bahwa sebagian besar madrasah posisinya kurang teruntungkan oleh karena statusnya yang berada di bawah pengelolaan masyarakat (c*ommunity-based education).* Sementara saat ini pendidikan berbasis masyarakat sudah mulai memudar dan salah satu penyebabnya adalah memudarnya prinsip pendidikan berbasis masyarakat.[151]

Sesungguhnya tidak seluruh madrasah keadaananya lemah. Akhir-akhir ini sudah muncul di beberapa tempat madrasah yang maju, dan bahkan menjadi unggulan, melebihi sekolah pada umumnya. Madrasah semacam ini memang jumlahnya belum

[151]Sam M. Chan, *Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah,* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 130.

banyak, dan pada umumnya berstatus negeri, atau yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kota atau pun juga di desa yang didukung oleh masyarakat ekonomi kuat. Madrasah semacam ini diperebutkan oleh masyarakat sekalipun harus membayar mahal.

Dengan demikian, memperbincangkan lebih lanjut tentang madrasah, apalagi terkait dengan upaya-upaya pengembangannya, semestinya membedakan antara madrasah yang tertinggal, madrasah yang sedang tumbuh dan madrasah yang sudah maju. Madrasah yang tertinggal, yang jumlahnya paling besar, terutama berada di pedesaan. Memang begitulah, madrasah merupakan gejala desa. Keadaannya, sebagian besar masih sangat sederhana untuk tidak menyebut sangat memprihatinkan. Siapa saja yang berkesempatan menelusuri banyak desa di Indonesia, terutama yang berkomunitas muslim, selalu menemukan madrasah yang keadaannya sangat memprihatinkan. Bangunannya sederhana, fasilitas pendidikan, kurikulum termasuk para gurunya berjalan apa adanya. Kesederhana itu, lebih-lebih tampak lagi bagi madrasah yang berada di masyarakat miskin. Akan tetapi anehnya, lembaga pendidikan seperti itu, masih didukung dan diminati sebagian masyarakat.

Para guru madrasah tertinggal ini, biasanya, selain terdiri atas beberapa guru bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas, juga berasal dari tenaga honorarium yang tidak masuk akal. Dikatakan tidak masuk akal karena jumlah honor yang diterima pada umumnya amat kecil. Pada beberapa tempat, tidak sulit ditemukan seorang guru madrasah tetap, hanya berhonor Rp 200.000, -/bulan, dan bahkan ada yang lebih sedikit daripada jumlah itu. Pemberian honor kecil itu, bukan karena pihak pengurus madrasah bersifat pelit, melainkan semata-mata karena tidak tersedianya dana. Inilah gambaran keadaan sebagian besar madrasah.

Beberapa guru bantuan pemerintah yang diperoleh madrasah swasta di beberapa tempat yang diangkat sekitar pada awal tahun

1965-1970-an, atas dasar lulusan UGA (Ujian Guru Agama), sudah meamasuki masa pensiun.

Bagi madrasah yang bernasib terbelakang seperti ini, yang diperlukan bukan konsep-konsep bagaimana memenangkan kompetisi, membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan seterusnya, melainkan uluran tangan agar bisa memperpanjang gerak napas mereka. Jadi, persoalan mereka adalah sangat riil, yaitu bagaimana agar bisa sekadar membayar honorarium para guru, yang besarnya minimal bisa digunakan untuk menyambung hidup diri dan keluargarnya. Oleh karena itu, program guru bantu yang beberapa tahun terakhir diperkenalkan oleh pemerintah akan sangat membantu madrasah. Sasaran bantuan-bantuan keuangan bukan saja murid madrasah, melainkan yang lebih strategis adalah kehidupan para gurunya ini. Para guru bukan saja memerlukan disapa, ditatar, difasilitasi, tetapi yang lebih dari itu adalah dibantu kehidupannya. Hal ini penting karena, tampak sekali, para guru madrasah ternyata juga bukan selalu berasal dari kelompok ekonomi kuat.

Selanjutnya menganggap sederhana terhadap madrasah seperti ini tidak selalu tepat. Sebab, ternyata, sekalipun belum ada kajian yang mendalam, ada kesan umum bahwa para lulusan madrasah seperti ini, ternyata dianggap cukup memadai oleh masyarakatnya. Sekalipun tergolong kategori terbelakang, mereka mampu mengantarkan lulusannya menjadi warga masyarakat yang bisa jadi, tidak kalah dari lulusan lembaga pendidikan lain yang dianggap lebih maju. Bahkan dalam beberapa hal, memiliki kelebihan, misalnya dalam hal memimpin kehidupan keagamaan yang selalu dibutuhkan oleh setiap komunitas. Muslim lulusan madrasah akan lebih berani tampil di depan. Lulusan madrasah tidak sedikit yang menduduki posisi penting tingkat desa, dan bahkan lebih dari itu.

Sedangkan yang masuk kategori madrasah yang tumbuh, biasanya berada dalam lingkungan masyarakat yang menguntungkannya. Madrasah tipe ini biasanya berada di perkotaan atau pedesaan yang berekonomi kuat. Madrasah

seperti ini, memiliki sumber pendanaan yang dikembangkan secara kreatif oleh para tokoh pendukungnya. Kreativitas masyarakat seperti ini yang dapat membantu menghidupkan madrasah, sehingga madrasah tidak mengkhawatirkan kelanjutan hidupnya. Akan tetapi, sayangnya madrasah yang bernasib seperti ini jumlahnya tidak banyak. Sepanjang pengamatan penulis dalam berkunjung ke beberapa tempat untuk bersilaturahmi ke madrasah-madrasah yang ada di kabupaten Soppeng, jumlahnya sangat kecil dan masih sulit ditemukan. Madrasah seperti ini, kira-kira yang diinginkan oleh konsep baru sebagai madrasah yang telah melaksanakan "Manajemen Berbasis Masyarakat" itu. Sesuatu yang diperlukan oleh madrasah yang masuk dalam kategori ini adalah bimbingan terhadap manajemen, kepemimpinan, peningkatan kualitas guru dan insentif sebagai reward atas keberhasilannya membangun lembaga pendidikan.

Kategori ketiga adalah madrasah maju. Madarasah kategori ini pada umumnya berstatus negeri, atau madrasah yang dikelola oleh yayasan yang memiliki sumber pendanaan, manajemen dan kepemimpinan yang cukup kuat. Nuansa profesionalisme pada pengelolaan madrasah tipe ini lebih tampak daripada nuansa ideologis, yang juga tidak mudah dihilangkan. Pada level nasional, beberapa madrasah tipe ini, ada di hampir setiap kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Padang, dan Malang. Mereka sudah mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya, baik menyangkut dukungan masyarakat, penampilan fisik, manajemen, sampai pada prestasi akademik para siswanya. Di Malang misalnya, madrasah dipandang sebagai sekolah unggul dan diperebutkan oleh masyarakat sekalipun dengan memasang tarif melebihi sekolah umum lainnya di Malang. Madrasah seperti ini yang dicita-citakan bersama. Hanya saja, belum semua madrasah negeri mengalami kemajuan, sebagaimana sekolah umum yang berstatus Negeri juga tidak semua maju. Rupanya banyak faktor yang menjadikan antara madrasah satu dengan lainnya berbeda-beda. Lingkungan masyarakat, manajemen, kepemimpinan,

dukungan pemerintah setempat, ikut berpengaruh terhadap maju tidaknya lembaga pendidikan Islam ini.

Mempertimbangkan keadaan madrasah dengan berbagai tipe seperti dikemukakan di atas, belum lagi melihat sosiokultural yang melekat pada madrasah, maka menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang kompetitif, percaya diri dan mandiri terasa tidak mudah. Langkah-langkah yang harus ditempuh tidak cukup dengan menyusun pikiran-pikiran dan juga modal besar, misalnya dengan meningkatkan gaji guru, atau memilih alternatif lain, yaitu menggantinya dengan guru yang lebih baik, meningkatkan anggaran, menyediakan kurikulum yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, dan seterusnya. Semua itu penting, tetapi juga tidak mungkin dilakukan sedemikian cepat. Jumlah madrasah tidak sedikit, menurut data statisitik yang ada di Kementerian Agama tidak kurang dari 18% dari seluruh lembaga pendidikan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian, pemahaman bersama, dan juga dukungan keputusan politik. Oleh karena itu, tidak mudah diwujudkan karena memerlukan perjuangan berat dan memerlukan waktu yang cukup panjang.

Bagaimana pun kondisinya, madrasah tetap diperlukan oleh masyarakat. Mengabaikan madrasah sama artinya dengan mengabaikan sebagian bibit-bibit anak bangsa yang sedang tumbuh, yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Apalagi keberadaannya sudah dijamin oleh undang–undang. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah "perlakuan yang sama" terhadap seluruh lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah ini. Selayaknya bangsa ini sudah harus memandang sama dengan berbagai konsekuensinya terhadap pendidikan yang dipandang memenuhi kebutuhan dasar. Membedakan perlakuan terhadap jenis lembaga pendidikan -madrasah dan sekolah umum, negeri atau swasta, atau membedakan antara yang berada pada pengelolaan departemen yang berbeda, sudah tidak tepat lagi. Aneka ragam jenis lembaga pendidikan madrasah dan sekolah umum harus dipahami sebagai refleksi dari warga bangsa ini yang ber-Bhineka Tunggal Ika. jika saja selama ini terdapat lembaga

pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, semestinya dianggap sebagai produk dari fenomena sejarah dan sosiologis masa lalu saja. Ke depan seharusnya diberlakukan sama.

Madrasah yang berstatus swasta yang jumlahnya justru lebih besar, tidak kurang 90% dari keseluruhannya, yang pada umumnya berkeadaan sangat lemah, disebabkan oleh keterbatasan dana, fasilitas maupun pendukung lainnya, maka perlu strategi tepat untuk menolong kehidupannya. Kekuatan utama lembaga pendidikan, berada pada posisi gurunya. Peran guru tidak dapat digantikan orang lain. Karena itu guru, diakui sangat strategis dalam semua aktifitas pendidikan. Imam Suprayogo selalu mengatakan bahwa siapa saja yang ingin membangun bangsa maka bangunlah pendidikannya. Dan barang siapa ingin membangun pendidikan, maka muliakanlah guru-gurunya." Para guru madrasah, lebih-lebih yang berstatus guru honorarium, merasakan sebuah posisi yang mulia, tapi dari sisi keadaan ekonominya sangat menderita. Di antara mereka yang memiliki idealisme tinggi untuk memperjuangkan keyakinannya yang dianggap benar sebagai pendidik agama, dan sebagian lagi mungkin mengajar karena didorong oleh kenyataan sulitnya mencari pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi, apa pun motivasi yang berada di benak masing-masing, tokoh mereka telah meng-abdi di dunia pendidikan, lapangan yang sangat strategik untuk menyiapkan generasi bangsa mendatang. Jika para guru madrasah sekalipun tidak diangkat menjadi pegawai negeri yang hal itu memang membutuhkan anggaran besar tetapi setidaknya mereka diberi imbalan yang cukup, sekurang- kurangnya untuk biaya hidup keluarga mereka sehari-hari, terutama bagi mereka yang menyerahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk kehidupan madrasah. Sebagian madrasah swasta, yang sejak beberapa tahun terakhir mulai ditinggal pensiun massal oleh para guru yang berstatus PNS angkatan UGA tahun 1970-an, memerlukan perhatian pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan di bidang ini.

Bahwa pengembangan madrasah, terutama yang berstatus swasta, jika hanya akan ditempuh dengan pilihan strategi memperkukuh kekuatan internalnya, akan berjalan lamban dan mungkin tidak banyak memberi arti apa-apa. Sebab pada hakikatnya, kekuatan internal yang berkaitan penyediaan dana apalagi madrasah di lingkungan masyarakat ekonomi lemah, tampaknya sulit dikembangkan. Konsep yang ditawarkan akhir-akhir ini dengan nama "Manajemen Berbasis Masyarakat", sepanjang hal yang menyangkut pemenuhan pendanaan, hanya mungkin terpenuhi jika lembaga pendidikan itu, setidak-tidaknya berada di masyarakat yang kuat secara ekonomi. Akan tetapi, jika konsep itu ditawarkan pada masyarakat ekonomi lemah, maka konsep itu tidak terlalu bisa diharapkan dapat berjalan.

Keadaan seperti itu, mau tidak mau harus memilih strategi berupa memperkokoh faktor eksternal madrasah yang seharusnya menjadi kekuatan penyangganya. Kekuatan eksternal yang dimaksud adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedua belah pihak harus saling memperkukuh, dan justru tidak saling melempar tanggung jawab. Pemerintah daerah berdalih bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan, sedangkan pemerintah pusat, mengira jika kebutuhan madrasah juga telah dicukupi oleh daerah sebagaimana mengurus pendidikan di daerah pada umumnya. Akhirnya, madrasah menjadi bertambah sengsara, tidak ditopang oleh kedua-duanya, baik pusat maupun daerah.

Mengembangkan madrasah agar menjadi kompetitif, mandiri dan percaya diri bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Selama ini tipe ideal itu sesungguhnya sudah mulai tampak, muncul di beberapa wilayah nusantara ini. Madrasah yang meraih prestasi itu memang ditopang oleh kekuatan eksternal madrasah, yaitu pemerintah karena lembaga itu berstatus negeri atau didukung oleh yayasan pengelolanya. Sedangkan bagi madrasah yang tidak didukung oleh kekuatan eksternal yang kukuh, keadaannya berjalan apa adanya. Akan tetapi, oleh karena madrasah menyimpan kekuatan berupa

idealisme, cita-cita, semangat mengabdi, dan berkorban yang luar biasa, maka mereka masih tetap akan hidup, sekalipun sulit untuk mengalami kemajuan.

Oleh karena itu, untuk dapat sampai ke posisi madrasah yang berpredikat prospektif bagi masa depan dan sekaligus yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang mungkin timbul, diperlukan kerja keras melalui pemikiran yang konseptual sistemik oleh tangan-tangan yang profesional, dedikatif, dan penuh tanggung jawab serta didasari oleh semangat jihad untuk berbakti kepada Allah swt.

Meskipun madrasah memiliki struktur organisasi yang formal namun tidak berarti harus kaku dalam membina hubungan kerja dengan siapapun. Sikap pimpinan madrasah yang mampu membawa ke suasana kemitraan dalam bekerja akan membawa ke suasana madrasah yang kondusif yang menyenangkan. Kesabaran, ketelitian, keuletan, sikap mental yang membaja, kontribusi, partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak merupakan kekuatan yang amat sangat berharga untuk menjawab berbagai tantangan dalam mengelola dan mengembangkan madrasah.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, secara teknis operasional dalam mengelola madrasah dituntut kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Senantiasa memelihara dan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme dari seluruh personil madrasah dengan berbagai cara yang terbuka dan dimungkinkan. Kualitas kepemimpinan dan profesionalisme ini akan menjadi pilar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan roda misi dan tujuan madrasah.

b) Membuat perencanaan yang komprehensif tentang pengelolaan dan pengembangan madrasah yang menyentuh berbagai aspek dan memiliki visi jauh ke depan sehingga dapat ditemukan konfigurasi total tentang keberadaan madrasah yang memenuhi standar kualitas.

c) Mengidentifikasi seluruh komponen yang ada dan diperlukan bagi eksistensi dan kelangsungan penyelengaraan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang prospektif dan kredibel.
d) Menganalisa kekuatan dan kelemahan setiap komponen madrasah termasuk identifikasi faktor pendukung atau penghambatnya dalam konteks implementasi dan optimalisasi fungsi.
e) Melakukan pendekatan dan merumuskan sejumlah program operasional berdasarkan analisa SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, hambatan) sehingga setiap komponen yang ada dapat ditempatkan secara proporsional dan dijadikan kekuatan yang bernilai positif.
f) Melakukan verifikasi atas komponen program dan sekaligus menetapkan pentahapan dan skala prioritas setelah dikombinasikan dengan unsur daya dukung implementasi program dan intensitas kepentingan untuk pengembangan madrasah.
g) Mengimplementasikan program dengan disertai pengendalian dan kontrol yang memadai demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan dapat dipertanggugjawabkan.
h) Melakukan evaluasi secara sistemik dan bertahap terhadap setiap pelaksanaan program yang dikaitkan dengan program tindak lanjut dengan alternatif kemungkinan, kesinambungan, perubahan, penguatan, penghentian, pergantian dan sebagainya.
i) Memanfaatkan peran serta dan kontribusi potensi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, daya dukung, evaluasi program serta kegiatan tindak lanjut. Wawasan yang luas dan komprehensif dan kepekaan yang didukung oleh ketajaman berfikir merupakan prakondisi yang diperlukan untuk mampu melakukan prediksi dan antisipasi yang bersifat pro aktif terhadap kemungkinan dan kecenderungan serta tantangan masa depan. Abad ke 21

yang diprediksi sebagai era kehidupan yang bakal penuh dengan dinamika, persaingan dan sekaligus intervensi dan ancaman, merupakan arena yang memerlukan kajian dan sikap bertindak yang disertai kehati-hatian dalam kadar yang tinggi. Namun di balik semua itu era kehidupan di abad tersebut menuntut keberanian mengambil keputusan untuk bertindak dan berbuat sesuatu secara tepat. Hanya manusia-manusia yang berkualitas yang akan mampu melakukan semuanya itu, selanjutnya madrasah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka.

2) Mengoptimalkan Peran POMG, Komite Madrasah, Dewan Pendidikan, dan Organisasi Alumni

a. Peran Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG)

Kajian tentang hubungan masyarakat dengan madrasah sebagaimana yang digambarkan pada pembahasan sebelumnya, tampak bahwa partisipasi dan peran masyarakat belum maksimal.

Sudah sejak lama di lingkungan lembaga pendidikan terdapat Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG) di masing-masing madrasah, namun fungsi dan peran dimainkan organisasi tersebut dalam meningkatkan kualitas madrasah masih terkesan apa adanya dan tidak maksimal. POMG ini keanggotaannya terdiri atas para wali murid yang seharusnya memiliki peran membantu madrasah di dalam meningkatkan kualitasnya, terutama yang terkait dengan pengumpulan pendanaan yang diperlukan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Pendanaan yang dimaksudkan itu sesungguhnya dalam praktiknya dikumpulkan sebatas dari para wali murid. Mengapa menggunakan POMG? bukankah kepala madrasah yang bersangkutan mampu melakukan peran itu? Jawabnya adalah, agar kepala sekolah tidak terlibat hal-hal yang menyangkut keuangan, sehingga lebih konsentrasi untuk menangani peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, strategi ini dipilih agar ada keterlibatan langsung pihak wali murid dalam penyelenggaraan pendidikan.

Konsep melibatkan masyarakat dalam wadah POMG ini dilihat dari tanggung jawab pendidikan sesungguhnya sangat ideal. Hanya dalam kenyataannya, tidak semua organisasi tersebut berjalan dengan baik. Lagi pula, peran organisasi yang melibatkan orang tua siswa ini pada umumnya hanya sebatas pengumpulan dana yang diperlukan oleh masing-masing madrasah, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana fisik dan hal lain di seputar itu yang diperlukan oleh madrasah. Madrasah yang memiliki organisasi POMG dan orang-orangnya cukup paham terhadap misi dan visi pendidikan, ternyata memang dapat mengalami kemajuan. Akan tetapi, sayang tidak sedikit POMG yang keberadaannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan formal, sehingga adanya sama dengan tidak adanya (*wujuduh ka'adamih*).

School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah, MBS), adalah salah satu format tawaran baru yang diajukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai konsep impor dari negara *paman Sam*, konsep MBS merupakan bentuk alternatif bagi program desentralisasi bidang pendidikan yang ditengarai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, tingginya partisipasi masyarakat. Logika yang ditawarkan, otonomi diberikan agar sekolah dapat lebih leluasa mengelola sumber daya yang dimilikinya, mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritasnya, lebih dari itu mendatangkannya untuk dapat menyokong keberhasilan pendidikan di sekolah. Tawaran ini menuntut masyarakat untuk lebih aktif dalam memahami, membantu dan mengontrol proses pendidikan yang diselenggarakan sekolah, serta meminta pertanggungjawaban sekolah atas proses pendidikan yang diselenggarakannya. Pertanyaannya adalah, siapkah komponen-komponen *stakeholders* untuk mengambil peran dalam proses tersebut? dan jika merujuk pada konsep *tripusat* 3 *pendidikan* yang diajukan Ki Hadjar Dewantara, ketiga komponen sekolah, masyarakat dan keluarga memiliki konsekuensi yang sama untuk menjaga

keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan serta pencapaian tujuan pendidikan. Mengingat hingga hari ini, masyarakat Indonesia belum seluruhnya tuntas dari persoalan krisis moneter, lantas haruskah sisi kualitas untuk sementara cukup diagendakan –tanpa sempat dilaksanakan-? Tentunya hal tersebut tidak kita harapkan, lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah peran kongkrit masyarakat yang diwujudkan dalam organisasi POMG- dalam peningkatan kualitas pendidikan?

Dalam sistem pendidikan yang telah mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh sekolah (*Community-Based Education*), maka POMG (yang terdiri atas wakil orangtua dan masyarakat) akan lebih banyak berperan. Meski disadari bahwa saat ini posisi POMG (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) adalah sebagai mitra sekolah dalam menggalang partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pendidikan. Namun secara faktual, peran yang diembannya sekadar peran mengumpulkan dan melegitimasi kebijakan pengumpulan dana.

Hadirnya konsep MBS, dimaksudkan untuk lebih memberdayakan sekolah bersama *stakeholders*-nya untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki. Dengan begitu, dibutuhkan peran aktif para *stakeholders* dalam pengembangan kualitas sekolah. Persoalannya adalah, saat ini tidak jelas lagi siapa *stakeholders* sekolah kita? Orang tua murid melalui organisasi POMG, organisasi guru, LSM di bidang pendidikan, masyarakat dengan para tokoh-tokohnya, secara ideal menjadi *stakeholders* sekolah.

Namun pada perjalanan proses pendidikan, terjadi reduksi institusi pendidikan, sehingga saat ini sekolah sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab atas kelancaran pendidikan. Masyarakat dan orang tua -dengan institusi POMG- merasa telah mendukung penyelenggaraan manakala telah selesai memberi sumbangan finansial pada sekolah, selebihnya entahlah? Dengan begitu pada kenyataan sejarah, proses peningkatan mutu pendidikan pada akhirnya seluruhnya

diserahkan pada sekolah, merah hitam kualitas sekolah merupakan mutlak kebijakan sekolah, benarkah? Secara empiris, fungsi yang diemban POMG saat ini adalah sebagai kepanjangan tangan sekolah dalam penentuan besarnya sumbangan yang harus diserahkan orang tua siswa (terlebih pada saat tahun ajaran baru). Lantas untuk melegitimasi keputusan itu diadakanlah pertemuan antara orang tua siswa, POMG dan madrasah. Ironisnya keputusan-keputusan penting tentang besar-kecilnya sumbangan dana sering telah ditetapkan sebelum pertemuan diselenggarakan. Akhirnya pertemuan itu, hanya berfungsi untuk sekadar pengesahan keputusan yang telah dibuat. Persoalan peningkatan mutu secara detil jarang dibicarakan secara intensif, hingga orang tua sering tidak memahami kondisi riil madrasah.

Harus diakui, bahwa dana merupakan salah satu titik lemah pada kebanyakan institusi pendidikan, terlebih bagi institusi pendidikan sekolah-sekolah agama (madrasah). Untuk madrasah, antara institusi yang dikelola pemerintah (MIN/M/TsN/MAN) dengan yang dikelola yayasan masyarakat lebih banyak yang dikelola oleh yayasan masyarakat. Tentu saja, persoalan dana kerap menjadi “momok” dan hambatan riil bagi pelaksanaan pengembangan pendidikan. Meski demikian, hal ini bukan berarti bahwa peran POMG sebagai institusi wakil masyarakat di sekolah hanya sebatas itu saja, ada peran-peran lain yang sebenarnya potensial untuk dikembangkan. Seperti diungkap di muka, bahwa jika hendak mengadopsi konsep MBS, maka masyarakat melalui POMG akan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan mutu sekolah. Dengan penerapan konsep MBS, maka dengan sendirinya konsep lama tentang peran POMG harus diubah, dengan format baru yang lebih memfungsikan POMG bukan lagi sekadar sebagai pengumpul dana. Beberapa fungsi yang dapat dikembangkan adalah:

a) Penggalangan dana bagi pemenuhan fasilitas pendidikan serta penyelenggaraan pendidikan. Seperti diungkap di muka, fungsi ini adalah fungsi yang telah lama dilakukan oleh POMG. Namun perlu diubah format penggalangannya,

tidak seperti praktek sekarang ini, mengadakan pertemuan untuk menghalalkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Penggalangan dana dilakukan setelah POMG menginventarisir kebutuhan-keubutuhan sekolah yang tidak mungkin lagi didanai sekolah, dan berdasar skala prioritas. Dengan begitu bentuk sumbangan-sumbangan dari orang tua akan secara jelas terfokuskan pada sisi mana. Selain itu, perlu pula dilakukan upaya mengubah model sumbangan yang selalu berwujud uang, dengan wujud sarana belajar. Misalnya dari hasil inventarisasi dibutuhkan 10 unit komputer untuk praktek siswa di sekolah, yang selama ini dilakukan adalah menjumlah besar dana yang dibutuhkan lalu membagi sebanyak orang tua siswa. Cara lain yang mungkin perlu dicoba adalah menawarkan pada orang tua siswa, siapa yang berkehendak menyumbang perangkat-perangkat komputer – CPU, monitor, printer, atau meja komputernya –, dan penawaran ini dilakukan di forum pertemuan POMG dengan orang tua siswa. Ada 3 orang tua siswa menyanggupi untuk menyediakan satu unit monitor, biarkan mereka melakukan dengan caranya, dan sekolah menerima monitor dari mereka, bukan sekolah yang membelikannya. Lalu di monitor tersebut ditulis, *monitor ini sumbangan dari (1) Bapak Amir (orang tua dari siswa Amin Kelas II A); (2) Bapak Iman (orang tua dari siswa Aman Kelas III, dan seterusnya.* Konsep ini dapat terus dikembangkan misalnya dengan memberi nama ruang-ruang tertentu dengan nama para penyumbang. Labelisasi ini merupakan wujud terima kasih sekolah pada para penyumbangnya, sehingga suatu saat sekolah akan memiliki ruang pertemuan Suta, karena yang membangun adalah si Suta.

b) Peran berikut yang dapat diemban adalah fungsi pengawas terhadap kinerja sekolah. Selama ini peran ini tidak pernah berani dilakukan oleh POMG, sebab asumsi yang dibangun adalah POMG tidak terkait dengan proses langsung penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak mungkin dapat memahami kinerja sekolah secara baik. Di lain sisi, sekolah

sendiri sepertinya memang sengaja memposisikan POMG seperti itu, agar sekolah steril dari campur tangan “orang luar’, sebaliknya jika sekolah membutuhkan dana baru menarik “orang luar” tersebut untuk membantu menyelesaikannya. Tentunya logika ini tidak *fair*, dan tidak mendidik masyarakat untuk ikut memikirkan keberhasilan proses pendidikan. Pengawasan atas kinerja sekolah ini termasuk di dalamnya kinerja guru dan kepala sekolah, bahkan idealnya (jika berani) POMG memungkinkan untuk merekomendasikan penggantian kepala madrasah jika memang kepala tersebut dianggap tidak profesional dalam menangani proses pendidikan di sekolah, serta mengusulkan calon kepala baru yang dipandang lebih handal. Ide ini memang ekstrim –jika tidak ingin menyebutnya gila-, namun dalam model sistem manajemen berbasis sekolah, ide ini mungkin saja diterapkan. Sebab dalam aplikasinya, MBS banyak menuntut kinerja seorang menejer sekolah yang handal, memiliki kemampuan menejerial pendidikan yang baik. Jika kepala madrasah hanya sekadar bisa, maka jangan berharap akan tercapai otonomi dalam pendidikan. Lantas pertanyaannya adalah, siapkah POMG di satu sisi, dan madrasah (pihak pimpinan terutama) untuk menerapkan fungsi ini? Jika tidak, jangan berharap banyak dengan POMG untuk dapat berkontribusi dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah?

c) Fungsi kepengawasan tersebut dapat pula dilakukan untuk menilai keberhasilan proses pendidikan, sehingga POMG memiliki peluang untuk ikut menentukan kurikulum apa yang akan diberikan sekolah kepada siswa-siswanya. POMG ikut pula menentukan bahan ajar apa yang harus diberikan pada siswa, dan mana yang harus dikurangi. Lagi-lagi pertanyaan yang mengemuka adalah, siapkah masing-masing komponen untuk menjalankan fungsi baru ini. POMG dituntut untuk terus mengikuti perkembangan kurikulum di sekolah, dan sekolah menyedikan informasi yang memadai tentang kurikulum yang diterapkan di sekolahnya.

Barangkali akan muncul kegelisahan dari para guru, karena merasa otoritasnya sebagai pendidik dicemari campur tangan POMG. Terlebih bagi mereka yang "merasa memiliki kualifikasi pada bidangnya". Situasi ini perlu dijelaskan bahwa "campur tangan" POMG hendaklah dimaknai sebagai bantuan untuk memilihkan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa di masa depan. Perlu juga dipahami, terkadang isu yang dilontarkan para guru, tidak lagi relevan dengan kondisi di masyarakat, sementara karena sang guru dahulu menerima materinya "hanya itu", dan tidak sempat mengikuti perkembangan terbaru di masyarakat, bersikukuh mempertahankan isu yang tidak lagi menarik.

d) Bersama-sama pihak sekolah menyusun rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPS). Selama ini proses penyusunan anggaran sekolah dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, tanpa melibatkan unsur manapun. Konsekuensi logis dari model MBS adalah transparansi alokasi dana dan penyusunan RAPS.
e) Dalam upaya untuk mengaktifkan masyarakat, POMG harus menjadi semacam *public relation*-nya sekolah. Dalam hal ini peran aktif anggota pengurus POMG untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar tentang aktivitas sekolah. Tentu saja untuk kebutuhan itu, mereka harus dibekali informasi lengkap tentang sekolah beserta aktivitiasnya.

b. Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Munculnya konsep tentang Manajemen Berbasis Masyarakat dan Manajemen Berbasis Madrasah, diikuti pula konsep baru yang disebut dengan Komite Madrasah menggantikan nama PMOG atau BP3. Konsep ini sesungguhnya merupakan upaya peningkatan ruang lingkup peran POMG dan atau BP3 sebagaimana disebutkan di muka, dalam upaya peningkatan mutu madrasah. Jika POMG dan atau BP3 dalam peran riilnya sebatas mencari tambahan pendanaan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, maka Komite Madrasah yang lahir atas dasar Keputusan Menteri Pendi-

dikan Nasional nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 diharapkan memiliki peran yang lebih luas, yaitu tidak saja sebatas instrumen madrasah dalam pengumpulan dana dari wali murid, melainkan terlibat dalam pemberian pertimbangan, pendukung, pengontrol, sebagai mediator dan peran-peran strategik lainnya dalam pengembangan madrasah. Melalui konsep ini akan dilahirkan sebuah pemahaman baru bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua, dikelola secara terbuka dan demokratis.

Mengimplementasikan konsep komite madrasah tidak mudah, karena aplikasi di lapangan tidak dapat terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang ditetapkan dalam tugas komite madrasah. Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Mendiknas tentang Komite Sekolah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, organisasi semacam itu, yang benar-benar berhasil mampu melakukan peran dan fungsinya secara baik, jumlahnya amat kecil.

Lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah pada kenyataannya hanya berjalan sebatas tataran formal saja. Hal itu tidak saja terlihat pada organisasi yang terkait dengan pendidikan, seperti komite sekolah/ madrasah, tetapi juga badan-badan lainnya yang terkait dengan lembaga seperti yayasan badan pembina sebuah perguruan tinggi, atau lembaga sosial lainnya. Selama ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana organisasi semacam komite madrasah itu dapat berhasil melakukan fungsi dan perannya sebagaimana yang diharapkan, sehingga komite madrasah keberadaannya bukan sekadar sebagai pemenuhan syarat dan rukun sebuah lembaga pendidikan, melainkan benar-benar mampu memberi manfaat bagi pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa komite madrasah dengan berbagai struktur kelengkapannya sudah terbentuk namun keberadaannya bagaikan jasad tanpa ruh. Pada tataran administrasi kelengkapan organisasi lembaga pendidikan

itu sudah terbentuk, tetapi keberadaannya sebatas pemenuhan administrasi belaka. Orang-orang yang duduk pada organisasi seperti ini biasanya tidak bisa mencurahkan pikiran dan tenaganya secara penuh. Pada umumnya yang terjadi di lapangan, mereka hanya berperan secara periodik jikalau ada problem yang harus diselesaikan bersama. Kehidupan organisasi seperti itu menjadikan para anggota organisasi itu hanya memberikan perhatian terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka dengan tidak sepenuh hati atau setengah-setengah. Bermula dari sikap seperti ini menjadikan organisasi tidak berjalan dengan baik, dan bahkan oleh karena informasi terkait dengan lembaga pendidikan tidak dapat dibagi secara merata, sebagai akibatnya rentan menimbulkan konflik yang kontraproduktif.

Dengan demikian, dalam rangka mengimplementasikan konsep komite madrasah sesuai dengan tugas dan fungsinya, menurut hemat penulis, pada fase-fase awal perlu dikembangkan tradisi bersilaturahmi di antara para pengurus. Silaturahmi dalam bentuknya yang sangat sederhana, misalnya berupa studi banding ke lembaga pendidikan madrasah yang sudah maju. Selain itu, pertemuan-pertemuan di antara para anggota komite madrasah perlu semakin diintensifkan. penulis berpandangan bahwa kekuatan penggerak untuk mengembangkan madrasah bukan semata-mata bersumber dari kekuatan eksternal berupa peraturan dan juga dana, melainkan bersumber dari dalam diri masing-masing anggota komite madrasah. Gerakan yang datangnya sekadar memenuhi ketentuan atau peraturan hanya akan menjadi gerakan semu dan bersifat karitatif. Jika hal itu terjadi hanya akan menghasilkan bentuk kegiatan semu pula yang tidak akan membawa hasil pada pengembangan madrasah. Sebagai tambahan, jika kegiatan itu sekadar bermotifkan fasilitas apalagi hanya akan mengontrol jalannya pendidikan, apalagi hanya sebatas aspek keuangannya, akan berdampak kurang produktif. Sebab, bisa jadi justru melahirkan konflik-konflik disfungsional dilingkungan madrasah. Boleh saja dengan alasan agar terjadi suasana keterbukaan dan demokratisasi di lingkungan

madrasah, akan tetapi jika tidak dikelolan dengan baik justru akan berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup madrasah.

Pada beberapa kasus, madrasah selama ini berkembang, apalagi yang berstatus swasta, disangga oleh orang-orang yang menyandang cita-cita dan memiliki komitmen yang tinggi pada lembaga pendidikan Islam. Mereka bersedia mengorbankan apa saja yang dimiliki untuk kepentingan pengembangan madrasah didasari atas suasana hati bersih, ikhlas, dan tawakal dengan niat beribadah. Sehingga, bisa jadi pendekatan modern dalam rangka membangun suasana keterbukaan itu justru mengurangi kekuatan yang sebelumnya telah nyata-nyata mampu menjadi penopang kehidupan madrasah itu sendiri.

Pengembangan madrasah, terutama pada fase madrasah yang secara umum masih seperti sekarang ini, oleh karena kekuatannya baru pada tingkat orang, belum pada tingkat sistem atau organisasinya, maka upaya-upaya untuk membangun, menambah, dan menyatukan orang-orang yang mengambil peran di madrasah justru lebih diutamakan, daripada sekadar memenuhi peraturan formal. Jika madrasah memiliki orang yang berkemampuan manajerial dan leadership unggul maka perlu diselamatkan dari kemungkinan tersisih oleh sekadar menjalankan peraturan. Pandangan ini mengemuka untuk menghindari pemborosan energi dan bahkan bermakna kontradiktif.

Di tengah-tengah kondisi yang amat kesulitan mencari orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial dan *leadership* sekaligus ketulusan yang tinggi terhadap pengembangan madrasah, pada sisi yang lain orang yang berkapabilitas seperti itu terpaksa harus meninggalkan peran strategisnya sekadar karena peraturan. Pada saat sekarang ini, untuk menjamin kelangsungan madrasah, terutama madrasah swasta, adalah terkucukupinya kebutuhan dasar guru. Tidak sedikit guru yang hanya diberi honorarium jauh di bawah standar upah minimal. Jika persoalan mendesak yang memberi jaminan hidup bagi guru-guru madrasah ini dapat dipecahkan, maka madrasah tidak saja menjadi tahan

hidup, tetapi insya Allah akan mampu mengikuti tuntutan zaman yang senantiasa berkembang dan berubah ini.

3) Pendekatan dalam Mendorong Masyarakat Berpartisipasi terhadap Madrasah

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi, pola, dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh komite madrasah dan kepala madrasah untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah. Kesimpulan ini diambil dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tidak hanya bentuk-bentuk konkrit yang ada, yang dilakukan oleh pihak komite madrasah dan kepala madrasah, tapi juga berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari orang tua siswa sebagai *costumer* atau pengguna jasa madrasah.

Komite dan kepala madrasah harus mampu melakukan berbagai upaya dan langkah srategis untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah. Secara garis besar ada dua langkah strategis yang dapat digunakan untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah, yaitu: pendekatan bahasa Agama dan ideologis dan pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) atau pendekatan mutu.

Pertama, pendekatan bahasa agama dan ideologi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman, penyadaran, dan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Dua pendekatan ini, dinilai lebih efektif dan lebih mudah untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah. Faktor ini memiliki implikasi postitif dan sangat efektif. Atas nama agama orang rela bekorban apa saja yang ia miliki, hingga diri sekalipun.

Adapun implikasi teoritis hasil temuan ini, mendukung dua teori gerakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Ismail seperti yang dikutip oleh Faisal bahwa masyarakat berketetapan hati (rela) untuk bergabung dan terlibat memperjuangkan paham beserta

cita-cita yang diusung oleh gerakan sosial bersangkutan, karena mereka memang sepakat pada filosofi dan ideologi yang ditawarkan (untuk diperjuangkan) oleh gerakan sosial tempatnya bergabung tersebut. Dan teorinya Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Arifin menyebutnya dengan faktor ideologis sebagaimana yang dikemukakan pada bahasan sebelumnya.

Kedua, pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) atau pendekatan mutu. Pendekatan ini digunakan untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Bahwa masalah kualitas mutu merupakan harapan dan pilihan semua orang. Tidak ada seorang pun memilih memasukkan anaknya pada suatu lembaga apapun tanpa memilih faktor kualitas mutu. Semua orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai agent perubahan (*the change of knowledge*) dan ilmu pengetahuan sebagai energi kekuatan (*the power of knowledge*) bagi putra putrinya, maka masalah biaya tidak menjadi persoalan fundamental untuk memilih sekolah-sekolah unggul dengan partisipasi tinggi. Tipe masyarakat model ini, melihat bahwa anak adalah investasi yang tidak ada nilainya dengan materi lainnya. Sehingga mereka mengeluarkan biaya sebesar apapun, mereka rela, puas, dan senang. Akan tetapi mereka menaruh harapan besar dan selalu menuntut bukti terhadap madrasah yang menawarkan jaminan mutu.

4) Prinsip-prinsip Membangun Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah

Sangat penting bagi madrasah untuk menjalankan peranan kepemimpinan yang aktif dalam menggalakkan program-program madrasah melalui peran serta aktif orang tua dan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengupayakan partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap keberhasilan program madrasah, di antaranya:

a. Menjalin Komunikasi yang Efektif dengan Orang Tua dan Masyarakat

Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua dan masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaanya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan madrasah. Jadi prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat, yaitu:

1) Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi teman lain. Orang-orang itulah yang tahap pertama dihubungi, diajak konsultasi, dan diminta bantuannya untuk menarik orang lain berpartisipasi dalam program madrasah. Tokoh-tokoh semacam itu dapat berasal dari orang tua siswa atau warga masyarakat yang "dituakan" atau "informal leaders", pejabat, tokoh bisnis, dan profesi lainnya.
2) Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan madrasah, khususnya yang sesuai dengan minatnya. Misalnya tokoh seni dapat dilibatkan dalam pembinaan kesenian di sekolah. Orang yang hobi olahraga dapat dilibatkan dalam program olahraga madrasah. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut diperankan sebagai mediator dengan masyarakat luas.
3) Memilih saat yang tepat, misalnya pelibatan masyarakat yang hobi olahraga dikaitkan dengan adanya PON atau sejenis yaitu saat minat olahraga di masyarakat sedang naik. Pelibatan tokoh dan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan/kesehatan dimulai pada hari Kesehatan Nasional misalnya.

4) Melibatkan Masyarakat dan Orang Tua dalam Program Madrasah

Pepatah “Tak senang jika tak kenal” juga berlaku dalam hal ini. Oleh karena itu sekolah harus mengenalkan program dan kegiatannya kepada masyarakat. Dalam program tersebut harus tampak manfaat yang diperoleh masyarakat jika membantu program madrasah. Untuk maksud di atas, madrasah dapat melakukan:

1) Melaksanakan program-program kemasyarakatan, misalnya kebersihan lingkungan, mambantu lalu lintas di sekitar madrasah, dan sebagainya. Program sederhana semacam ini dapat menumbuhkan simpati masyarakat.
2) Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan madrasah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.
3) Mengadakan buletin madrasah atau majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program maddrasah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.
4) Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program madrasah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar madrasah atau orang tua untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan madrasah.
5) Membuat program kerja sama madrasah dengan masyarakat, misalnya perayaan hari-hari nasional maupun keagamaan

b. Memberdayakan Komite Madrasah

Keberadaan Komite Madrasah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di madrasah. Melalui komite madrasah orang tua dan masyarakat ikut merencanakan,

melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di madrasah. Untuk meningkatkan komitmen peran serta masyarakat dalam menjunjang pendidikan, termasuk dari dunia usaha, perlu dilakukan antara lain dengan upaya sebagai berikut:

1) Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan terutama ditingkat madrasah. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan jasa pendidikan akan semakin mendekati kepentingan masyarakat yang dilayani.
2) Selanjutnya program swadana, yaitu pemerintah baru akan memberikan sejumlah bantuan tertentu pada madrasah apabila masyarakat telah menyediakan sejumlah biaya pendamping.
3) Mengembangkan sistem sponsorship bagi kegiatan pendidikan.

Melalui upaya-upaya yang dilakukan pihak madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam mendukung program-program madrasah dapat teroptimalkan.

Pada dasarnya upaya untuk menarik keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan madrasah lebih didasari upaya untuk "membangun hubungan yang saling percaya (*trust relationship*). Prinsip hubungan ini merupakan nilai dasar (*basic value*) dari institusi pendidikan. Kemauan masyarakat untuk menyekolakan anaknya merupakan salah satu dari aktualisasi hubungan ini. Dengan demikian hubungan saling percaya merupakan kunci sukses dari madrasah di masa mendatang.

Dalam mewujudkan hubungan yang saling percaya, terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan. Prinsip tersebut diasarkan pada sistem nilai yang berlaku pada masyarakat dan akan bervariasi dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, seperti:

1. Mengutamakan Kesetaraan dan Etika

Menekankan pada kesetaraan program dan target program merupakan kunci pokok dalam keberhasilan membangun

partisipasi masyarakat. Melalui kesetaraas ini proses komunikasi dan belajar dari kedua belah pihak dapat berlangsung relatif lebih mudah. Melalui prinsip kesetaraan ini juga akan terbangun suatu etika hubungan yang saling menghargai yang didasari oleh norma-norma yang berlaku.

2. Mengutamakan keterbukaan dan kejujuran

   Keterbukaan dan kejujuran ibarat dua keping mata uang yang salin berkaitan. Implikasi dari keterbukaan adalah kejujuran. Sifat keterbukaan akan menghilangkan kecurigaan dan pada akhirnya dapat menumbuhkan suatu sikap saling percaya.

3. Memberikan manfaat secara timbal balik

   Prinsip ini juga tak kalah pentingnya dalam membangun partisipasi masyarakat. Meskipun pendidikan merupakan layanan yang berfungsi sosial, akan tetapi pemberian nilai tambah, baik dalam bentuk sosial seperti pengakuan, status sosial, kepuasa dan lain-lain, maupin berbentuk material seperti meningkatkan pendapatan, perbaikan keidupan masyarakat dan lingkungan, akan dapat menarik perhatian mereka.

4. Pemberdayaan (penguatan) masyarakat

   Satu hal yang penting dalam melibatkan masyarakat untuk mengembangkan program adalah dengan lebih mengutamakan pada program yang dapat menguatkan dan juga memberikan nilai tambah bagi mereka. Penguatan ini juga dapat dilihat bahwa keterlibatan mereka juga mendorong mereka untuk memiliki akses (kesempatan) dan kontrol (suatu kemampuan untuk memutuskan dan memilih) terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka.

Pada dasarnya membagun partisipasi masyarakat bertujuan untuk lebih meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan-kefietan madrasah. Akan tetapi, diamping mengembangkan bentuk yang baru, memelihara hubungan-hubungan yang telah terjalin merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya. Melalui pemeliharaan hubungan inilah yang mampu

membuat keberlanjutan dan ketahanan jaringan (*network*) keterlibatan masyarakat. Terdapat sebuah konsep yang cukup populer dalam mempertahankan hubungan dengan masyarakat, yaitu: pelanggan lama lebih baik dari pelanggan baru (*old customer are better than new customer*).

Ada pula satu konsep yang mengatakan memelihara hubungan lebih sulit dari pada membuat hubungan baru". Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan dari berbagai pengalaman menunjukan bahwa memelihara hubungan yang telah ada seringkali tidak diperhatikan yang berakibat semakin pudarnya hubungan tersebut dan membutuhkan suatu usaha yang lebih untuk mendapatkannya kembali. Pemeliharaan hubungan (jaringan) madrasah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media, antara lain: kartu ucapan, buletin kegiatan madrasah, undangan dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

Bahwa masyarakat pada umumnya mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap madrasah, baik aspek fisik dan ligkungannya, aspek sumber daya manusianya, maupun aspek hubungannya dengan masyarakat sesuai faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan pada prinsipnya masyarakat secara umum memandang perlunya peningkatan kualitas madrasah terutama dalam hal kelembagaan, kepemimpinan, manajemen sumber dayanya, pendanaan dan pola hubungan antara madrasah dan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap madrasah di adalah faktor ideologis, teologis, fisiologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan faktor akademis. Faktor ideologis didasarkan pada madrasah sebagai fenomena pedesaan yang sangat kental dengan hal-hal yang bersifat ideologis, tradisi dan budayanya masing-masing. Faktor teologis didasarkan pada keinginan masyarakat untuk internalisasi nilai-nilai religious agar memiliki kesiapan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Faktor sosiologis didasarkan pada seberapa jauh lembaga pendidikan

dapat memenuhi peran-peran sosial dalam masyarakat. Faktor fisiologis didasarkan pada faktor eksternal yang bersifat fisik. Faktor akademis didasarkan pada performansi dan prestasi yang menunjukkan bahwa madrasah tersebut dikelola secara profesional. Sedangkan faktor ekonomis didasarkan pada tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai pendidikan di madrasah yang bersangkutan.

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap madrasah terwadah dalam empat lembaga partisipasi yaitu; a) partisipasi orang tua siswa secara khusus terhimpun dalam lembaga partisipasi orang tua wali, yang disebut dengan Persatuan Orang Tua Murid Guru (POMG); b) Partisipasi masyarakat umum, c) Partisipasi Komite Madrasah (KM) dan Dewan Pendidikan (DP), d) Partisipasi alumni yang terwadahi dalam organisasi alumni.

Upaya-upaya yang dilakukan pengelola madrasah untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah yaitu; 1) memperkenalkan tipologi madrasah kepada masyarakat, 2) mengoptimalkan fungsi dan peranserta lembaga partisipasi masyarakat, 3) dengan melakukan pendekatan bahasa agama dan ideologis dan pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) atau pendekatan mutu. Pendekatan bahasa agama dan ideologi digunakan untuk memberikan pemahaman, penyadaran, dan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap madrasah. Sedangkan pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) atau pendekatan mutu digunakan untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang tinggi terhadap dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Imron. *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs dan Multi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,* Malang: Unisma, 2000.

Amstrong, Michel. *Seri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia,* Alih Bahasa: Cikmat et.al., Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1990.

Asngari, P.S. *Persepsi Direktur Penyuluhan Tingkat Keresidenan dan Fungsi Lembaga Penyuluhan Pertanian di daerah Texas Amerika Serikat,* Fakultas Pertanian: IPB, 1986.

Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam,* Jakarta:Logos, 1999.

Assegaf, Abd. Rahman. *Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep,* Cet. I; Jogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Atkinson, R.C. dan E.R. Hilgar. *Pengantar Psikologi* diterjemahkan oleh Nurjannah taufik dan Rukmini Barhana, Jakarta: Erlangga, 1991.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.

----------*Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi,* Cet. I; Jakarta: Kompas, 2002.

----------, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru,* Jakarta: Logos, 1999.

Basrowi. *Pengantar Sosiologi,* Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Darwis, Jamaluddin. *Dinamika Pendidikan Islam; Sejarah, Ragam dan Kelembagaan,* Bandung: RasaIl, 2006.

Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,* Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,* Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2002.

Fadjar, Malik. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* , Jakarta: LP3NI, 1998.

Faturrahman, Lalu Agus. *Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat,* Ilmu Sosial Dasar ed. Josef Riwu Koho Surabaya : Usaha Nasional, 1986.

Furchan, Arief. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.

Getteng, Abd Rahman. *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan;Tinjauan Historis dari Tradisional hingga Modern,* Cet. I; Jogyakarta: Graha Guru, 2005.

Halim, Abd Rahman. *Kebijakan dan Partsipasi Masyarakat terhadap Pembinaan Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan,* Cet. I; Makassar: FATIYA, 2008.

-------------, *Paradigma Baru Sistem Pembinaan Madrasah,* Cet. I; Makassar: FATIYA, 2008.

Irwanto. *Psikologi Umum,* Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2007 BPS Kabupaten Soppeng

Karni, Asrori S. *Etos Studi Kaum Santri; Wajah Baru Pendidikan Islam,* Cet. I; Bandung: Mizan, 2009.

Kepmendiknas, No. 044/U/2003

Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : Penerbit PPM, 2003.

Ma'luf, Lois. *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam,* Cet.-XXIII, Dar al-Masyriq, Beirut, tt.

Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* Jakarta: Paramadina, 1997.

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* Jakarta: Logos, 1999.

Mar'at, *Sikap Manusia; Perubahan dan Pengukurannya,* Cet. I; Jakarta: Ghalia, 1984.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Mastuhu, M. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner,* Cet. I ; Jakarta : Lentera Hati, 2007.

Miles, M.b. dan A.M. Hubermen. *Qualitative Data Analysis,* diterjemahkan oleh Djedjep Roehadi dengan judul; *Analisa Data Kualitatif,* Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Tjun Surjaman, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. I; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam,* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

--------------, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah,* Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial lainnya,* Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah,* Cet. XI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

-------------, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional,* Cet. IX; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menyongsong Masa Depan Pendidikan Indonesia,* Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008.

Nakosteen, Mehdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti: 1996.

Nanang, Fatah. *Konsep Manajemen Berbasisis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan,* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

.... *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* Bandung: Tarsito, 1996.

Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2003.

Pasaribu, L. dan B. Simanjuntak. *Sosiologi Pembangunan,* Bandung: Tarsito, 1986.

Procter, Paul (Editor). *Cambridge International Dictionary of English,* London: University of Cambridge Press, 1995.

Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi* , Cet. XVII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Rama, H. Bahaking. *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren; Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan,* Cet. I; Jakarta: PT. Parodatama Wiragemilang, 2003.

Ramon, Sumardi. *Sosiologi dan Antropologi,* Surabaya : Sinar Wijaya, 1985.

Robinson, P. (terj). *Sosiologi Pendidikan,* Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Saleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Gemawindu Panca Perkasa, 2000.

-------------, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sanapiah, Faisal, et.all. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP,* Malang: UM Press, 2007.

Sarijo, Marwan (Penyunting). *Mereka Bicara Pendidikan Islam; Sebuah Bunga Rampai,* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Satori, Djam'an, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009.

Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia,* Cet. XII; Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Shaw, Stanford J. *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,* Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Soebadio, Harjati "Agama sebagai Sasaran Penelitian Filologi", dalam Parsudi Suparlan (peny.), *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama* Jakarta: Balitbang Depag RI, 1981/1982.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern Jakarta*: LP3ES, 1986.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Cet. IV; Bandung: ALFABETA, 2008.

Suminto, H. Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda,* Jakarta: LP3ES, 1985.

Suprayogo, Imam. *Quo Vadis Madrasah; gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah,* Cet. I; Yogyakarta: Hikayat, 2007.

Susetyo, Benny. *Politik Pendidikan Penguasa,* Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005.

Suwito, M. Fauzan (Ed.) *Sejarah Sosial Pendidikan Islam,* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.

Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial; Sebuah Kajian Pendekatan Struktura,* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Syalabi, Ali Muhammad. *Tarikh al-Ta'lim fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su 'udiyyah,* Kuwait: Dar al-Qalam, 1987.

Sztompka, Piotr. yang dialibahasakan oleh Alimandan dengan judul *Sosiologi Perubahan Sosial,* Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Tilaar, H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

------------ *Paradigma Baru Pendidikan Nasional,* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

-----------, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional,* Magelang: Indonesia, 1999.

Tim Depag, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, 2IJKL. MNO, 1993.

Republik Indonesia,*Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung : Citra Umbara, 2006.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)*, Bandung: Citra Umbara, 2006.

W. Sarwono, Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum,* Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

al-Yasu'i, *Abu* Luwis. *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-A'lam,* Cet.-23, Dar al-Masyriq, Beirut, tt,

Yatim, Badri. *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925,* Jakarta: Logos, 1999.

BIOGRAFI PENULIS

Hasyim Haddade, lahir pada tanggal 5 bulan 5 tahun 1975, pada jam 5 dini hari dan anak ke 5 dari 7 bersaudara, di Coppeng-Coppeng, Desa Barae (Sekarang: Desa Soga) Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng. Di kampung inilah pertama kalinya menginjakkan kaki di lembaga pendidikan formal tingkat dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) DDI Coppeng-Coppeng (tamat, 1987). Beranjak usia remaja, penulis melanjutkan studinya di Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Pondok Pesantren Yasrib Soppeng di bawah asuhan kepemimpinan 'Anregurutta' K.H. Basri Daud Ismail (almarhum). Di pesantren inilah mengenal lebih jauh ilmu Bahasa Arab dan mulai belajar membaca 'kitab 'kuning' serta buku-buku literature keislaman lainnya (tamat, 1990).

Setelah itu, penulis melanjutkan studinya di Madrasah Aliyah DDI Cab. Pattojo. Selama tiga tahun di madrasah ini di bawah kepemimpinan 'Anregurutta' K.H. M. Arsyad Lannu, (Ustaz Masse), penulis menghabiskan waktunya untuk memperdalam disiplin ilmu-ilmu agama dan Bahasa Arab hingga tamat pada tahun 1993.

Dengan *basic* pengetahuan agama dan bahasa Arab yang diperolehnya selama kurang lebih 10 tahun belajar di madrasah, memasuki dunia perguruan tinggi, pilihan satu-satunya penulis adalah IAIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dengan melalui proses SPMB yang cukup ketat, *Alhamdulillah* berhasil lulus pada tahun 1993 dan menyelesaikan studinya dalam waktu 4 setengah tahun tepatnya pada Wisuda sarjana periode November tahun 1997 dengan judul skripsi: *Al-Huruf wa Aqsamuhaa fi Surah al-Qiyamah.* (Klasifikasi *al-Huruf* dalam Surah al-Qiyamah). Lima bulan setelah menyandang gelar sarjana (S.Ag.), penulis kemudian mengikuti

program Prapasca selama 2 bulan sebagai persiapan untuk memasuki Program Pascasarjana (S.2). Dengan bekal itulah, penulis berhasil lulus seleksi ujian masuk Program Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar tahun 1998, meskipun dengan biaya mandiri. Oleh karena di PPs IAIN Alauddin pada tahun 1998 belum dibuka program studi Bahasa Arab, dan diharuskan memilih 2 konsentrasi, maka *penulis* memilih Konsentrasi; Tafsir-Pendidikan dan sempat menyelesaikan studinya dalam waktu 1 tahun 11 bulan, tepatnya pada Wisuda Periode Oktober tahun 2000, dengan judul tesis; *Tujuan Pendidikan Qur'ani*; Sebuah Kajian Tafsir Tematik).

Pada tahun 2001, penulis mengikuti seleksi CPNS formasi Dosen dan *Alhamdulillah* dinyatakan lulus seleksi CPNS, dan ditempatkan di Fakultas Ushuluddin pada jurusan Tafsir Hadis. 4 tahun kemudian, penulis memutuskan untuk mengikuti sunnah rasul dengan menikahi gadis yang bernama Widiawati pada bulan Oktober 2004. *Alhamadulillah* sekarang telah dikaruniai 2 putra, dan 1 putri; Ahmad Zuhry Hasyim (16 th), dan Hawiz Ma'arif (11 th), dan Gaitsa Grytha Hasyim (6 th).

Selama kurang lebih 6 tahun, setelah resmi menjadi PNS formasi dosen dan mengajar mata kuliah bahasa Arab di fak. Usuluddin dan Filsafat, *penulis* mendapat izin dari Pimpinan Fakultas untuk melanjutkan studinya pada Program S3 di UIN Alauddin Makassar.

Akhirnya pada tahun 2007, penulis resmi menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) dengan konsentrasi Pendidikan dan Keguruan. Setelah berjalan 2 tahun masa studi di Program Doktor (S3), tepatnya dipenghujung tahun 2009, penulis mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk mengikuti *sandwich program* di Uni Hamburg Jerman selama 1 bulan. Di saat yang sangat singkat itulah, penulis menyempatkan diri untuk *rihlah* ke beberapa Negara di Eropa seperti Belanda, Prancis, Itali bahkan sampai ke Negara terkecil dunia yaitu Vatikan.

Selama menjadi Mahasiswa S1 maupun S2, penulis aktif di beberapa lembaga/organisasi kemahasiswaan. Seperti organisasi

IMDI (Ikatan Mahasiswa DDI). Tahun 1998-2000, dipercaya sebagai salah satu pengurus Pucuk Pimpinan IMDI (PP-IMDI). *penulis* juga diposisikan sebagai Pembina IMPS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng) Koperti UIN Alauddin Makassar.

Selama kurang lebih 20 tahun berkiprah di UIN Alauddin, penulis pernah diserahi amanah oleh pimpinan universitas, di samping sebagai dosen tetap pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fak. Usuluddin dan Filsafat. Yaitu pada tahun 2011-2015 sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fak. Sains dan Teknologi. Tahun 2016-2017 sebagai Manajer Asrama yang merupakan salah satu unit pengembangan bisnis UIN Alauddin Makassar. Juga pernah diserahi tugas sebagai Sekretaris Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Pascasarjana, tahun 2018-2019. Sekarang penulis sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora periode 2019-2023.

Alamat:
UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36
Romangpolong, Samata,
Kabupaten Gowa.